

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Gambaran Umum Kabupaten Malang

##### 4.1.1 Karakteristik fisik dasar

Kabupaten Malang secara geografis terletak antara 112<sup>0</sup>17', 10.90" Bujur Timur dan 122<sup>0</sup>57', 00,00 Bujur Timur dan antar 74<sup>0</sup>4, 55,11 Lintang Selatan dan 8<sup>0</sup>26, 35,45 Lintang Selatan. Dengan luas wilayah sekitar 3.347,87 Km<sup>2</sup>, terdiri dari 33 Kecamatan yang tersebar pada wilayah perkotaan dan perdesaan. Batas administrasi Kabupaten Malang antara lain :

- Sebelah Utara : Kabupaten Pasuruan dan Mojokerto
- Sebelah Timur : Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Probolinggo
- Sebelah Selatan : Samudera Indonesia
- Sebelah Barat : Kabupaten Blitar dan Kabupaten Kediri

Letak geografis Kabupaten Malang memiliki posisi yang cukup strategis, hal tersebut ditandai dengan berkembangnya jalur transportasi yang melalui Kabupaten Malang dari waktu ke waktu.

Secara umum kondisi lahan di Kabupaten Malang dapat mendukung aktivitas pertanian, hal ini ditandai dengan daya dukung lahan yang relatif subur untuk pertanian dan perkebunan. Untuk luas kawasan pertanian di Kabupaten Malang secara keseluruhan seluas 148.204 Ha terdiri dari sawah irigasi teknis seluas 34.263 Ha, sawah irigasi non teknis seluas 11.255 Ha, sawah tadah hujan seluas 4.001 Ha dan Tegal/kebun seluas 98.685 Ha.

##### 4.1.2 Karakteristik sarana dan prasarana wilayah

Karakteristik sarana dan prasarana wilayah di Kabupaten Malang meliputi karakteristik pasar, jalan, dan irigasi.

###### A. Pasar

Jumlah pasar di Kabupaten Malang sebesar 33 pasar dengan klasifikasi pasar terbagi menjadi lima kelas, yaitu pasar kelas I, II, III, dan V. Jumlah pasar dengan klasifikasi pasar kelas I terdiri dari sembilan pasar, klasifikasi pasar kelas II terdiri dari delapan pasar, klasifikasi pasar kelas III terdiri dari sebelas pasar dan klasifikasi pasar kelas IV terdiri dari lima pasar. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 4.1 Klasifikasi Pasar di Kabupaten Malang**

No.	Kelas I	Kelas II	Kelas III	Kelas IV
1	Lawang	Wajak	Bantur	Kaligadung
2	Kepanjen	Sumberpucung	Ngantang	Cungkal
3	Singosari	Pakis	Watesbelung	Kromengan
4	Gondanglegi	Sumbermanjing Wetan	Pagak	Jabung
5	Tumpang	Donomulyo	Ngebruk	Sedayu
6	Dampit	Bululawang	Tajinan	
7	Karangploso	Pakisaji	Krebet	
8	Turen	Wonokerto	Jeru	
9	Pujon		Sumedang	
10			Sumbermanjing Kulon	
11			Bakroto	

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pasar (2013)

## B. Jalan

Panjang jalan yang ada di Kabupaten Malang mencapai 1.899,32 km terbagi atas jalan negara jalan negara 115,63 Km (1%), jalan provinsi 114,93Km (1%), jalan kabupaten 1.668,76 Km (19%) dan jalan desa 6.907,91Km (79%) sehingga total 8.807,23 km. Panjang jalan yang tergolong kondisi baik di Kabupaten Malang dari tahun 2009 – 2012 meningkat cukup signifikan yaitu tahun 2009 panjang jalan 1.257,52 Km, tahun 2010 mencapai 1.314,67 Km, tahun 2011 mencapai 1.324,69 Km, dan tahun 2012 panjang jalan mencapai 1.385,70 Km. Peningkatan panjang dan kualitas infrastruktur jalan berpengaruh terhadap peningkatan akses transportasi. Hal tersebut berdampak pada kegiatan distribusi barang khususnya arus distribusi beras ke pasar-pasar utama di Kabupaten Malang. Data terkait infrastruktur jalan dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 4.2 Panjang Jalan Negara, Provinsi dan Kabupaten Malang Tahun 2012 (Km)**

Keadaan / Kondisi	Negara	Provinsi	Kabupaten
<b>Jenis Permukaan</b>			
Aspal	115,63	114,93	1577,44
Makadam	-	-	119,71
Tanah	-	-	91,32
Jumlah	115,63	114,93	1,668.76
<b>Kondisi</b>			
Baik	115,63	114,93	1,385.70
Sedang	-	-	-
Rusak	-	-	235,50
Rusak Berat	-	-	47,56
Jumlah	115,63	114,93	1,668.76
<b>Kelas Jalan</b>			
Kelas I	-	-	-
Kelas II	-	-	-
Kelas III	-	-	-
Kelas III A	-	-	-

Kelas III B	-	-	-
Kelas III C	-	-	1,668.76
Tidak Dirinci	-	-	-
Jumlah	-	-	1,668.76

Sumber : Kabupaten Dalam Angka Tahun 2013

**Tabel 4.3 Panjang Jalan Desa per Jenis Permukaan, Kondisi dan Kelas Jalan, 2009-2012(Km)**

Kategori	2009	2010	2011	2012
<b>Jenis Permukaan</b>				
Aspal	3.927,15	4.363,48	4.489,66	4.489,66
Kerikil	2.650,75	2.432,59	2.354,56	2.354,56
Tanah	330,00	111,83	63,68	63,68
Tidak Dirinci	-	-	-	-
Jumlah	6.907,90	6.907,90	6.907,90	6.907,90
<b>Kondisi Jalan</b>				
Baik	3.927,15	4.116,08	4.158,56	4.158,56
Sedang	-	-	-	-
Rusak	2.650,75	3.561,82	2.524,84	2.524,84
Rusak Berat	330,00	230,00	224,51	225,51
Jumlah	6.907,90	6.907,90	6.907,91	6.907,91
<b>Kelas Jalan</b>				
Kelas I	-	-	-	-
Kelas II	-	-	-	-
Kelas III	-	-	-	-
Kelas III A	-	-	-	-
Kelas III B	-	-	-	-
Kelas III C	-	-	-	-
Tidak Dirinci	6.907,90	6.907,90	6.907,91	6.907,91
Jumlah	6.907,90	6.907,90	6.907,91	6.907,91

Sumber : Kabupaten Dalam Angka Tahun 2013

### C. Irigasi

Total luas kawasan pertanian di Kabupaten Malang secara keseluruhan seluas 148.204 Ha. Berdasarkan jenis irigasi, total luas kawasan pertanian di Kabupaten Malang terbagi menjadi sawah irigasi Teknis seluas 34.263 Ha, sawah irigasi non teknis seluas 11.255 Ha, sawah tadah hujan seluas 4.001 Ha dan Tegal/ kebun seluas 98.685 Ha. Letak kawasan pertanian tersebut tersebar diseluruh kecamatan di Kabupaten Malang. Keberadaan infrastruktur irigasi akan mendukung aktivitas pertanian dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas hasil pertanian. Data terkait infrastruktur irigasi dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 4.4 Luas Lahan Sawah menurut Jenis Irigasi Kabupaten Malang Tahun 2012 (Ha)**

Kecamatan	Teknis	Semi Teknis	Sederhana	Desa/Non PU	Tandah Hujan	Jumlah
Donomulyo	-	536	1.298	-	183	2.017
Kalipare	-	-	-	1.462	1.445	2.907
Pagak	-	470	-	-	60	530
Bantur	178	68	456	212	339	1.253
Gedangan	-	-	-	-	761	761
Sumbermanjing	197	-	-	418	234	849

Kecamatan	Teknis	Semi Teknis	Sederhana	Desa/Non PU	Tandah Hujan	Jumlah
Dampit	445	893	-	143	-	1.481
Tirtoyudo	-	200	217	82	-	499
Ampelgading	-	172	42	102	91	407
Poncokusumo	925	-	545	-	-	1.470
Wajak	613	209	586	78	-	1.468
Turen	1.331	757	346	-	-	2.434
Buluwang	1.531	429	-	-	-	1.960
Gondanglegi	2.584	380	278	3	-	3.245
Pagelaran	1.934	496	220	-	-	2.650
Kepanjen	2.390	-	-	9	-	2.399
Sumberpucung	1.873	-	-	-	-	1.873
Kromengan	338	1.369	-	-	-	1.707
Ngajum	420	355	615	56	246	1.692
Wonosari	77	44	-	799	-	920
Wagir	345	695	225	51	-	1.316
Pakisaji	1.471	346	-	-	-	1.817
Tajinan	886	50	45	769	2	1.752
Tumpang	1.316	-	181	-	8	1.505
Pakis	1.562	244	100	-	-	1.906
Jabung	1.029	139	-	11	45	1.224
Lawang	437	196	71	-	-	704
Singosari	905	524	131	-	-	1.560
Karangploso	988	154	182	-	-	1.324
Dau	307	11	126	20	19	483
Pujon	708	63	225	-	520	1.516
Ngantang	687	-	449	-	26	1.162
Kasembon	287	36	302	81	-	706
Jumlah	25.764	8.836	6.640	4.296	3.979	49.515

Sumber : Kabupaten Dalam Angka Tahun 2013

**Tabel 4.5 Luas Lahan Sawah menurut Jenis Irigasi per UPTD Tahun 2012 (Ha)**

UPTD	Teknis	Semi Teknis	Sederhana	Jumlah
Ngantang	1.718,50	99,00	1.119,00	2.936,50
Malang	2.613,00	4,00	127,00	2.744,00
Singosari	2.242,00	1.212,00	411,00	3.865,00
Tumpang	5.109,00	120,00	34,00	5.263,00
Bululawang	2.508,00	0,00	1.573,00	4.081,00
Turen	3.248,00	3.379,00	1.587,00	8.214,00
Gondanglegi	5.416,00	550,00	239,00	6.205,00
Kepanjen	4.824,00	2.584,00	690,00	8.098,00
Ngajum	256,00	3.407,00	816,00	4.479,00
Jumlah	27,394,50	11.355,00	6.596,00	45.885,50

Sumber : Kabupaten Dalam Angka Tahun 2013

#### 4.2 Gambaran Umum Wilayah Penelitian

Gambaran umum wilayah penelitian meliputi lima kecamatan yang merupakan lokasi penelitian, yaitu Kecamatan Bantur, Kecamatan Bululawang, Kecamatan Jabung, Kecamatan Karangploso, dan Kecamatan Sumberpucung. Gambaran umum tersebut berupa karakteristik fisik dasar, karakteristik harga beras di 5

pasar, karakteristik sarana dan prasarana wilayah,serta sistem pertanian di wilayah penelitian..

#### 4.2.1 Karakteristik fisik dasar

##### A. Kecamatan Bantur

Kecamatan Bantur memiliki luas lahan pertanian sebesar 9.011 Ha dan luas lahan non pertanian sebesar 4.225 Ha dan luas wilayah secara keseluruhan sebesar 13.236 Ha. Jenis tanah dikecamatan Bantur yaitu mediteran dan litosol.Kecamatan Bantur memiliki jenis tanaman pertanian berupa padi, jagung, ubi kayu, kacang tanah dan kedelai. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 4.6 Luas Kecamatan Bantur menurut Penggunaan Tanah Tahun 2012 (Ha)**

No	Guna Lahan	Luas Lahan
1	Permukiman	48
2	Sawah	1253
3	Tegal/Kebun	7.700
4	Areal Perkebunan	58
5	Hutan Negara	975
6	Hutan Rakyat	557
7	Tambak Rakyat	-
8	Lainnya	2.645
<b>Jumlah</b>		<b>13.236</b>

Sumber : Kabupaten Dalam Angka Tahun 2013

##### B. Kecamatan Bululawang

Luas wilayah keseluruhan Kecamatan Bululawang adalah sebesar 4.823 Ha. Kecamatan Bululawang memiliki luas lahan pertanian sebesar 3.738 Ha dan lahan non pertanian sebesar 1.085 Ha. Jenis tanah yang terdapat di Kecamatan Bululawang adalah berupa kambisol, aluvial, dan latosol. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 4.7 Luas Kecamatan Bululawang menurut Penggunaan Tanah Tahun 2012 (Ha)**

No	Guna Lahan	Luas Lahan
1	Permukiman	428
2	Sawah	1.960
3	Tegal/Kebun	1.778
4	Areal Perkebunan	-
5	Hutan Negara	-
6	Hutan Rakyat	85
7	Tambak Rakyat	-
8	Lainnya	572
<b>Jumlah</b>		<b>4.823</b>

Sumber : Kabupaten Dalam Angka Tahun 2013

### C. Kecamatan Jabung

Kecamatan Jabung memiliki total luas wilayah 13.609 ha dengan luas lahan pertanian sebesar 6587 Ha dan luas lahan non pertanian sebesar 7922 Ha. Jenis tanah dikecamatan Jabung yaitu andosol, latosol dan litosol. Kecamatan Jabung memiliki jenis tanaman pertanian berupa padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar dan kacang tanah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 4.8 Luas Kecamatan Jabung menurut Penggunaan Tanah Tahun 2012 (Ha)**

No	Guna Lahan	Luas Lahan
1	Permukiman	36
2	Sawah	1.224
3	Tegal/Kebun	3.431
4	Areal Perkebunan	1.032
5	Hutan Negara	-
6	Hutan Rakyat	2.500
7	Tambak Rakyat	-
8	Lainnya	5.386
<b>Jumlah</b>		<b>13.609</b>

Sumber : Kabupaten Dalam Angka Tahun 2013

### D. Kecamatan Karangploso

Kecamatan Jabung memiliki total luas wilayah 5.931 ha dengan luas lahan pertanian sebesar 3335 Ha dan luas lahan non pertanian sebesar 2596 Ha. Jenis tanah dikecamatan Jabung yaitu andosol, latosol dan kambisol. Kecamatan Jabung memiliki jenis tanaman pertanian berupa padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar dan kacang tanah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 4.9 Luas Kecamatan Karangploso menurut Penggunaan Tanah Tahun 2012 (Ha)**

No	Guna Lahan	Luas Lahan
1	Permukiman	884
2	Sawah	1.324
3	Tegal/Kebun	1.970
4	Areal Perkebunan	41
5	Hutan Negara	1.516
6	Hutan Rakyat	-
7	Tambak Rakyat	1
8	Lainnya	195
<b>Jumlah</b>		<b>5.931</b>

Sumber : Kabupaten Dalam Angka Tahun 2013

### E. Kecamatan Sumberpucung

Kecamatan Jabung memiliki total luas wilayah 3.729 ha dengan luas lahan pertanian sebesar 2340 Ha dan luas lahan non pertanian sebesar 1389 Ha. Jenis tanah dikecamatan Jabung yaitu aluvial. Kecamatan Jabung memiliki jenis tanaman pertanian

berupa padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar dan kacang tanah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 4.10 Luas Kecamatan Sumberpucung menurut Penggunaan Tanah Tahun 201(Ha)**

No	Guna Lahan	Luas Lahan
1	Permukiman	92
2	Sawah	1.873
3	Tegal/Kebun	467
4	Areal Perkebunan	-
5	Hutan Negara	175
6	Hutan Rakyat	-
7	Tambak Rakyat	-
8	Lainnya	1.122
Jumlah		3.729

Sumber : Kabupaten Dalam Angka Tahun 2013

#### 4.2.2 Sistem pertanian wilayah penelitian

Sistem pertanian padi di lima kecamatan meliputi empat subsistem meliputi subsistem agribisnis hulu, subsistem agribisnis budidaya/usaha tani, subsistem agribisnis hilir, dan subsistem jasa penunjang. Subsistem agribisnis hulu menyediakan sarana produksi untuk keperluan usaha tani di lima kecamatan. Para petani mendapatkan bibit, pupuk, pestisida, serta alat pertanian melalui KUD maupun kios-kios di sekitar kecamatan.

Terkait subsistem agribisnis budidaya merupakan kegiatan proses usaha tani berlangsung. Para petani menggunakan sarana produksi yang diperoleh dari subsistem sebelumnya untuk mendapatkan hasil pertanian yang maksimal yaitu gabah.

Subsistem agribisnis hilir di lima kecamatan meliputi tengkulak dan *slep*/penggilingan. Tengkulak merupakan distributor dimana membeli hasil gabah dari petani lalu menjual *slep*/penggilingan. Tengkulak di lima kecamatan berasal dari luar kecamatan maupun dari kecamatan itu sendiri.

*Slep*/penggilingan berfungsi sebagai lembaga pemasaran dimana mengolah gabah menjadi beras. Hasil olahan tersebut kemudian didistribusikan ke pedagang besar, pedagang eceran di kecamatan, serta keluar kecamatan.

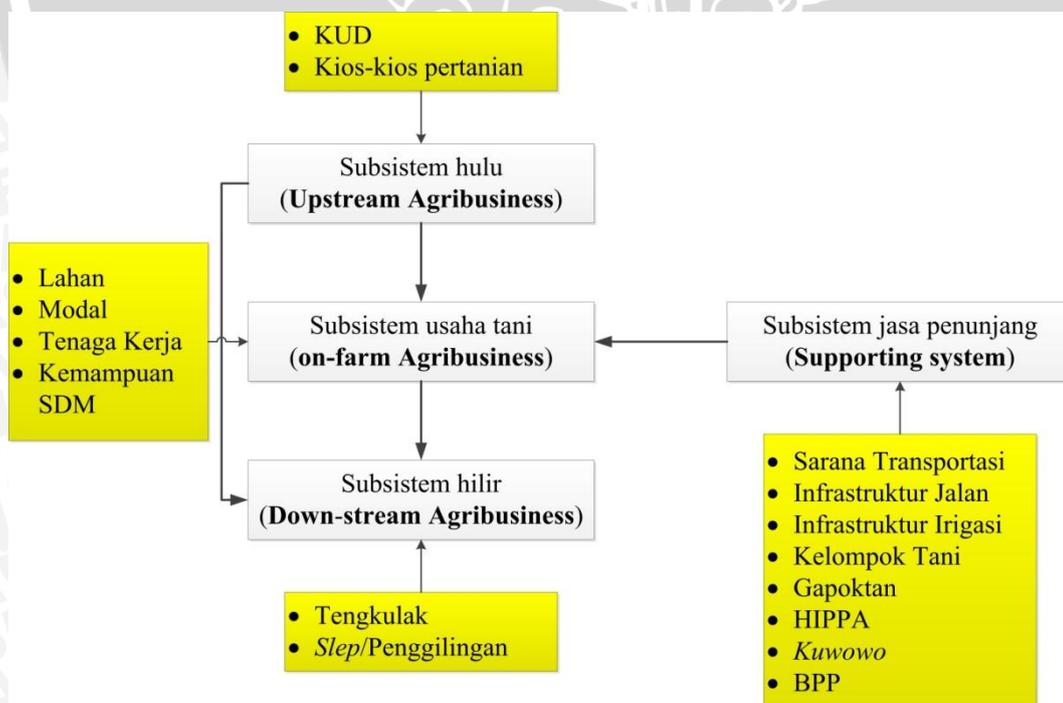
Subsistem jasa penunjang di lima kecamatan meliputi ketersediaan infrastruktur jalan, irigasi, maupun kelembagaan. Peran infrastruktur jalan bertujuan memudahkan aktivitas distribusi produk pertanian di kecamatan tersebut. Kondisi infrastruktur jalan di lima kecamatan tersebut mempengaruhi kelancaran distribusi. Terkait infrastruktur irigasi, peran infrastruktur tersebut untuk menunjang pengairan di areal sawah. Hal tersebut bertujuan meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil produksi,

khususnya peningkatan luas panen. Kondisi dan ketersediaan yang didominasi kerusakan menyebabkan peran infrastruktur irigasi belum optimal.

Peran kelembagaan di lima kecamatan terkait pertanian meliputi permodalan, pemasaran, penyuluhan pertanian. Peran kelembagaan permodalan di lima kecamatan hanya dilakukan oleh gapoktan dengan bantuan dari pemerintah. Peran KUD di lima kecamatan belum sepenuhnya menangani masalah permodalan. Hal tersebut terlihat dimana kerjasama antara petani dengan KUD masih sebatas penyediaan pupuk. Terkait penyuluhan pertanian, kelembagaan yang terdapat di lima kecamatan adalah kelompok tani dan gabungan kelompok tani (Gapoktan).

Kelompok tani dan gapoktan bekerja sama dengan dinas pertanian dan BKP3 terkait penyuluhan terhadap petani. Kemampuan dan keaktifan kelompok tani dan gapoktan berperan penting terhadap kesuksesan program-program penyuluhan pertanian di lima kecamatan. Terdapat kelompok tani dan gapoktan dengan kemampuan terbatas dan kurang aktif.

Kelembagaan lain yang menunjang usaha tani di lima kecamatan adalah *kuwowo*. Lembaga tersebut berperan dalam mengatur pengairan areal sawah di lima kecamatan. *Kuwowo* bekerja sama dengan HIPPA dan juga dinas pertanian dalam menjalankan perannya. HIPPA merupakan lembaga terdiri dari para petani dimana berperan dalam mengatur pengairan dengan turun langsung ke lapangan.



Gambar 4.1 Bagan Sistem Agribisnis di Lima Kecamatan Wilayah Penelitian

#### 4.2.3 Karakteristik harga beras di lima pasar

Kondisi harga beras di 5 pasar utama kecamatan meliputi IR 64 (beras lokal). Harga beras IR.64 tertinggi terdapat di pasar utama Kecamatan Bululawang, sedangkan harga beras terendah terdapat di pasar utama Kecamatan Bantur dan Kecamatan Sumberpucung. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 4.11 Harga Beras 64 di Lima Pasar Utama Kecamatan**

Kecamatan	Harga Beras IR 64
Bantur	Rp. 7.000
Bululawang	Rp. 8.200
Jabung	Rp. 7.500
Karangploso	Rp. 7.300
Sumberpucung	Rp. 7.000

#### 4.2.4 Karakteristik sarana dan prasarana wilayah

##### A. Jalan

Kondisi jalan lingkungan secara umum di Kabupaten Malang mengalami peningkatan pada tahun 2009 – 2012. Panjang jalan yang tergolong kondisi baik pada tahun 2009 mencapai 3.927,15 Km, pada tahun 2010 mencapai 4.116,08 Km, tahun 2011 mencapai 4.158, 56 Km, dan pada tahun 2012 panjang jalan mencapai 4.158, 56 Km.

Kondisi perkerasan jalan lingkungan secara umum di Kecamatan Bantur didominasi jalan aspal sebesar 16,42%, jalan batu sebesar 82,82% , dan jalan tanah sebesar 0,75%. Lebar jalan lingkungan rata-rata di Kecamatan Bantur sebesar 3 m.

Kondisi perkerasan jalan lingkungan secara umum di Kecamatan Bululawang meliputi jalan aspal sebesar 20,74 % , jalan batu sebesar 77,50% , dan jalan tanah sebesar 1,77%. Lebar jalan lingkungan rata-rata di Kecamatan Bululawang sebesar 3,5m.

Kondisi perkerasan jalan lingkungan secara umum di Kecamatan Jabung meliputi jalan aspal sebesar 18,31%, jalan batu sebesar 72,77% , dan jalan tanah sebesar 8,91%. Lebar jalan lingkungan rata-rata di Kecamatan Jabung sebesar 3 m.

Kondisi perkerasan jalan lingkungan secara umum di Kecamatan Karangploso meliputi jalan aspal sebesar 12,37%, jalan batu sebesar 56,73%, dan jalan tanah 30,90%. Lebar jalan lingkungan rata-rata di Kecamatan Karangploso sebesar 3,6 m.

Kondisi perkerasan jalan lingkungan secara umum di Kecamatan Sumberpucung meliputi jalan aspal sebesar 13,03%, jalan batu sebesar 84,04% , dan

jalan tanah sebesar 2,93%. Lebar jalan lingkungan rata-rata di Kecamatan Sumberpucung sebesar 3,4 m. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 4.12 Kondisi Jalan di Lima Kecamatan di Kabupaten Malang**

Kecamatan	Aspal (Km)	Batu (Km)	Tanah (Km)	Jumlah (Km)
Bantur	57,513	290,044	2,637	350,195
Bululawang	31,563	117,963	2,692	152,218
Jabung	32,079	127,482	15,615	175,177
Karangploso	33,850	155,171	84,523	273,544
Sumberpucung	18,885	121,847	4,246	144,979

Sumber : Bakosurtanal Kabupaten Malang 2010

## B. Irigasi

### 1. Kecamatan Bantur

Lahan sawah yang ada di Kecamatan Bantur merupakan sawah irigasi teknis sebesar 246 Ha, sawah irigasi non teknis sebesar 668 Ha, 339 Ha sawah tadah hujan. Hasil produksi tanaman padi di Kecamatan Bantur sebesar 103,60 kw/ha. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 4.13 Luas Lahan Pertanian Berdasarkan Irigasi Kecamatan Bantur**

Teknis	Luas Lahan Pertanian (Ha)				Luas Panen (Ha)	Hasil/Hektar (Kw)
	Semi Teknis	Sederhana/ <i>Plain Irrigation</i>	Desa/Non PU/ <i>Village Irrigation</i>	Tadah Hujan		
178	68	456	212	339	2.872	100,12

Sumber : Kabupaten Dalam Angka Tahun 2013

Kondisi irigasi teknis di kecamatan tersebut tergolong 100% baik, sedangkan untuk irigasi semi-teknis, sederhana, dan desa/non PU tergolong 100% rusak ringan. Secara umum kondisi infrastruktur irigasi di Kecamatan Bantur didominasi kondisi baik dan kerusakan ringan.

**Tabel 4.14 Kondisi Irigasi Kecamatan Bantur**

No	Jenis Irigasi	Kondisi Irigasi (m)			Berat
		Baik	Ringan	Sedang	
1	Teknis	5.340	-	-	-
2	Semi Teknis	-	2.040	-	-
3	Sederhana	-	13.680	-	-
4	Desa/Non PU	-	6.360	-	-

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Malang 2013

### 2. Kecamatan Bululawang

Lahan sawah yang ada di Kecamatan Bululawang sebagian besar merupakan sawah irigasi teknis sebesar 1.960 Ha. Hasil produksi tanaman padi di Kecamatan Bantur sebesar 86,73 kw/ha. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 4.15 Luas Lahan Pertanian Berdasarkan Irigasi Kecamatan Bululawang**

Teknis	Luas Lahan Pertanian (Ha)				Luas Panen (Ha)	Hasil/Hektar (Kw)
	Semi Teknis	Sederhana/ <i>Plain Irrigation</i>	Desa/Non PU/ <i>Village</i>	Tadah Hujan		

<i>Irrigation</i>						
1.531	429	-	-	-	1.267	86,69

Sumber : Kabupaten Dalam Angka Tahun 2013

Infrastruktur irigasi di Kecamatan Bululawang terdiri dari irigasi teknis dan semi-teknis. Kondisi irigasi teknis di kecamatan tersebut didominasi kondisi rusak berat sebesar 47% dan semi teknis sebesar 75%. Secara umum kondisi infrastruktur irigasi di Kecamatan Bululawang didominasi kerusakan.

**Tabel 4.16 Kondisi Irigasi Kecamatan Bululawang**

No	Jenis Irigasi	Kondisi Irigasi (m)			
		Baik	Ringan	Sedang	Berat
1	Teknis	-	14.340	9.360	21.960
2	Semi Teknis	-	-	3.210	9.660
3	Sederhana	-	-	-	-
4	Desa/Non PU	-	-	-	-

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Malang 2013

### 3. Kecamatan Jabung

Lahan sawah yang ada di Kecamatan Jabung merupakan sawah irigasi teknis sebesar 1.348 Ha, sawah irigasi non teknis sebesar 11 Ha, dan 45 Ha sawah tadah hujan. Hasil produksi tanaman padi di Kecamatan Bantur sebesar 58,47 kw/ha. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 4.17 Luas Lahan Pertanian Berdasarkan Irigasi Kecamatan Jabung**

Luas Lahan Pertanian (Ha)						
Teknis	Semi Teknis	Sederhana/ <i>Plain Irrigation</i>	Desa/Non PU/ <i>Village Irrigation</i>	Tadah Hujan	Luas Panen (Ha)	Hasil/Hektar (Kw)
1.209	139	-	11	45	2.461	56,7

Sumber : Kabupaten Dalam Angka Tahun 2013

Kondisi irigasi teknis di Kecamatan Jabung tergolong 70% rusak ringan, sedangkan untuk irigasi semi-teknis tergolong 79% rusak sedang, dan desa/non PU tergolong 100% rusak ringan. Secara umum kondisi infrastruktur irigasi di Kecamatan Jabung didominasi kerusakan.

**Tabel 4.18 Kondisi Irigasi Kecamatan Jabung**

No	Jenis Irigasi	Kondisi Irigasi (m)			
		Baik	Ringan	Sedang	Berat
1	Teknis	2.220	24.000	2.820	1.830
2	Semi Teknis	-	300	3.330	540
3	Sederhana	-	-	-	-
4	Desa/Non PU	-	330	-	-

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Malang 2013

### 4. Kecamatan Karangploso

Lahan sawah yang ada di Kecamatan Sumberpucung merupakan sawah irigasi teknis sebesar 1.146 Ha, sawah irigasi non teknis sebesar 182 Ha. Hasil produksi tanaman padi di Kecamatan Bantur sebesar 67,62 kw/ha. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 4.19 Luas Lahan Pertanian Berdasarkan Irigasi Kecamatan Karangploso**

Teknis	Luas Lahan Pertanian (Ha)				Luas Panen (Ha)	Hasil/Hektar (Kw)
	Semi Teknis	Sederhana/ <i>Plain Irrigation</i>	Desa/Non PU/ <i>Village Irrigation</i>	Tadah Hujan		
988	154	182	-	-	2.887	67,71

Sumber : Kabupaten Dalam Angka Tahun 2013

Kondisi irigasi teknis di Kecamatan Karangploso tergolong 80% baik, sedangkan untuk irigasi semi-teknis tergolong 72% rusak sedang, dan sederhana tergolong 100% rusak ringan. Secara umum kondisi infrastruktur irigasi di Kecamatan Karangploso didominasi kondisi baik dan kerusakan ringan.

**Tabel 4.20 Kondisi Irigasi Kecamatan Karangploso**

No	Jenis Irigasi	Kondisi Irigasi (m)			Berat
		Baik	Ringan	Sedang	
1	Teknis	23.790	690	5.280	-
2	Semi Teknis	3.360	1.260	-	-
3	Sederhana	-	5.460	-	-
4	Desa/Non PU	-	-	-	-

Sumber : Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Malang 2013

#### 5. Kecamatan Sumberpucung

Lahan sawah yang ada di Kecamatan Sumberpucung merupakan sawah irigasi teknis sebesar 1.837 Ha. Hasil produksi tanaman padi di Kecamatan Bantur sebesar 65,48 kw/ha. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 4.21 Luas Lahan Pertanian Berdasarkan Irigasi Kecamatan Sumberpucung**

Teknis	Luas Lahan Pertanian (Ha)				Luas Panen (Ha)	Hasil/Hektar (Kw)
	Semi Teknis	Sederhana/ <i>Plain Irrigation</i>	Desa/Non PU/ <i>Village Irrigation</i>	Tadah Hujan		
1.837	-	-	-	-	2.377	65,48

Sumber : Kabupaten Dalam Angka Tahun 2013

Kondisi irigasi teknis di Kecamatan Sumberpucung 16% kondisi baik, 17% rusak ringan, tergolong 56% rusak sedang, dan 11% rusak berat. Secara umum kondisi infrastruktur irigasi di Kecamatan Sumberpucung didominasi kerusakan sedang.

**Tabel 4.22 Kondisi Irigasi Kecamatan Sumberpucung**

No	Jenis Irigasi	Kondisi Irigasi (m)			Berat
		Baik	Ringan	Sedang	
1	Teknis	8.940	9.390	31.590	6.180
2	Semi Teknis	-	-	-	-
3	Sederhana	-	-	-	-
4	Desa/Non PU	-	-	-	-

Sumber : Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Malang 2013

#### C. Kelembagaan

Kelembagaan yang berperan dalam menunjang aktivitas pertanian di 5 Kecamatan yaitu Kecamatan Bantur, Kecamatan Bululawang, Kecamatan Jabung,

Kecamatan Karangploso, dan Kecamatan Sumberpucung adalah kelompok tani, Gapoktan, KUD, tengkulak, *slep*/penggilingan, HIPPA.

### 1. Kelompok Tani

Kelompok tani adalah kelembagaan non-formal yang berperan secara signifikan dalam menunjang aktivitas pertanian terkait proses budidaya tanaman. Lembaga tersebut merupakan gabungan para petani yang tersebar di setiap desa kelompok tani bergerak dalam informasi terkait harga pembelian dan penjualan gabah serta sebagai wahana penyuluhan usaha tani. Kemampuan kelompok tani berpengaruh penting dalam meningkatkan usaha tani khususnya produktivitas padi. Setiap kecamatan terdiri dari jumlah kelompok tani dengan tingkat kemampuan yang berbeda. Tingkat kemampuan kelompok tani terendah adalah kelompok tani pemula, sedangkan tingkat kemampuan tertinggi adalah kelompok tani madya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 4.23 Kondisi Lembaga Kelompok Tani di Lima Kecamatan**

Kecamatan	Kelompok Tani Pemula	Kelompok Tani Lanjut	Kelompok Tani Madya	Jumlah
Bantul	34	18		52
Bululawang	17	15		32
Jabung	25	6		31
Karangploso	22	12		34
Sumberpucung	10	9	2	21

Sumber : Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian 2013

### 2. GAPOKTAN (Gabungan Kelompok Tani)

Gapoktan adalah kelembagaan non-formal gabungan dari beberapa kelompok tani yang berperan secara signifikan dalam menunjang sarana produksi dan aktivitas pasca panen. Gapoktan bergerak dalam informasi terkait penyediaan pupuk, obat-obatan tanaman, harga pembelian dan penjualan gabah serta sebagai wahana penyuluhan usaha tani. Jumlah gapoktan yang telah terbentuk secara resmi hingga tahun 2010 tertinggi terdapat di Kecamatan Bululawang, sedangkan jumlah gapoktan terendah terdapat di Kecamatan Jabung.

**Tabel 4.24 Jumlah Gapoktan Komoditas Unggulan Padi di Lima Kecamatan**

Kecamatan	Jumlah Gapoktan
Bantul	9
Bululawang	12
Jabung	3
Karangploso	10
Sumberpucung	8

Sumber : Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian 2013

### 3. HIPPA (Himpunan Petani Penguna Air)

HIPPA merupakan lembaga non-formal yang berada dalam pengawasan Kuwowo. HIPPA terhimpun dari para sukarelawan petani yang berperan dalam mengatur dan mengontrol sistem pengairan di masing-masing kepemilikan baku sawah. Pengaturan dan pengontrolan oleh HIPPA meliputi kebutuhan dan permasalahan pengairan yang terjadi, selanjutnya hasil dari pengaturan dan pengontrolan pengairan dilaporkan pada pihak Kuwowo. Jumlah ketersediaan kelembagaan HIPPA tertinggi terdapat di Kecamatan Bululawang, sedangkan ketersediaan kelembagaan HIPPA terendah terdapat di Kecamatan Sumberpucung.

**Tabel 4.25 Jumlah HIPPA di Lima Kecamatan**

Kecamatan	Jumlah HIPPA
Bantur	11
Bululawang	14
Jabung	12
Karangploso	9
Sumberpucung	6

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Malang 2013

### 4. KUD (Koperasi Unit Desa)

Lembaga KUD merupakan lembaga yang berperan dalam usaha simpan pinjam, penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian, dan sebagai sarana pemasaran hasil usaha tani. Setiap kecamatan yaitu Kecamatan Bantur, Kecamatan Bululawang, Kecamatan Jabung, Kecamatan Sumberpucung, dan Kecamatan Karangploso memiliki satu KUD dimana skala pelayanan lembaga tersebut tingkat kecamatan. Salah satu permasalahan yang terdapat di KUD adalah permasalahan kurangnya dana dalam hal permodalan dan penjualan.

### 5. Tengkulak

Tengkulak merupakan lembaga non-formal yang berperan dalam hal pemasaran hasil usaha tani di Kecamatan Bantur, Kecamatan Bululawang, Kecamatan Jabung, Kecamatan Sumberpucung, dan Kecamatan Karangploso. Lembaga tersebut dikelola oleh perorangan atau kelompok. Peran lembaga pemasaran sangat dirasakan para petani dalam hal memasarkan hasil usaha taninya. Permasalahan yang sering terjadi antara lembaga pemasaran dengan para petani di 5 Kecamatan yaitu adanya monopoli harga gabah yang cenderung merugikan pihak petani.

### 6. *Slep*/penggilingan

*Slep*/penggilingan merupakan lembaga non-formal yang dikelola oleh perorangan maupun kelompok. *Slep*/penggilingan bergerak dalam jasa penggilingan

gabah hingga menjadi produk akhir yaitu beras dan menjadi distributor selanjutnya dalam alur distribusi beras.

#### 4.3 Analisis Triangulasi

Analisis triangulasi yang akan digunakan dalam penelitian adalah analisis triangulasi metode dan sumber, dimana analisis tersebut berfungsi menguji keabsahan data dari hasil beberapa hasil penemuan. Pada penelitian hasil beberapa penemuan akan diajarkan untuk mengetahui analisis triangulasi dari hasil pengumpulan data, sehingga dapat diketahui keabsahan dan kesimpulan dari data yang diperoleh. Input analisis triangulasi metode meliputi hasil penemuan dari wawancara terhadap *key informant* terkait usaha tani dan observasi lapangan. Untuk input analisis triangulasi sumber meliputi beberapa hasil penemuan dari sumber yang berbeda, yaitu beberapa *key informant* (Lihat: Sub bab 3.4.3, hal 38-39) terkait usaha tani dan data-data resmi dari beberapa instansi pemerintahan (Lihat: Sub bab 3.4.2 hal 38). Matriks analisis triangulasi dapat dilihat pada **lampiran 1**. Output dari analisis triangulasi dijadikan input dalam analisis selanjutnya yaitu analisis situasi dan analisis hubungan kelembagaan.

#### 4.4 Analisis Situasi

Pada bahasan sebelumnya dijelaskan bahwa input dalam analisis situasi berasal dari output analisis triangulasi (Lihat: Sub bab 4.3, hal 57). Output pada analisis situasi akan dijadikan sebagai input dalam analisis selanjutnya yaitu analisis tulang ikan.

##### 4.4.1 Analisis kondisi harga beras dan komponen pembentuk harga beras

Berdasarkan analisis kondisi harga beras dan komponen harga diketahui bahwa perbedaan biaya input terbesar meliputi biaya penggunaan pupuk dan upah tenaga kerja. Penggunaan pupuk dipengaruhi oleh kemampuan petani dalam melakukan usaha tani, sedangkan upah tenaga kerja dipengaruhi oleh ketersediaan tenaga kerja buruh tani di setiap kecamatan. Lokasi kecamatan dimana berdekatan dengan pusat kota atau kabupaten mempengaruhi sulitnya ketersediaan tenaga kerja buruh tani.

Perbedaan biaya output gabah pada petani dipengaruhi oleh kualitas dan kuantitas yang dihasilkan. Selain itu, biaya output gabah pada petani dipengaruhi biaya transportasi dalam proses distribusi ke distributor selanjutnya. Menurut Prastowo, N.J, Yanuarti, T, dan Depari, Y (2008) salah satu biaya penambahan nilai pada komponen

pembentuk harga beras adalah biaya transportasi. Biaya transportasi menuju areal sawah merupakan salah satu faktor penentuan harga beli gabah pada petani oleh pihak distributor. Pada biaya output antar distributor, perbedaan biaya output di setiap kecamatan dipengaruhi besarnya masing-masing margin keuntungan tiap distributor. Selain itu, perbedaan biaya output di setiap distributor dipengaruhi oleh stok produksi gabah di setiap kecamatan. Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian Malian dkk (2004) dimana total produksi beras berpengaruh langsung terhadap perubahan harga beras domestik. Besarnya ketersediaan gabah di setiap kecamatan mempengaruhi besar harga beras masing-masing kecamatan.

#### A. Kecamatan Bantul

Biaya total produksi rata-rata usaha tani padi per hektar dalam satu musim panen di Kecamatan Bantul sebesar Rp.3.306.900 dengan rincian sebagai berikut :

1. Kebutuhan benih = Rp.120.000
2. Pupuk = Rp.1.880.000
3. Pestisida = Rp.140.000
4. Biaya operasional mencangkul = Rp.222.800
5. Biaya operasional bajak = Rp.700.000
6. Biaya operasional menyangi = Rp.95.000
7. Biaya operasional menanam = Rp.120.000
8. Biaya operasional penyemprotan = Rp.171.000
9. Pengairan = Rp.12.900

Biaya produksi dipengaruhi oleh besaran barang usaha tani yang digunakan (benih,pupuk,pestisida), upah pekerja, jumlah buruh tani, dan kondisi pengairan. Petani di Kecamatan Bantul menggunakan rata-rata 15 kwintal benih dan 10 kwintal pupuk untuk satu hektar sawah. Untuk upah buruh tani laki-laki rata-rata di Kecamatan Bantul sebesar Rp.19.000, sedangkan buruh tani perempuan rata-rata sebesar Rp.10.000. Jumlah tani tergantung kebutuhan pengerjaan pengolahan sawah seperti mencangkul 12 orang laki-laki, menyangi lima orang laki-laki, menanam 12 orang perempuan, penyemprotan tiga orang laki-laki. Permasalahan terkait tenaga kerja di Kecamatan Bantul adalah sulitnya mencari tenaga kerja untuk usaha pertanian. Hal tersebut dikarenakan penduduk usia dewasa di Kecamatan Bantul lebih memilih untuk bekerja di sektor lain.

Untuk keperluan membajak dilakukan menggunakan hewan sapi atau dengan alat traktor. Biaya penyewaan sapi sebesar Rp.75.000/hari dengan waktu pengerjaan

membajak selama tiga hingga empat hari. Biaya penyewaan traktor sebesar Rp.350.000/hari dengan waktu pengerjaan membajak selama satu hari. Biaya pengairan di Kecamatan Bantur dilakukan dengan pembayaran menggunakan gabah. Untuk biaya pengairan satu hektar sawah sebesar tiga kilogram gabah. Besaran harga biaya pengairan dipengaruhi oleh kondisi pengairan di kecamatan tersebut. Kondisi pengairan di Kecamatan Bantur tidak terlalu mengalami permasalahan, sehingga biaya pengairan tergolong kecil dibandingkan kecamatan lainnya. Permasalahan pengairan yang sering dihadapi di Kecamatan Bantur adalah faktor musim kemarau dimana stok pengairan berkurang.

Selain biaya modal dan operasional, biaya lain yang mempengaruhi biaya produksi adalah biaya transportasi. Para petani menggunakan kendaraan roda dua menuju lokasi sawah dalam mengangkut barang-barang usaha tani seperti pupuk dan petstisida. Dikarenakan luas sawah yang cukup besar di sebagian lokasi, akses jalan yang kecil dan belum mengalami perkerasan menjadi kendala bagi petani untuk menuju titik-titik di dalam areal sawah khususnya sawah dengan luas areal besar. Hal ini menimbulkan kesulitan bagi petani untuk melakukan pemupukan, pengobatan tanaman, dan pengangkutan hasil panen di semua titik lokasi di sawah. Keterbatasan lahan dalam pengembangan jalan menyebabkan sulitnya untuk kendaraan roda empat dan roda dua. Hal tersebut menyebabkan para petani menggunakan jasa buruh angkut dengan upah Rp.3.100/50Kg. Kesulitan tersebut berdampak jumlah perjalanan dan pengangkutan dalam setiap aktivitas distribusi.

Biaya output atau harga jual gabah di Kecamatan Bantur sebesar Rp.4.200-4.400/Kg. Dalam satu musim panen di Kecamatan Bantur rata-rata menghasilkan gabah sebesar 100 Kw/Ha, dimana dalam setahun dapat melakukan tiga kali panen. Salah satu faktor yang mempengaruhi harga jual gabah selain kualitas dan kuantitas adalah biaya transportasi. Biaya transportasi di Kecamatan Bantur sebesar Rp.20.000/Ton untuk kendaraan roda empat, sedangkan untuk kendaraan roda dua sebesar Rp.5.000/Kw.

Para tengkulak atau distributor mengurangi harga beli gabah pada petani. Hal tersebut dikarenakan akses menuju sawah dimana kondisi infrastruktur jalan didominasi perkerasan makadam, sehingga mempengaruhi biaya transportasi yang dibutuhkan. Perjalanan menuju pusat di lokasi sawah dari pusat kecamatan dapat ditempuh dengan rata-rata lama perjalanan 28.4 menit dengan jarak rata-rata  $\pm 4.94$  Km. Selain akses menuju lokasi sawah, akses menuju titik-titik di dalam areal sawah yang sulit dijangkau menambah biaya transportasi. Hal tersebut dikarenakan sulitnya kendaraan roda empat

dan roda dua untuk masuk ke dalam areal sawah, sehingga pihak distributor menggunakan jasa buruh angkut.

Proses distribusi gabah hingga menjadi beras di Kecamatan Bantur melalui beberapa distributor antara lain petani, tengkulak, *slep*/penggilingan, pedagang besar, hingga menuju pasar dan toko pengecer di Kecamatan Bantur. Pihak tengkulak tidak mengalami permasalahan terkait proses distribusi menuju distributor selanjutnya yaitu *slep*/penggilingan. Hal tersebut dikarenakan adanya dukungan kondisi perkerasan infrastruktur jalan yaitu aspal dalam akses distribusi. Permasalahan terjadi saat melakukan proses distribusi dengan distribusi sebelumnya yaitu petani. Sulitnya akses menuju lokasi sawah maupun titik-titik di dalam areal sawah berdampak pada penambahan biaya transportasi. Hal tersebut berdampak pada harga penjualan gabah pada distributor selanjutnya yaitu *slep*/penggilingan.

Pihak *slep*/penggilingan tidak mengalami permasalahan terkait proses distribusi, namun adanya permasalahan proses distribusi sebelumnya yaitu petani dan tengkulak berdampak pada harga beli gabah yang mempengaruhi biaya modal. Biaya yang diperlukan *slep*/penggilingan dalam memproduksi gabah menjadi beras antara lain:

1. Harga beli gabah = Rp.4.728/Kg
2. Biaya penjemuran = Rp.4.000/Kw
3. Biaya penggilingan = Rp.10.000/Kw
4. Biaya pengemasan = Rp.1.500/25 Kg

Harga jual pada distributor selanjutnya yaitu pedagang besar rata-rata sebesar Rp.5.540/Kg, sedangkan harga jual pada distributor akhir yaitu pasar dan toko pengecer di Kecamatan Bantur rata-rata sebesar Rp.6.208/Kg.

Biaya transportasi pada proses distribusi antara tengkulak, *slep*/penggilingan dan pedagang rata-rata sebesar Rp.20.000/Ton, dimana rata-rata menggunakan kendaraan roda empat. Besaran margin keuntungan yang diperoleh untuk masing-masing distributor antara lain:

1. Tengkulak = Rp.408/Kg
2. *Slep*/penggilingan = Rp.552/Kg
3. Pedagang besar = Rp.648/Kg
4. Pedagang pengecer = Rp.792/Kg

Salah satu faktor yang mempengaruhi harga gabah maupun beras di pihak distributor adalah stok produksi gabah. Saat kondisi stok gabah meningkat harga beras

cenderung turun begitu juga sebaliknya. Faktor musim berpengaruh terhadap stok gabah, dimana berpengaruh terhadap proses pengairan padi maupun penjemuran gabah.

#### B. Kecamatan Bululawang

Biaya total produksi rata-rata usaha tani padi per hektar dalam satu musim panen di Kecamatan Bululawang sebesar Rp.3.571.000 dengan rincian sebagai berikut :

1. Kebutuhan benih = Rp.112.000
2. Pupuk = Rp.1.800.000
3. Petstisida = Rp.140.000
4. Biaya operasional mencangkul = Rp.286.000
5. Biaya operasional bajak = Rp.700.000
6. Biaya operasional menyangi = Rp.132.000
7. Biaya operasional menanam = Rp.221.000
8. Biaya operasional penyemprotan = Rp.198.000
9. Pengairan = Rp.24.000

Biaya produksi dipengaruhi oleh besaran barang usaha tani yang digunakan (benih,pupuk,petstisida), upah pekerja, jumlah buruh tani, dan kondisi pengairan. Petani di Kecamatan Bululawang menggunakan rata-rata 13 kwintal benih dan 24 kwintal pupuk untuk satu hektar sawah. Untuk upah buruh tani laki-laki rata-rata di Kecamatan Bululawang sebesar Rp.22.000, sedangkan buruh tani perempuan rata-rata sebesar Rp.17.000. Jumlah tani tergantung kebutuhan pengerjaan pengolahan sawah seperti mencangkul 13 orang laki-laki, menyangi enam orang laki-laki, menanam 13 orang perempuan, penyemprotan tiga orang laki-laki. Permasalahan terkait tenaga kerja di Kecamatan Bululawang adalah sulitnya mencari tenaga kerja untuk usaha pertanian. Hal tersebut dikarenakan penduduk usia dewasa di Kecamatan Bululawang lebih memilih untuk bekerja di sektor lain di daerah perkotaan. Hal tersebut berdampak pada peningkatan upah buruh tani karena sulitnya mencari tenaga kerja.

Untuk keperluan membajak dilakukan menggunakan hewan sapi atau dengan alat traktor. Biaya penyewaan sapi sebesar Rp.75.000/hari dengan waktu pengerjaan membajak selama tiga hingga empat hari. Biaya penyewaan traktor sebesar Rp.350.000/hari dengan waktu pengerjaan membajak selama satu hari. Biaya pengairan di Kecamatan Bululawang dilakukan dengan pembayaran menggunakan gabah. Untuk biaya pengairan satu hektar sawah sebesar enam kilogram gabah. Besaran harga biaya pengairan dipengaruhi oleh kondisi pengairan di kecamatan tersebut. Kondisi pengairan di Kecamatan Bululawang mengalami permasalahan terkait kondisi infrastruktur irigasi

dimana didominasi kerusakan berat. Hal tersebut berdampak pada biaya pengairan yang tergolong besar dibandingkan kecamatan lainnya. Selain permasalahan kondisi infrastruktur irigasi, permasalahan pengairan yang sering dihadapi di Kecamatan Bululawang adalah faktor musim kemarau dimana stok pengairan berkurang.

Selain biaya modal dan operasional, biaya lain yang mempengaruhi biaya produksi adalah biaya transportasi. Para petani menggunakan kendaraan roda dua menuju lokasi sawah dalam mengangkut barang-barang usaha tani seperti pupuk dan petstisida. Luas sawah yang cukup besar di sebagian lokasi, serta jalan yang kecil dan belum mengalami perkerasan menjadi kendala bagi petani untuk menuju titik-titik di dalam areal sawah. Hal ini menimbulkan kesulitan bagi petani untuk melakukan pemupukan, pengobatan tanaman, dan pengangkutan hasil panen di semua titik lokasi di sawah. Keterbatasan lahan dalam pengembangan jalan menyebabkan sulitnya untuk kendaraan roda empat dan roda dua. Hal tersebut menyebabkan para petani menggunakan jasa buruh angkut dengan upah Rp.3.300/50Kg. Kesulitan tersebut berdampak jumlah perjalanan dan pengangkutan dalam setiap aktivitas distribusi.

Biaya output atau harga jual gabah di Kecamatan Bululawang sebesar Rp.3.900-4.100/Kg. Dalam satu musim panen di Kecamatan Bululawang rata-rata menghasilkan gabah sebesar 85 Kw/Ha, dimana dalam setahun hanya dapat melakukan dua kali panen. Salah satu faktor yang mempengaruhi harga jual gabah selain kualitas dan kuantitas adalah biaya transportasi. Biaya transportasi di Kecamatan Bululawang sebesar Rp.25.000/Ton untuk kendaraan roda empat, sedangkan untuk kendaraan roda dua sebesar Rp.6.500/Kw.

Para tengkulak atau distributor mengurangi harga beli gabah pada petani. Hal tersebut dikarenakan akses menuju sawah dimana kondisi infrastruktur jalan didominasi perkerasan makadam, sehingga mempengaruhi biaya transportasi yang dibutuhkan. Perjalanan menuju pusat lokasi sawah dari pusat kecamatan dapat ditempuh dengan rata-rata lama perjalanan 30.5 menit dengan jarak rata-rata  $\pm 4.3$  Km. Selain akses menuju lokasi sawah, akses menuju titik-titik di dalam areal sawah yang sulit dijangkau menambah biaya transportasi. Hal tersebut dikarenakan sulitnya kendaraan roda empat dan roda dua untuk masuk ke dalam areal sawah, sehingga pihak distributor menggunakan jasa buruh angkut.

Proses distribusi gabah hingga menjadi beras di Kecamatan Bululawang melalui beberapa distributor antara lain petani, tengkulak, *slep*/penggilingan, pedagang besar, hingga menuju pasar dan toko pengecer di Kecamatan Bululawang. Pihak

tengkulak tidak mengalami permasalahan terkait proses distribusi menuju distributor selanjutnya yaitu *slep*/penggilingan. Hal tersebut dikarenakan adanya dukungan kondisi perkerasan infrastruktur jalan yaitu aspal dalam akses distribusi. Permasalahan terjadi saat melakukan proses distribusi dengan distribusi sebelumnya yaitu petani. Sulitnya akses menuju lokasi sawah maupun titik-titik di dalam areal sawah berdampak pada penambahan biaya transportasi. Hal tersebut berdampak pada harga penjualan gabah pada distributor selanjutnya yaitu *slep*/penggilingan.

Pihak *slep*/penggilingan tidak mengalami permasalahan terkait proses distribusi, namun adanya permasalahan proses distribusi sebelumnya yaitu petani dan tengkulak berdampak pada harga beli gabah yang mempengaruhi biaya modal. Biaya yang diperlukan *slep*/penggilingan dalam memproduksi gabah menjadi beras antara lain:

1. Harga beli gabah = Rp.4.613/Kg
2. Biaya penjemuran = Rp.4.000/Kw
3. Biaya penggilingan = Rp.10.000/Kw
4. Biaya pengemasan = Rp.1.500/25 Kg

Harga jual pada distributor selanjutnya yaitu pedagang besar rata-rata sebesar Rp.5.735/Kg, sedangkan harga jual pada distributor akhir yaitu pasar dan toko pengecer di Kecamatan Bululawang rata-rata sebesar Rp.6.883/Kg.

Biaya transportasi pada proses distribusi antara tengkulak, *slep*/penggilingan, dan pedagang rata-rata sebesar Rp.20.000/Ton dimana rata-rata menggunakan kendaraan roda empat. Besaran margin keuntungan yang diperoleh untuk masing-masing distributor antara lain:

1. Tengkulak = Rp.593/Kg
2. *Slep*/penggilingan = Rp.862/Kg
3. Pedagang besar = Rp.1.128/Kg
4. Pedagang pengecer = Rp.1.317/Kg

Salah satu faktor yang mempengaruhi harga gabah maupun beras di pihak distributor adalah stok produksi gabah. Saat kondisi stok gabah meningkat harga beras cenderung turun begitu juga sebaliknya. Faktor musim berpengaruh terhadap stok gabah, dimana berpengaruh terhadap proses pengairan padi maupun penjemuran gabah. Stok produksi gabah dimana cenderung kecil dalam setahun, berdampak pada tingginya harga jual beras di Kecamatan Bululawang.

### C. Kecamatan Jabung

Biaya total produksi rata-rata usaha tani padi per hektar dalam satu musim panen di Kecamatan Jabung sebesar Rp.3.615.700 dengan rincian sebagai berikut :

10. Kebutuhan benih	= Rp.128.000
11. Pupuk	= Rp.2.020.000
12. Petstisida	= Rp.140.000
13. Biaya operasional mencangkul	= Rp.240.000
14. Biaya operasional bajak	= Rp.700.000
15. Biaya operasional menyiangi	= Rp.126.000
16. Biaya operasional menanam	= Rp.180.000
17. Biaya operasional penyemprotan	= Rp.195.000
18. Pengairan	= Rp.11.700

Biaya produksi dipengaruhi oleh besaran barang usaha tani yang digunakan (benih,pupuk,petstisida), upah pekerja, jumlah buruh tani, dan kondisi pengairan. Petani di Kecamatan Jabung menggunakan rata-rata 15 kwintal benih dan 11 kwintal pupuk untuk satu hektar sawah. Untuk upah buruh tani laki-laki rata-rata di Kecamatan Jabung sebesar Rp.20.000, sedangkan buruh tani perempuan rata-rata sebesar Rp.15.000. Jumlah tani tergantung kebutuhan pengerjaan pengolahan sawah seperti mencangkul 12 orang laki-laki, menyiangi enam orang laki-laki, menanam 12 orang perempuan, penyemprotan tiga orang laki-laki. Permasalahan terkait tenaga kerja di Kecamatan Jabung adalah sulitnya mencari tenaga kerja untuk usaha pertanian. Hal tersebut dikarenakan penduduk usia dewasa di Kecamatan Bululawang lebih tertarik mencari pekerjaan pada sektor usaha lain.

Untuk keperluan membajak dilakukan menggunakan hewan sapi atau dengan alat traktor. Biaya penyewaan sapi sebesar Rp.75.000/hari dengan waktu pengerjaan membajak selama tiga hingga empat hari. Biaya penyewaan traktor sebesar Rp.350.000/hari dengan waktu pengerjaan membajak selama satu hari. Biaya pengairan di Kecamatan Jabung dilakukan dengan pembayaran menggunakan gabah. Untuk biaya pengairan satu hektar sawah sebesar tiga kilogram gabah. Besaran harga biaya pengairan dipengaruhi oleh kondisi pengairan di kecamatan tersebut. Kondisi pengairan di Kecamatan Jabung tidak terlalu mengalami permasalahan, sehingga biaya pengairan tergolong kecil dibandingkan kecamatan lainnya. Permasalahan pengairan yang sering dihadapi di Kecamatan Jabung adalah faktor musim kemarau dimana stok pengairan berkurang.

Selain biaya modal dan operasional, biaya lain yang mempengaruhi biaya produksi adalah biaya transportasi. Para petani menggunakan kendaraan roda dua menuju lokasi sawah dalam mengangkut barang-barang usaha tani seperti pupuk dan petstisida. Dikarenakan luas sawah yang cukup besar di sebagian lokasi, akses jalan yang kecil dan belum mengalami perkerasan menjadi kendala bagi petani untuk menuju titik-titik di dalam areal sawah khususnya sawah dengan luas areal besar. Hal ini menimbulkan kesulitan bagi petani untuk melakukan pemupukan, pengobatan tanaman, dan pengangkutan hasil panen di semua titik lokasi di sawah. Keterbatasan lahan dalam pengembangan jalan menyebabkan sulitnya untuk kendaraan roda empat dan roda dua. Hal tersebut menyebabkan para petani menggunakan jasa buruh angkut dengan upah Rp.3.300/50Kg. Kesulitan tersebut berdampak jumlah perjalanan dan pengangkutan dalam setiap aktivitas distribusi.

Biaya output atau harga jual gabah di Kecamatan Jabung sebesar Rp.3.800-4.000/Kg. Dalam satu musim panen di Kecamatan Jabung rata-rata menghasilkan gabah sebesar 65 Kw/Ha, dimana dalam setahun dapat melakukan dua kali panen. Salah satu faktor yang mempengaruhi harga jual gabah selain kualitas dan kuantitas adalah biaya transportasi. Biaya transportasi di Kecamatan Jabung sebesar Rp.28.000/Ton untuk kendaraan roda empat, sedangkan untuk kendaraan roda dua sebesar Rp.8.000/Kw.

Para tengkulak atau distributor mengurangi harga beli gabah pada petani. Hal tersebut dikarenakan akses menuju sawah dimana kondisi infrastruktur jalan didominasi perkerasan makadam, sehingga mempengaruhi biaya transportasi yang dibutuhkan. Perjalanan menuju pusat lokasi sawah dari pusat kecamatan dapat ditempuh dengan rata-rata lama perjalanan 33.83 menit untuk jarak  $\pm 3.7$  Km. Selain akses menuju lokasi sawah, akses menuju titik-titik di dalam areal sawah yang sulit dijangkau menambah biaya transportasi. Hal tersebut dikarenakan sulitnya kendaraan roda empat dan roda dua untuk masuk ke dalam areal sawah, sehingga pihak distributor menggunakan jasa buruh angkut.

Proses distribusi gabah hingga menjadi beras di Kecamatan Jabung melalui beberapa distributor antara lain petani, tengkulak, *slep*/penggilingan, pedagang besar, hingga menuju pasar dan toko pengecer di Kecamatan Jabung. Pihak tengkulak tidak mengalami permasalahan terkait proses distribusi menuju distributor selanjutnya yaitu *slep*/penggilingan. Hal tersebut dikarenakan adanya dukungan kondisi perkerasan infrastruktur jalan yaitu aspal dalam akses distribusi. Permasalahan terjadi saat melakukan proses distribusi dengan distribusi sebelumnya yaitu petani. Sulitnya akses

menuju lokasi sawah maupun titik-titik di dalam areal sawah berdampak pada penambahan biaya transportasi. Hal tersebut berdampak pada harga penjualan gabah pada distributor selanjutnya yaitu *slep*/penggilingan.

Pihak *slep*/penggilingan tidak mengalami permasalahan terkait proses distribusi, namun adanya permasalahan proses distribusi sebelumnya yaitu petani dan tengkulak berdampak pada harga beli gabah yang mempengaruhi biaya modal. Biaya yang diperlukan *slep*/penggilingan dalam memproduksi gabah menjadi beras antara lain:

1. Harga beli gabah = Rp.4.441/Kg
2. Biaya penjemuran = Rp.4.000/Kw
3. Biaya penggilingan = Rp.10.000/Kw
4. Biaya pengemasan = Rp.1.500/25 Kg

Harga jual pada distributor selanjutnya yaitu pedagang besar rata-rata sebesar Rp.5.450/Kg, sedangkan harga jual pada distributor akhir yaitu pasar dan toko pengecer di Kecamatan Bululawang rata-rata sebesar Rp.6.371/Kg.

Biaya transportasi pada proses distribusi antara tengkulak, *slep*/penggilingan dan pedagang rata-rata sebesar Rp.20.000/Ton dimana rata-rata menggunakan kendaraan roda empat. Besaran margin keuntungan yang diperoleh untuk masing-masing distributor antara lain:

1. Tengkulak = Rp.521/Kg
2. *Slep*/Penggilingan = Rp.749/Kg
3. Pedagang besar = Rp.901/Kg
4. Pedangan pengecer = Rp.1.129/Kg

Salah satu faktor yang mempengaruhi harga gabah maupun beras di pihak distributor adalah stok produksi gabah. Saat kondisi stok gabah meningkat harga beras cenderung turun begitu juga sebaliknya. Faktor musim berpengaruh terhadap stok gabah, dimana berpengaruh terhadap proses pengairan padi maupun penjemuran gabah.

#### D. Kecamatan Karangploso

Biaya total produksi rata-rata usaha tani padi per hektar dalam satu musim panen di Kecamatan Karangploso sebesar Rp.3.652.400 dengan rincian sebagai berikut :

19. Kebutuhan benih = Rp.120.000
20. Pupuk = Rp.2.000.000
21. Pestisida = Rp.140.000
22. Biaya operasional mencangkul = Rp.273.000

- |                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| 23. Biaya operasional bajak        | = Rp.700.000 |
| 24. Biaya operasional menyiangi    | = Rp.100.000 |
| 25. Biaya operasional menanam      | = Rp.208.000 |
| 26. Biaya operasional penyemprotan | = Rp.201.000 |
| 27. Pengairan                      | = Rp.8.400   |

Biaya produksi dipengaruhi oleh besaran barang usaha tani yang digunakan (benih,pupuk,petstisida), upah pekerja, jumlah buruh tani, dan kondisi pengairan. Petani di Kecamatan Karangploso menggunakan rata-rata 15 kwintal benih dan 25 kwintal pupuk untuk satu hektar sawah. Untuk upah buruh tani laki-laki rata-rata di Kecamatan Karangploso sebesar Rp.21.000, sedangkan buruh tani perempuan rata-rata sebesar Rp.16.000. Jumlah tani tergantung kebutuhan pengerjaan pengolahan sawah seperti mencangkul 13 orang laki-laki, menyiangi enam orang laki-laki, menanam 13 orang perempuan, penyemprotan tiga orang laki-laki. Permasalahan terkait tenaga kerja di Kecamatan Karangploso adalah sulitnya mencari tenaga kerja untuk usaha pertanian. Hal tersebut dikarenakan penduduk usia dewasa di Kecamatan Karangploso lebih memilih untuk bekerja di sektor lain.

Untuk keperluan membajak dilakukan menggunakan hewan sapi atau dengan alat traktor. Biaya penyewaan sapi sebesar Rp.75.000/hari dengan waktu pengerjaan membajak selama tiga hingga empat hari. Biaya penyewaan traktor sebesar Rp.350.000/hari dengan waktu pengerjaan membajak selama satu hari. Biaya pengairan di Kecamatan Karangploso dilakukan dengan pembayaran menggunakan gabah. Untuk biaya pengairan satu hektar sawah sebesar dua kilogram gabah. Besaran harga biaya pengairan dipengaruhi oleh kondisi pengairan di kecamatan tersebut. Kondisi pengairan di Kecamatan Karangploso tidak terlalu mengalami permasalahan, sehingga biaya pengairan tergolong kecil dibandingkan kecamatan lainnya. Permasalahan pengairan yang sering dihadapi di Kecamatan Karangploso adalah faktor musim kemarau dimana stok pengairan berkurang.

Selain biaya modal dan operasional, biaya lain yang mempengaruhi biaya produksi adalah biaya transportasi. Para petani menggunakan kendaraan roda dua menuju lokasi sawah dalam mengangkut barang-barang usaha tani seperti pupuk dan petstisida. Dikarenakan luas sawah yang cukup besar di sebagian lokasi, akses jalan yang kecil dan belum mengalami perkerasan menjadi kendala bagi petani untuk menuju titik-titik di dalam areal sawah khususnya sawah dengan luas areal besar. Hal ini menimbulkan kesulitan bagi petani untuk melakukan pemupukan, pengobatan tanaman,

dan pengangkutan hasil panen di semua titik lokasi di sawah. Keterbatasan lahan dalam pengembangan jalan menyebabkan sulitnya untuk kendaraan roda empat dan roda dua. Hal tersebut menyebabkan para petani menggunakan jasa buruh angkut dengan upah Rp.3.200/50Kg. Kesulitan tersebut berdampak jumlah perjalanan dan pengangkutan dalam setiap aktivitas distribusi.

Biaya output atau harga jual gabah di Kecamatan Karangploso sebesar Rp.4.100-4.300/Kg. Dalam satu musim panen di Kecamatan Karangploso rata-rata menghasilkan gabah sebesar 67 Kw/Ha, dimana dalam setahun dapat melakukan tiga kali panen. Salah satu faktor yang mempengaruhi harga jual gabah selain kualitas dan kuantitas adalah biaya transportasi. Biaya transportasi di Kecamatan Karangploso sebesar Rp.23.000/Ton untuk kendaraan roda empat, sedangkan untuk kendaraan roda dua sebesar Rp.6.500/Kw.

Para tengkulak atau distributor mengurangi harga beli gabah pada petani. Hal tersebut dikarenakan akses menuju sawah dimana kondisi infrastruktur jalan didominasi perkerasan makadam, sehingga mempengaruhi biaya transportasi yang dibutuhkan. Perjalanan menuju pusat lokasi sawah dari pusat kecamatan dapat ditempuh dengan rata-rata lama perjalanan 22.35 menit untuk jarak  $\pm 3.6$  Km. Selain akses menuju lokasi sawah, akses menuju titik-titik di dalam areal sawah yang sulit dijangkau menambah biaya transportasi. Hal tersebut dikarenakan sulitnya kendaraan roda empat dan roda dua untuk masuk ke dalam areal sawah, sehingga pihak distributor menggunakan jasa buruh angkut.

Proses distribusi gabah hingga menjadi beras di Kecamatan Karangploso melalui beberapa distributor antara lain petani, tengkulak, *slep*/penggilingan, pedagang besar, hingga menuju pasar dan toko pengecer di Kecamatan Karangploso. Pihak tengkulak tidak mengalami permasalahan terkait proses distribusi menuju distributor selanjutnya yaitu *slep*/penggilingan. Hal tersebut dikarenakan adanya dukungan kondisi perkerasan infrastruktur jalan yaitu aspal dalam akses distribusi. Permasalahan terjadi saat melakukan proses distribusi dengan distribusi sebelumnya yaitu petani. Sulitnya akses menuju lokasi sawah maupun titik-titik di dalam areal sawah berdampak pada penambahan biaya transportasi. Hal tersebut berdampak pada harga penjualan gabah pada distributor selanjutnya yaitu *slep*/penggilingan.

Pihak *slep*/penggilingan tidak mengalami permasalahan terkait proses distribusi, namun adanya permasalahan proses distribusi sebelumnya yaitu petani dan tengkulak berdampak pada harga beli gabah yang mempengaruhi biaya modal. Biaya

yang diperlukan *slep*/penggilingan dalam memproduksi gabah menjadi beras antara lain:

1. Harga beli gabah = Rp. 4.656/Kg
2. Biaya penjemuran = Rp. 4.000/Kw
3. Biaya penggilingan = Rp. 10.000/Kw
4. Biaya pengemasan = Rp. 1.500/25 Kg

Harga jual pada distributor selanjutnya yaitu pedagang besar rata-rata sebesar Rp.5.550/Kg, sedangkan harga jual pada distributor akhir yaitu pasar dan toko pengecer di Kecamatan Karangploso rata-rata sebesar Rp.6.336/Kg.

Biaya transportasi pada proses distribusi antara tengkulak,*slep*/penggilingan, dan pedagang rata-rata sebesar Rp.20.000/Ton dimana rata-rata menggunakan kendaraan roda empat. Besaran margin keuntungan yang diperoleh untuk masing-masing distributor antara lain:

1. Tengkulak = Rp.436/Kg
2. *Slep*/penggilingan = Rp.634/Kg
3. Pedagang besar = Rp.766/Kg
4. Pedagang kecil = Rp.964/Kg

Salah satu faktor yang mempengaruhi harga gabah maupun beras di pihak distributor adalah stok produksi gabah. Saat kondisi stok gabah meningkat harga beras cenderung turun begitu juga sebaliknya. Faktor musim berpengaruh terhadap stok gabah, dimana berpengaruh terhadap proses pengairan padi maupun penjemuran gabah.

#### E. Kecamatan Sumberpucung

Biaya total produksi rata-rata usaha tani padi per hektar dalam satu musim panen di Kecamatan Sumberpucung sebesar Rp.3.652.000 dengan rincian sebagai berikut :

28. Kebutuhan benih = Rp.120.000
29. Pupuk = Rp.2.020.000
30. Pestisida = Rp.140.000
31. Biaya operasional mencangkul = Rp.200.000
32. Biaya operasional bajak = Rp.700.000
33. Biaya operasional menyiangi = Rp.100.000
34. Biaya operasional menanam = Rp.150.000
35. Biaya operasional penyemprotan = Rp.180.000
36. Pengairan = Rp.20.000

Biaya produksi dipengaruhi oleh besaran barang usaha tani yang digunakan (benih,pupuk,petstisida), upah pekerja, jumlah buruh tani, dan kondisi pengairan. Petani di Kecamatan Sumberpucung menggunakan rata-rata 15 kwintal benih dan 25 kwintal pupuk untuk satu hektar sawah. Untuk upah buruh tani laki-laki rata-rata di Kecamatan Sumberpucung sebesar Rp.20.000, sedangkan buruh tani perempuan rata-rata sebesar Rp.15.000. Jumlah tani tergantung kebutuhan pengerjaan pengolahan sawah seperti mencangkul 10 orang laki-laki, menyiangi lima orang laki-laki, menanam 10 orang perempuan, penyemprotan tiga orang laki-laki. Permasalahan terkait tenaga kerja di Kecamatan Sumberpucung adalah sulitnya mencari tenaga kerja untuk usaha pertanian. Hal tersebut dikarenakan penduduk usia dewasa di Kecamatan Sumberpucung lebih memilih untuk bekerja di sektor lain.

Untuk keperluan membajak dilakukan menggunakan hewan sapi atau dengan alat traktor. Biaya penyewaan sapi sebesar Rp.75.000/hari dengan waktu pengerjaan membajak selama tiga hingga empat hari. Biaya penyewaan traktor sebesar Rp.350.000/hari dengan waktu pengerjaan membajak selama satu hari. Biaya pengairan di Kecamatan Sumberpucung dilakukan dengan pembayaran menggunakan gabah. Untuk biaya pengairan satu hektar sawah sebesar tiga kilogram gabah. Besaran harga biaya pengairan dipengaruhi oleh kondisi pengairan di kecamatan tersebut. Kondisi pengairan di Kecamatan Sumberpucung tidak terlalu mengalami permasalahan, sehingga biaya pengairan tergolong kecil dibandingkan kecamatan lainnya. Permasalahan pengairan yang sering dihadapi di Kecamatan Sumberpucung adalah faktor musim kemarau dimana stok pengairan berkurang.

Selain biaya modal dan operasional, biaya lain yang mempengaruhi biaya produksi adalah biaya transportasi. Para petani menggunakan kendaraan roda dua menuju lokasi sawah dalam mengangkut barang-barang usaha tani seperti pupuk dan petstisida. Dikarenakan luas sawah yang cukup besar di sebagian lokasi, akses jalan yang kecil dan belum mengalami perkerasan menjadi kendala bagi petani untuk menuju titik-titik di dalam areal sawah khususnya sawah dengan luas areal besar. Hal ini menimbulkan kesulitan bagi petani untuk melakukan pemupukan, pengobatan tanaman, dan pengangkutan hasil panen di semua titik lokasi di sawah. Keterbatasan lahan dalam pengembangan jalan menyebabkan sulitnya untuk kendaraan roda empat dan roda dua. Hal tersebut menyebabkan para petani menggunakan jasa buruh angkut dengan upah Rp.3.200/50Kg. Kesulitan tersebut berdampak jumlah perjalanan dan pengangkutan dalam setiap aktivitas distribusi.

Biaya output atau harga jual gabah di Kecamatan Sumberpucung sebesar Rp.4.000-4.200/Kg. Dalam satu musim panen di Kecamatan Sumberpucung rata-rata menghasilkan gabah sebesar 65 Kw/Ha, dimana dalam setahun dapat melakukan dua kali panen. Salah satu faktor yang mempengaruhi harga jual gabah selain kualitas dan kuantitas adalah biaya transportasi. Biaya transportasi di Kecamatan Sumberpucung sebesar Rp.25.000/Ton untuk kendaraan roda empat, sedangkan untuk kendaraan roda dua sebesar Rp.6.500/Kw.

Para tengkulak atau distributor mengurangi harga beli gabah pada petani. Hal tersebut dikarenakan akses menuju sawah dimana kondisi infrastruktur jalan didominasi perkerasan makadam, sehingga mempengaruhi biaya transportasi yang dibutuhkan. Perjalanan menuju pusat lokasi sawah dari pusat kecamatan dapat ditempuh dengan rata-rata lama perjalanan 31 menit untuk jarak  $\pm 4.41$  Km. Selain akses menuju lokasi sawah, akses menuju titik-titik di dalam areal sawah yang sulit dijangkau menambah biaya transportasi. Hal tersebut dikarenakan sulitnya kendaraan roda empat dan roda dua untuk masuk ke dalam areal sawah, sehingga pihak distributor menggunakan jasa buruh angkut.

Proses distribusi gabah hingga menjadi beras di Kecamatan Sumberpucung melalui beberapa distributor antara lain petani, tengkulak, *slep*/penggilingan, pedagang besar, hingga menuju pasar dan toko pengecer di Kecamatan Sumberpucung. Pihak tengkulak tidak mengalami permasalahan terkait proses distribusi menuju distributor selanjutnya yaitu *slep*/penggilingan. Hal tersebut dikarenakan adanya dukungan kondisi perkerasan infrastruktur jalan yaitu aspal dalam akses distribusi. Permasalahan terjadi saat melakukan proses distribusi dengan distribusi sebelumnya yaitu petani. Sulitnya akses menuju lokasi sawah maupun titik-titik di dalam areal sawah berdampak pada penambahan biaya transportasi. Hal tersebut berdampak pada harga penjualan gabah pada distributor selanjutnya yaitu *slep*/penggilingan.

Pihak *slep*/penggilingan tidak mengalami permasalahan terkait proses distribusi, namun adanya permasalahan proses distribusi sebelumnya yaitu petani dan tengkulak berdampak pada harga beli gabah yang mempengaruhi biaya modal. Biaya yang diperlukan *slep*/penggilingan dalam memproduksi gabah menjadi beras antara lain:

1. Harga beli gabah = Rp.4.325/Kg
2. Biaya penjemuran = Rp.4.000/Kw
3. Biaya penggilingan = Rp.10.000/Kw

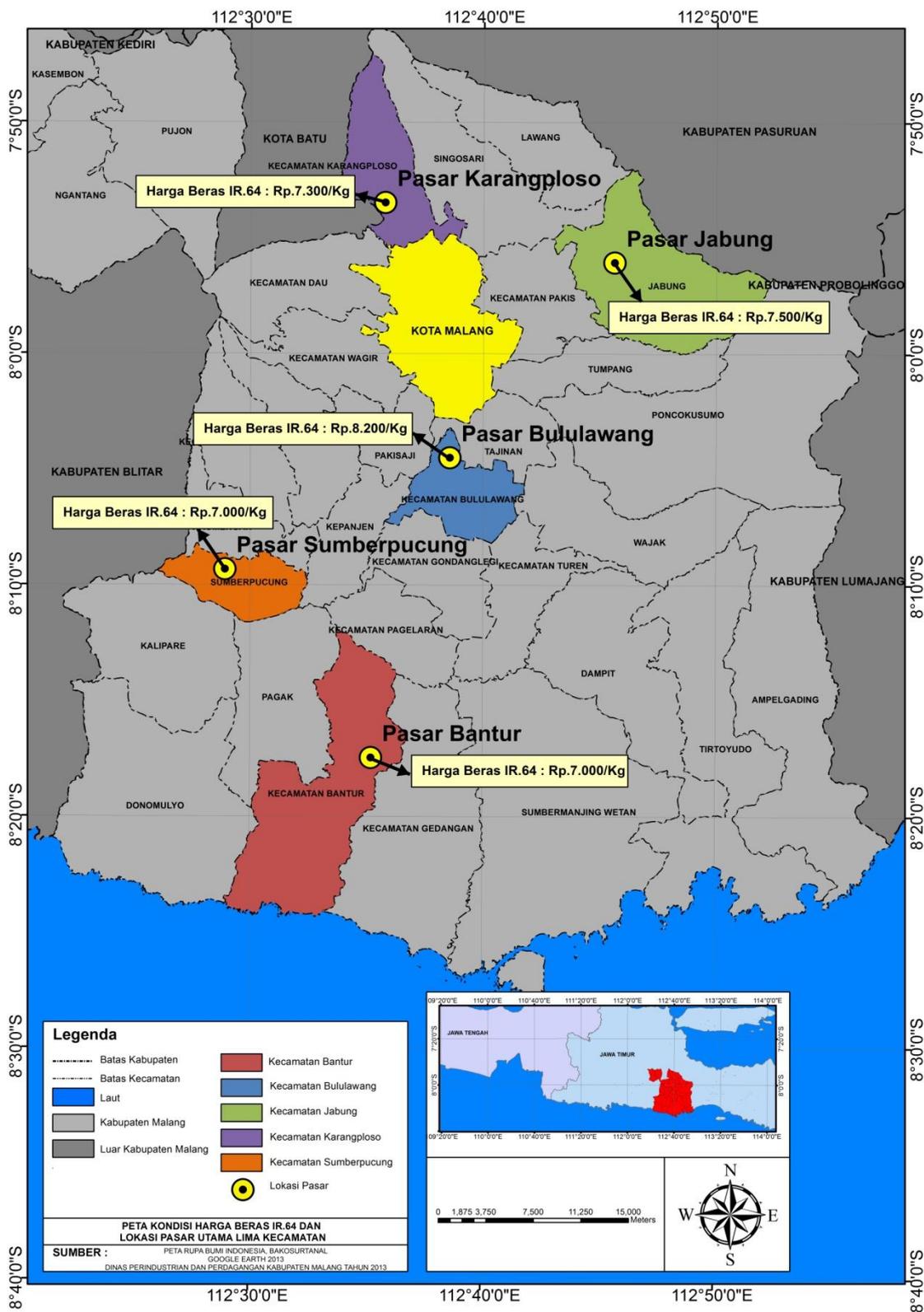
4. Biaya pengemasan = Rp.1.500/25 Kg

Harga beli gabah pada pihak tengkulak rata-rata sebesar Rp.4.325/Kg. Biaya untuk memproses gabah menjadi beras meliputi biaya penjemuran rata-rata sebesar Rp.4.000/Kw, biaya penggilingan rata-rata sebesar Rp.10.000/Kw, dan biaya pengemasan rata-rata sebesar Rp.1.500/25Kg. Harga jual pada distributor selanjutnya yaitu pedagang besar rata-rata sebesar Rp.5.270/Kg, sedangkan harga jual pada distributor akhir yaitu pasar dan toko pengecer di Kecamatan Sumberpucung rata-rata sebesar Rp.6.022/Kg.

Biaya transportasi pada proses distribusi antara pedagang, *slep*/penggilingan, dan pedagang rata-rata sebesar Rp.20.000/Ton dimana rata-rata menggunakan kendaraan roda empat. Besaran margin keuntungan yang diperoleh untuk masing-masing distributor antara lain:

1. Tengkulak = Rp.322/Kg
2. *Slep*/penggilingan = Rp.568/Kg
3. Pedagang besar = Rp.732/Kg
4. Pedagang pengecer = Rp.978/Kg

Margin keuntungan masing-masing distributor rata-rata sebesar Rp.322/Kg untuk tengkulak, Rp.568/Kg untuk *slep*/penggilingan, Rp.732/Kg untuk pedagang besar, dan Rp.978/Kg untuk pedagang di pasar maupun toko pengecer di Kecamatan Sumberpucung. Salah satu faktor yang mempengaruhi harga gabah maupun beras di pihak distributor adalah stok produksi gabah. Saat kondisi stok gabah meningkat harga beras cenderung turun begitu juga sebaliknya. Faktor musim berpengaruh terhadap stok gabah, dimana berpengaruh terhadap proses pengairan padi maupun penjemuran gabah.



Gambar 4.2 Peta Kondisi Harga Beras IR.64 dan Lokasi Pasar Utama Lima Kecamatan

#### 4.4.2 Analisis kondisi infrastruktur jalan dan irigasi

Kondisi infrastruktur jalan di lima kecamatan dalam mendukung proses produksi dan distribusi beras terdiri dari perkerasan aspal, makadam, dan tanah. Perkerasan makadam dan tanah cenderung menghambat proses distribusi bahan input maupun output. Hal tersebut dikarenakan adanya hambatan transportasi meliputi pemilihan moda transportasi, jumlah perjalanan, maupun efisiensi waktu perjalanan. Menurut Prastowo, N.J., Yanuarti, T., dan Depari, Y. (2008) gangguan terhadap sektor transportasi yang berakibat pada meningkatnya biaya dan jangka waktu penyampaian akan berdampak negatif terhadap efisiensi distribusi. Bersarnya peranan perkerasan jalan makadam maupun tanah berbanding lurus dengan peningkatan biaya transportasi. Menurut Agustian dan Hartoyo (2012) semakin meningkatnya infrastruktur jalan, biaya transportasi akan semakin rendah, sehingga harga input usahatani juga rendah. Kondisi tersebut berdampak pada biaya output antara petani dengan tengkulak dan distributor lainnya.

Kondisi infrastruktur irigasi di lima kecamatan berdampak pada luas panen padi di setiap kecamatan. Menurut Kadir Z.A. dan Acmad A (2010) ketersediaan infrastruktur irigasi berpengaruh terhadap peningkatan pola tanam padi. Hal tersebut berdampak pada jumlah rata-rata produksi padi di setiap kecamatan. Infrastruktur irigasi dengan kondisi baik hingga rusak berat berbanding lurus terhadap besar luas panen di setiap kecamatan. Menurut Damayanti L (2013) peningkatan kondisi irigasi secara efisiensi teknis dan secara nyata lebih memberikan hasil yang lebih tinggi dibandingkan dengan produksi padi sawah dengan kondisi irigasi yang rusak. Untuk sistem infrastruktur irigasi di setiap kecamatan tidak berpengaruh nyata terhadap besaran luas panen. Hal tersebut terlihat dimana terdapat kecamatan dengan dominasi sistem infrastruktur irigasi teknis lebih mempunyai luas panen lebih kecil dibandingkan kecamatan dengan dominasi sistem infrastruktur semi teknis. Hal tersebut dipengaruhi oleh kondisi masing-masing infrastruktur irigasi, serta kemampuan para petani dalam menggunakan dan memelihara infrastruktur irigasi tersebut. Menurut Hanjra dkk (2009) dalam penelitiannya dijelaskan infrastruktur irigasi dapat berperan secara efektif jika dikombinasikan dengan sumber daya manusia. Rendahnya sumber daya manusia berdampak pada rendahnya fungsi dari investasi infrastruktur irigasi.

##### A. Kecamatan Bantur

Aksesibilitas infrastruktur jalan menuju Pasar Bantur tergolong lancar. Kondisi ketersediaan jalan yang sudah mengalami perkerasan aspal dalam menuju Pasar

Bantur, mendukung kelancaran kendaraan dalam melaju menuju lokasi pasar. Selain kondisi perkerasan jalan, situasi kepadatan kendaraan pada akses menuju Pasar Bantur jarang mengalami kemacetan. Hal tersebut mendukung aksesibilitas kendaraan untuk menuju lokasi pasar.

Pada proses produksi beras lokal Kecamatan Bantur, sebagian petani mengalami hambatan terkait infrastruktur jalan. Dikarenakan luas sawah yang cukup besar di sebagian lokasi, akses jalan yang kecil dan belum mengalami perkerasan menjadi kendala bagi petani untuk menuju titik-titik di dalam areal sawah khususnya sawah dengan luas areal besar. Hal ini menimbulkan kesulitan bagi petani untuk melakukan pemupukan, pengobatan tanaman, dan pengangkutan hasil panen di semua titik lokasi di sawah. Keterbatasan lahan dalam pengembangan jalan menyebabkan sulitnya untuk kendaraan roda empat. Kesulitan tersebut meliputi jumlah angkut dalam setiap aktivitas distribusi. Hal tersebut menimbulkan biaya tambahan untuk proses tersebut meliputi jumlah perjalanan pengangkutan dan upah buruh angkut sebesar Rp. 3.100/50Kg. Biaya tambahan tersebut berpengaruh terhadap biaya produksi dan biaya distribusi baik petani maupun tengkulak.



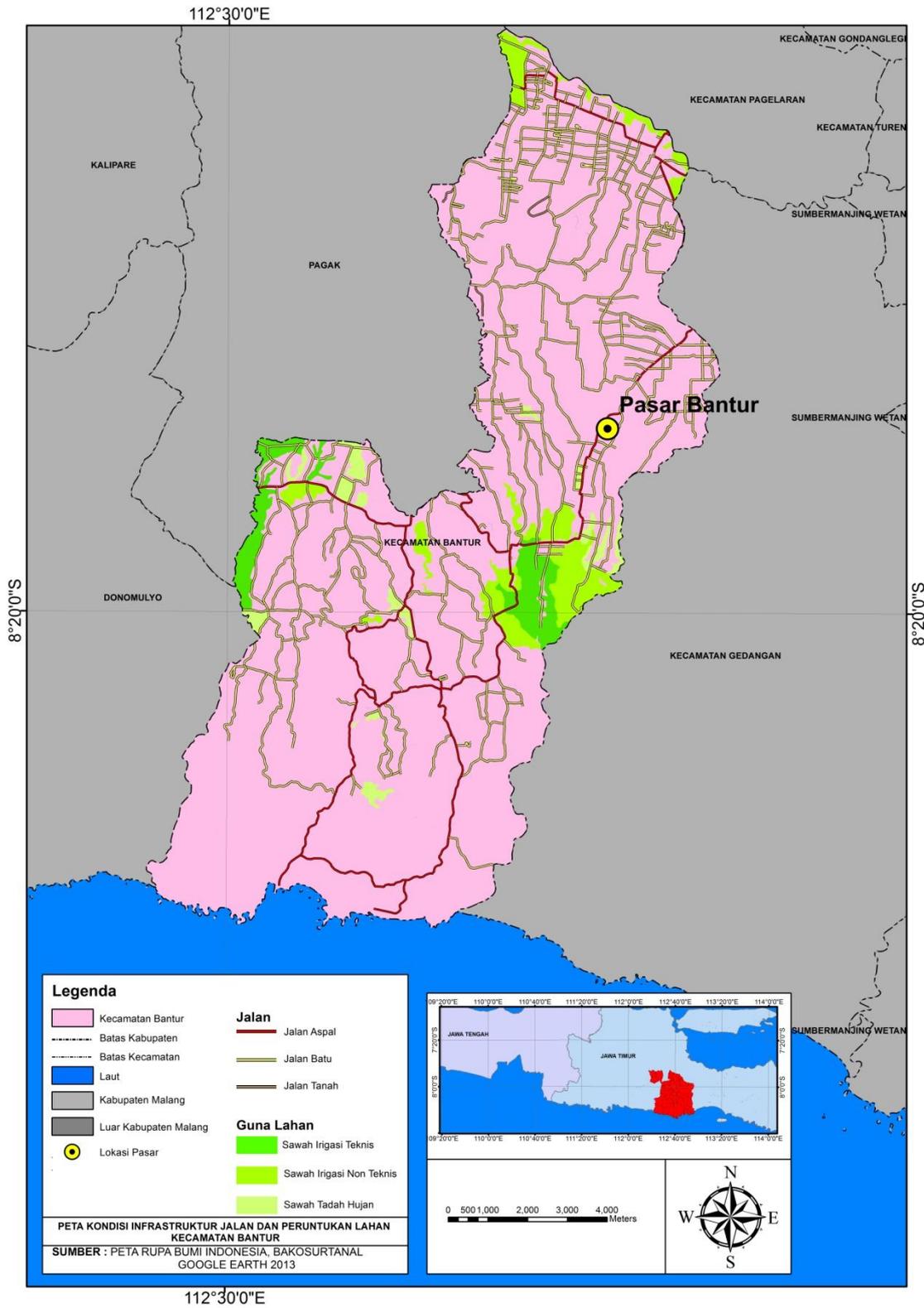
**Gambar 4.3 Kondisi Salah Satu Jalan Tani di Kecamatan Bantur**

Selain akses jalan ke sawah, kondisi perkerasan jalan di Kecamatan Bantur meliputi jalan aspal sebesar 16,42%, jalan batu sebesar 82,82%, dan jalan tanah sebesar 0,75% mempengaruhi biaya transportasi dalam distribusi hasil panen ke tengkulak. Ketersediaan jalan perkerasan aspal dalam menuju titik pusat lokasi sawah sebesar 88,05%, sedangkan untuk pekerasan makadam sebesar 8,9% dan perkerasan tanah sebesar 3,03%. Besarnya ketersediaan jalan aspal di kecamatan tersebut berdampak positif terhadap kemudahan akses distribusi. Kondisi tersebut berpengaruh terhadap jumlah perjalanan distribusi dalam menuju lokasi-lokasi sawah, sehingga menekan

besar biaya transportasi meliputi biaya distribusi baik petani maupun tengkulak. Para distributor dapat menempuh perjalanan menuju pusat di lokasi sawah dari pusat kecamatan dengan rata-rata lama perjalanan 28.4 menit dengan jarak rata-rata  $\pm 4.94$  Km. Terdapatnya permasalahan terkait infrastruktur jalan, meningkatnya biaya transportasi dan besaran harga beli gabah pada petani. Biaya transportasi dalam aktivitas distribusi beras lokal untuk mobil sebesar Rp.20.000/Ton dan motor sebesar Rp.5.000/Kw. Harga beli gabah pada petani di Kecamatan Bantur sebesar Rp.4.100-4.300/Kg. Hal tersebut berpengaruh terhadap pendapatan petani sendiri, harga jual pada distributor selanjutnya hingga harga beras di Pasar Bantur.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA





**Gambar 4.4** Peta Kondisi Infrastruktur Jalan dan Peruntukan Lahan Kecamatan Bantul

Infrastruktur irigasi di Kecamatan Bantul terdiri dari irigasi teknis, semi-teknis, sederhana dan irigasi desa/non PU. Kondisi irigasi teknis di kecamatan tersebut tergolong 100% baik, sedangkan untuk irigasi semi-teknis, sederhana, dan desa/non PU

tergolong 100% rusak ringan. Untuk luas lahan pertanian di Kecamatan Bantur berdasarkan jenis irigasi sebesar 246 Ha sawah irigasi teknis, 668 Ha sawah irigasi non-teknis, dan 338 sawah tandah hujan (*Sumber: Kabupaten Dalam Angka 2013*). Sumber air yang digunakan untuk irigasi di Kecamatan Jabung berasal dari Irigasi Pegunungan Selatan. Peran infrastruktur irigasi terhadap pertanian di Kecamatan Bantur mempunyai pengaruh penting dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi padi yang dihasilkan. Produktivitas padi di Kecamatan Bantur sebesar 100,12 Kw/Ha dengan luas panen sebesar 2.872 Ha.

Petani di Kecamatan Bantur menemukan kendala terkait peranan infrastruktur irigasi dalam menunjang aktivitas pertanian khususnya saat musim kemarau. Permasalahan irigasi pada Kecamatan Bantur meliputi kendala terhadap sumber air. Sulitnya akses terhadap sumber air irigasi menyebabkan sistem pengairan sawah-sawah di kecamatan tersebut tidak optimal dan adanya ketergantungan pada musim hujan. Selain kendala akses sumber air irigasi, kendala terkait sistem irigasi lainnya adalah kondisi sistem irigasi yang masih didominasi oleh sistem irigasi non-teknis.

Kondisi sistem irigasi yang belum optimal tidak berpengaruh terhadap produktivitas padi, hal tersebut dibuktikan dengan produktivitas padi yang cukup tinggi di Kecamatan Bantur. Hal tersebut dikarenakan kondisi infrastruktur irigasi didominasi kerusakan ringan, dimana memperkecil kemungkinan kebocoran pengairan. Selain kondisi infrastruktur irigasi, produktivitas tersebut didukung oleh perilaku petani dalam melakukan pengairan. Perilaku petani dalam mengairi sawah yang bertahap menimbulkan jumlah panen gabah cukup besar.

Selain kondisi pengairan, kualitas tanah di Kecamatan Bantur yang terdiri dari mediteran dan litosol kurang mendukung dalam unsur hara dan penyerapan air. Hal tersebut berdampak pada kualitas gabah maupun hasil akhir yaitu beras. Ketersediaan dan kualitas beras yang dihasilkan berdampak pada harga jual di Pasar Bantur. Harga beras lokal Kecamatan Bantur di pasar tersebut berkisar Rp. 6.900 – Rp. 7.100/Kg.

#### B. Kecamatan Bululawang

Kondisi ketersediaan jalan yang sudah mengalami perkerasan aspal dalam menuju Pasar Bululawang, mendukung kelancaran kendaraan dalam melaju menuju lokasi pasar. Selain kondisi perkerasan jalan, situasi kepadatan kendaraan pada akses menuju Pasar Bululawang jarang mengalami kemacetan. Hal tersebut mendukung aksesibilitas kendaraan untuk menuju lokasi pasar. Dukungan infrastruktur jalan yang

memadai menimbulkan bervariasinya jenis dan harga beras di Pasar Bululawang, hal tersebut dipengaruhi oleh aktivitas distribusi barang.

Pada proses produksi beras lokal sebagian petani mengalami hambatan terkait infrastruktur jalan. Dikarenakan luas sawah yang cukup besar di sebagian lokasi, akses jalan yang kecil dan belum mengalami perkerasan menjadi kendala bagi petani untuk menuju titik-titik di dalam lokasi sawah khususnya sawah dengan luas areal besar. Hal ini menimbulkan kesulitan bagi petani untuk melakukan pemupukan, pengobatan tanaman, dan pengangkutan hasil panen di semua titik lokasi di sawah. Keterbatasan lahan dalam pengembangan jalan menyebabkan sulitnya untuk kendaraan roda empat. Kesulitan tersebut meliputi jumlah angkut dalam setiap aktivitas distribusi. Hal tersebut menimbulkan biaya tambahan untuk proses tersebut meliputi jumlah perjalanan pengangkutan dan upah buruh angkut sebesar Rp. 3.300/50Kg. Biaya tambahan tersebut berpengaruh terhadap biaya produksi dan biaya distribusi baik petani maupun tengkulak. Hal tersebut berpengaruh terhadap harga jual pada distributor selanjutnya, maupun pendapatan petani sendiri.

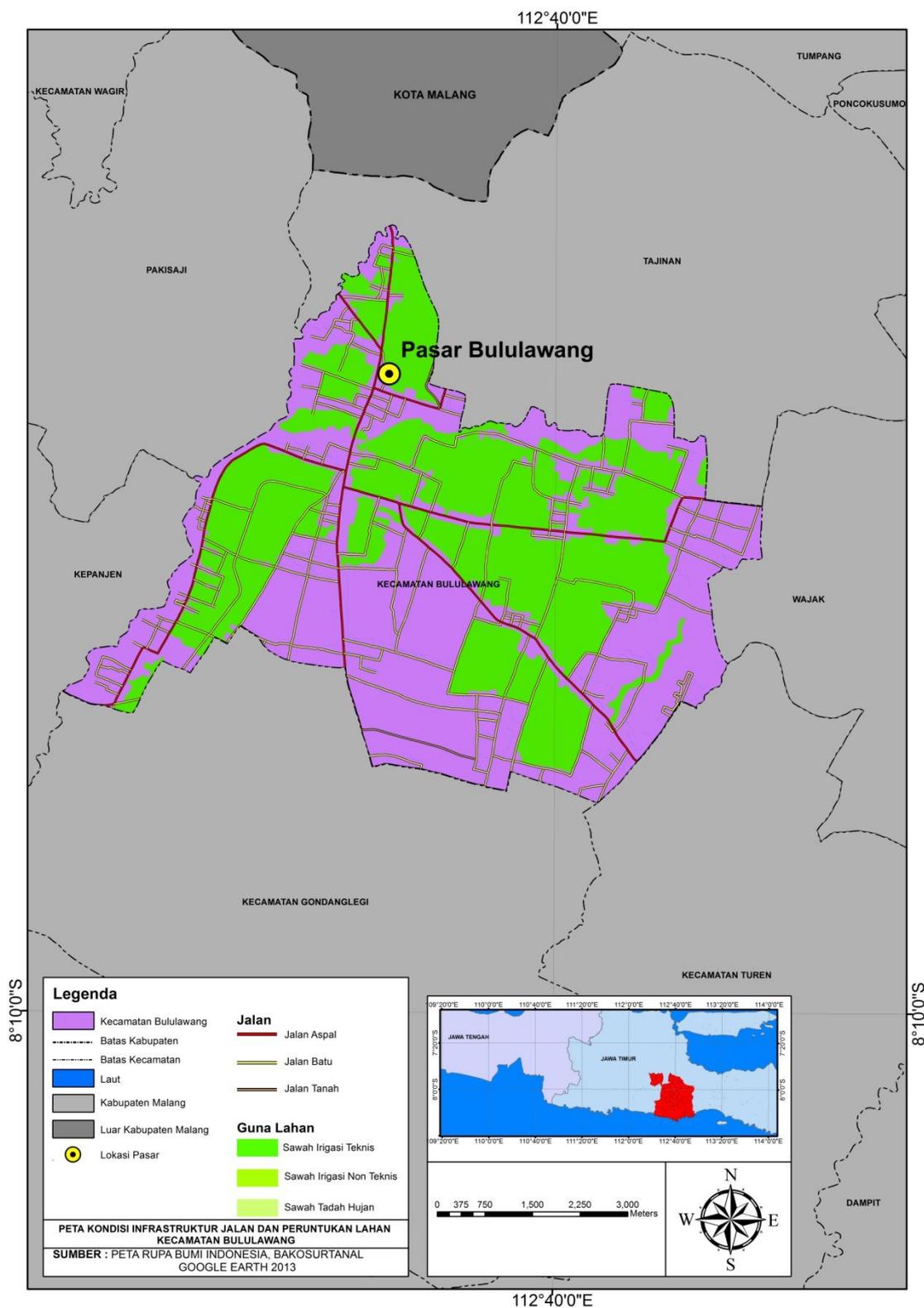


**Gambar 4.5 Kondisi Salah Satu Jalan Tani di Kecamatan Bululawang**

Selain akses jalan ke sawah, kondisi perkerasan jalan secara umum di Kecamatan Bululawang meliputi jalan aspal sebesar 20,74%, jalan batu sebesar 77,50%, dan jalan tanah sebesar 1,77% mempengaruhi biaya transportasi dalam distribusi hasil panen ke tengkulak. Ketersediaan jalan perkerasan aspal dalam menuju titik pusat lokasi sawah sebesar 57,67%, sedangkan untuk perkerasan makadam sebesar 37,44% dan perkerasan tanah sebesar 4,8%. Kondisi perkerasan jalan tersebut berpengaruh terhadap efisiensi dalam proses distribusi, khususnya terkait jumlah hasil panen yang diangkut. Para distributor dapat menempuh perjalanan menuju pusat lokasi sawah dari pusat kecamatan dengan rata-rata lama perjalanan 30.6 menit dengan jarak rata-rata  $\pm 4.3$  Km. Besar biaya transportasi berpengaruh terhadap harga beli gabah pada petani, serta harga jual gabah maupun beras pada distributor selanjutnya khususnya Pasar Bululawang. Biaya transportasi dalam aktivitas distribusi beras lokal untuk mobil

sebesar Rp.25.000/Ton dan motor sebesar Rp.6.000/Kw. Terdapatnya potensi terkait infrastruktur jalan, berpengaruh terhadap besaran harga beli gabah pada petani. Harga beli gabah pada petani di Kecamatan Bululawang sebesar Rp.3.900-4.000/Kg. Hal tersebut berpengaruh terhadap pendapatan petani sendiri, harga jual pada distributor selanjutnya hingga harga beras di Pasar Bululawang.





**Gambar 4.6** Peta Kondisi Infrastruktur Jalan dan Peruntukan Lahan Kecamatan Bululawang

Infrastruktur irigasi di Kecamatan Bululawang terdiri dari irigasi teknis dan semi-teknis. Kondisi irigasi teknis di kecamatan tersebut didominasi kondisi rusak berat sebesar 47% dan semi teknis sebesar 75%. Luas lahan pertanian di Kecamatan

Bululawang berdasarkan jenis irigasi sebesar 1960 Ha sawah irigasi teknis (*Sumber: Kabupaten Dalam Angka 2013*). Sumber air yang digunakan untuk irigasi di Kecamatan Bululawang berasal dari Irigasi Kedungkandang, Kali Meri, Kali Kemanten. Peran infrastruktur irigasi terhadap pertanian di Kecamatan Bululawang mempunyai pengaruh penting dalam meningkatkan luas panen yang dihasilkan.

Peranan infrastruktur irigasi di Kecamatan Bululawang belum sepenuhnya optimal. Hal tersebut dikarenakan sulitnya bagi petani dalam memperoleh sumber air untuk irigasi. Saat musim kemarau petani sulit mendapatkan air untuk keperluan irigasi. Terbatasnya stok sumber air, sering menjadi konflik petani seperti dengan petani Kecamatan Gondanglegi untuk keperluan irigasi. Permasalahan terkait sulitnya mendapat sumber air untuk irigasi menimbulkan permasalahan kekeringan. Hal tersebut berpengaruh terhadap kualitas dan kuantitas hasil produksi gabah dimana mempengaruhi jumlah produksi panen menurun.

Kondisi irigasi dimana tergolong buruk menimbulkan permasalahan kekeringan, hal tersebut berdampak pada luas panen sawah Kecamatan Bululawang yang cukup kecil dibanding kecamatan lainnya. Hal tersebut dikarenakan seringnya terjadi kebocoran pada DAM dan saluran irigasi lainnya, sehingga menyebabkan pasokan air untuk pengairan tidak merata. Kondisi tersebut berpengaruh terhadap pola tanam padi setiap tahunnya, dimana pola tanam tersebut mempengaruhi luas panen padi. Terkait perilaku petani dalam areal sawah, para petani melakukan pengairan dengan intensitas setiap hari sekali. Hal tersebut dikarenakan debit pasokan air yang kecil menyebabkan diperlukan pengairan areal sawah setiap hari.

Kondisi irigasi teknis yang dengan didominasi kerusakan berat menyebabkan seringnya terjadi kebocoran. Kondisi tersebut mempengaruhi kualitas dan kuantitas gabah yang dihasilkan, dimana mempengaruhi pola tanam di kecamatan tersebut. Pola tanam mempengaruhi luas panen dimana berdampak produktivitas padi. Produktivitas padi di Kecamatan Bululawang sebesar 86,69 Kw/Ha dengan luas panen sebesar 1.267 Ha. Hal tersebut berpengaruh terhadap ketersediaan beras di Kecamatan Bululawang khususnya Pasar Bululawang. Ketersediaan beras berdampak pada harga jual di Pasar Bululawang, harga beras lokal Kecamatan Bululawang di pasar tersebut berkisar Rp. 8.100 – Rp. 8.300/Kg.

### C. Kecamatan Jabung

Infrastruktur jalan berperan dalam transportasi barang terkait proses produksi dan distribusi beras ke Pasar Jabung. Infrastruktur jalan di Kabupaten Malang belum

mendukung optimal dalam proses produksi dan distribusi beras. Pada proses distribusi beras lokal menuju lokasi Pasar Bantur, pihak distributor tidak mengalami hambatan terkait infrastruktur jalan. Terkait proses produksi maupun distribusi gabah antara petani dengan distributor masih mengalami kendala. Hal tersebut dikarenakan kondisi jalan untuk menuju sawah masih didominasi kondisi perkerasan makadam. Hal tersebut menghambat aksesibilitas kendaraan. Dikarenakan luas sawah yang cukup besar di sebagian lokasi, akses jalan yang kecil dan belum mengalami perkerasan menjadi kendala bagi petani untuk menuju titik-titik di dalam areal sawah. Hal ini menimbulkan kesulitan bagi petani untuk melakukan pemupukan, pengobatan tanaman, dan pengangkutan hasil panen di semua titik lokasi di sawah.

Keterbatasan lahan dalam pengembangan jalan menyebabkan sulitnya untuk kendaraan roda empat. Kesulitan tersebut meliputi jumlah angkut dalam setiap aktivitas distribusi. Hal tersebut menimbulkan biaya tambahan untuk proses tersebut meliputi jumlah perjalanan pengangkutan dan upah buruh angkut sebesar Rp. 3.300/50Kg. Biaya tambahan tersebut berpengaruh terhadap biaya produksi dan biaya distribusi baik petani maupun tengkulak. Hal tersebut berpengaruh terhadap harga jual pada distributor selanjutnya, maupun pendapatan petani sendiri.



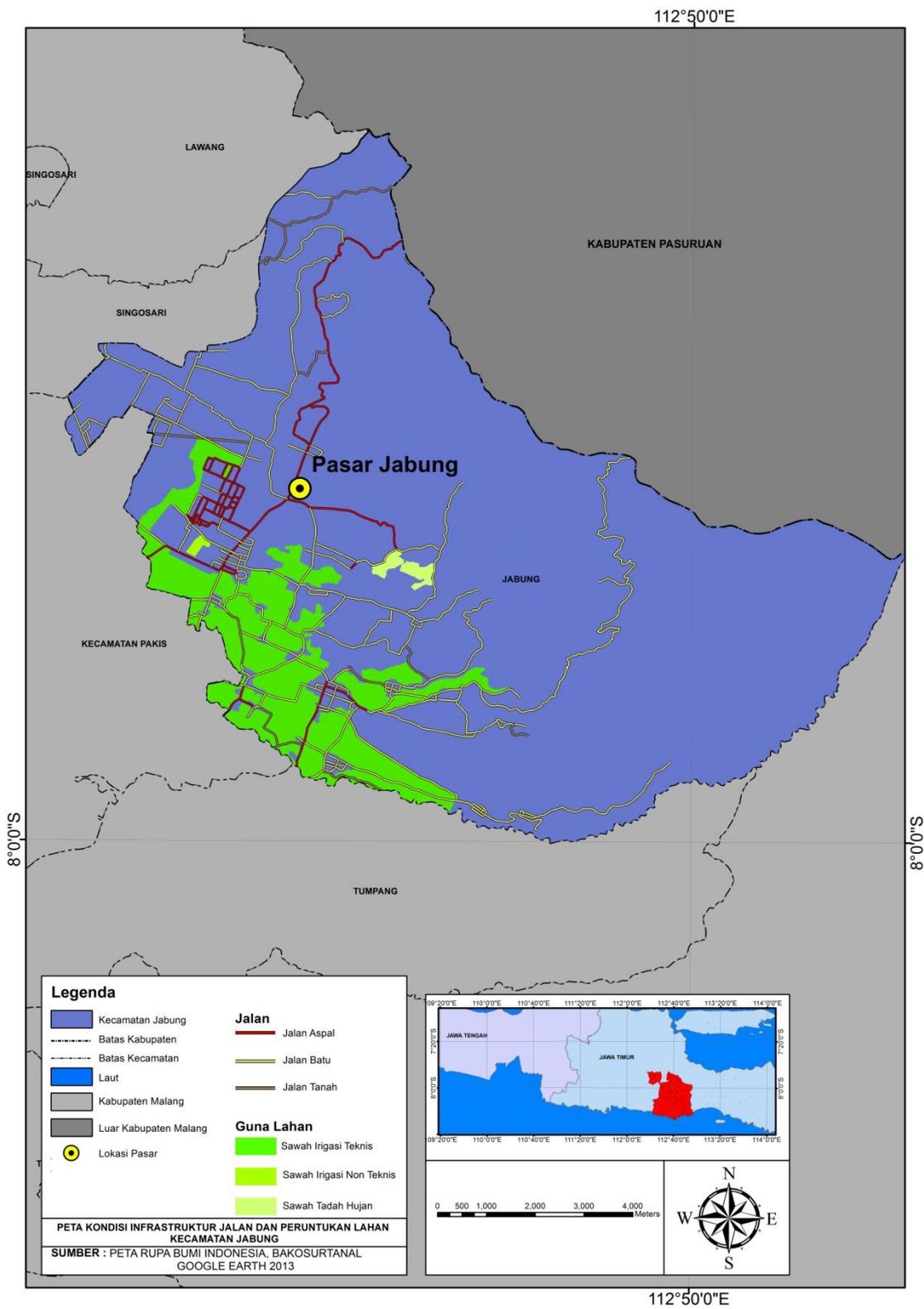
**Gambar 4.7 Kondisi Salah Satu Tani di Kecamatan Jabung**

Selain akses jalan ke sawah, kondisi perkerasan jalan secara umum di Kecamatan Jabung didominasi jalan aspal sebesar 18,31%, jalan batu sebesar 72,77% , dan jalan tanah sebesar 8,91% mempengaruhi biaya transportasi dalam distribusi hasil panen ke tengkulak. Ketersediaan jalan perkerasan aspal dalam menuju titik pusat lokasi sawah sebesar 8,15%, sedangkan untuk pekerasan makadam sebesar 85,86% dan perkerasan tanah sebesar 5,97%. Kecilnya ketersediaan jalan aspal di kecamatan tersebut berdampak negatif terhadap kemudahan akses distribusi. Kondisi tersebut

berpengaruh terhadap jumlah perjalanan distribusi dalam menuju lokasi-lokasi sawah, sehingga meningkatkan besar biaya transportasi meliputi biaya distribusi baik petani maupun tengkulak. Para distributor menempuh perjalanan menuju pusat lokasi sawah dari pusat kecamatan dengan rata-rata lama perjalanan 33.83 menit untuk jarak  $\pm 3.68$  Km.

Terdapatnya permasalahan terkait infrastruktur jalan, menyebabkan kecilnya besaran harga beli gabah pada petani. Harga beli gabah pada petani di Kecamatan Jabung sebesar Rp.3.800-4.000/Kg. Selain kondisi jalan, lebar rata-rata infrastruktur jalan sebesar 3 meter berpengaruh terhadap pemilihan moda transportasi. Hal tersebut berpengaruh terhadap jumlah perjalanan distribusi sehingga menambah besar biaya transportasi. Besar biaya transportasi berpengaruh terhadap harga beli gabah pada petani, serta harga jual gabah maupun beras pada distributor selanjutnya khususnya Pasar Jabung. Biaya transportasi dalam aktivitas distribusi beras lokal untuk mobil sebesar Rp.28.000/Ton dan motor sebesar Rp.8.000/Kw.





**Gambar 4.8** Peta Kondisi Infrastruktur Jalan dan Peruntukan Lahan Kecamatan Jabung

Infrastruktur irigasi di Kecamatan Jabung terdiri dari irigasi teknis, semi-teknis, dan irigasi desa/non PU. Kondisi irigasi teknis di kecamatan tersebut tergolong 70% rusak ringan, sedangkan untuk irigasi semi-teknis tergolong 79% rusak sedang,

dan desa/non PU tergolong 100% rusak ringan. Luas lahan pertanian di Kecamatan Jabung berdasarkan jenis irigasi sebesar 1348 Ha sawah irigasi teknis, 11 Ha sawah irigasi non teknis dan tandah hujan sebesar 45 Ha (*Sumber: Kabupaten Dalam Angka 2013*). Sumber air yang digunakan untuk irigasi di Kecamatan Jabung berasal dari Kali Cokro dan Kali Jilu. Peran infrastruktur irigasi terhadap pertanian di Kecamatan Jabung berkaitan dengan luas panen yang dihasilkan.

Permasalahan yang terjadi terkait irigasi di Kecamatan Jabung adalah sumber air yang terbatas khususnya saat musim kemarau. Para petani sulit mendapat pasokan air untuk irigasi. Hal tersebut disebabkan pembagian air yang tidak merata, dimana daerah hulu tergolong boros dalam menggunakan air, sehingga daerah hilir sulit mendapat pasokan air. Perilaku petani dalam mengairi areal sawah masih tergolong petani lama, dimana dalam mengairi areal masih dilakukan secara berlebihan tanpa adanya pengaturan intensitas pengairan. Rata-rata para petani mengairi sawah dengan intensitas pengairan satu hingga tiga hari sekali. Hal tersebut berpengaruh terhadap ketersediaan pasokan air untuk irigasi pengairan. Saat musim kemarau kualitas dan kuantitas produksi padi yang dihasilkan menurun, hal tersebut berpengaruh terhadap jumlah produksi panen. Namun daya dukung kondisi irigasi teknis, semi-teknis dan desa memberikan dampak positif terhadap luas panen di kecamatan tersebut.

Kondisi infrastruktur irigasi teknis dan semi teknis di seluruh lahan pertanian Kecamatan Jabung mendukung dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil gabah yang dihasilkan. Kondisi irigasi yang didominasi kerusakan ringan tidak terlalu menjadi kendala bagi petani dalam melakukan usaha tani. Kondisi tersebut mendukung kemampuan petani dalam meningkatkan produktivitas sawah.

Kondisi tersebut berpengaruh terhadap produktivitas padi, dimana mempengaruhi penawaran jumlah hasil panen dan harga penjualan antara petani dengan tengkulak. Produktivitas padi di Kecamatan Jabung sebesar 56,7 Kw/Ha dengan luas panen sebesar 2.461 Ha. Hal tersebut berpengaruh terhadap ketersediaan beras di Kecamatan Jabung khususnya Pasar Jabung. Ketersediaan beras berdampak pada harga jual di Pasar Jabung, harga beras lokal Kecamatan Jabung di pasar tersebut berkisar Rp. 7.400 – Rp. 7.600/Kg.

#### D. Kecamatan Karangploso

Proses distribusi beras lokal menuju lokasi Pasar Karangploso, pihak distributor tidak mengalami hambatan. Hal tersebut dikarenakan kondisi perkerasan

jalan menuju pasar tersebut didominasi perkerasan aspal. Hal tersebut mendukung aksesibilitas dalam proses distribusi beras.

Pada proses produksi beras lokal sebagian petani mengalami hambatan terkait infrastruktur jalan. Dikarenakan luas sawah yang cukup besar di sebagian lokasi, akses jalan yang kecil dan belum mengalami perkerasan menjadi kendalabagi petani untuk menuju titik-titik di dalam areal sawah khususnya sawah dengan luas areal besar. Hal ini menimbulkan kesulitan bagi petani untuk melakukan pemupukan, pengobatan tanaman, dan pengangkutan hasil panen di semua titik lokasi di sawah. Keterbatasan lahan dalam pengembangan jalan menyebabkan sulitnya untuk kendaraan roda empat. Kesulitan tersebut meliputi jumlah angkut dalam setiap aktivitas distribusi. Hal tersebut menimbulkan biaya tambahan untuk proses tersebut meliputi jumlah perjalanan pengangkutan dan upah buruh angkut sebesar Rp. 3.200/50Kg. Biaya tambahan tersebut berpengaruh terhadap biaya produksi dan biaya distribusi baik petani maupun tengkulak. Hal tersebut berpengaruh terhadap harga jual pada distributor selanjutnya, maupun pendapatan petani sendiri.

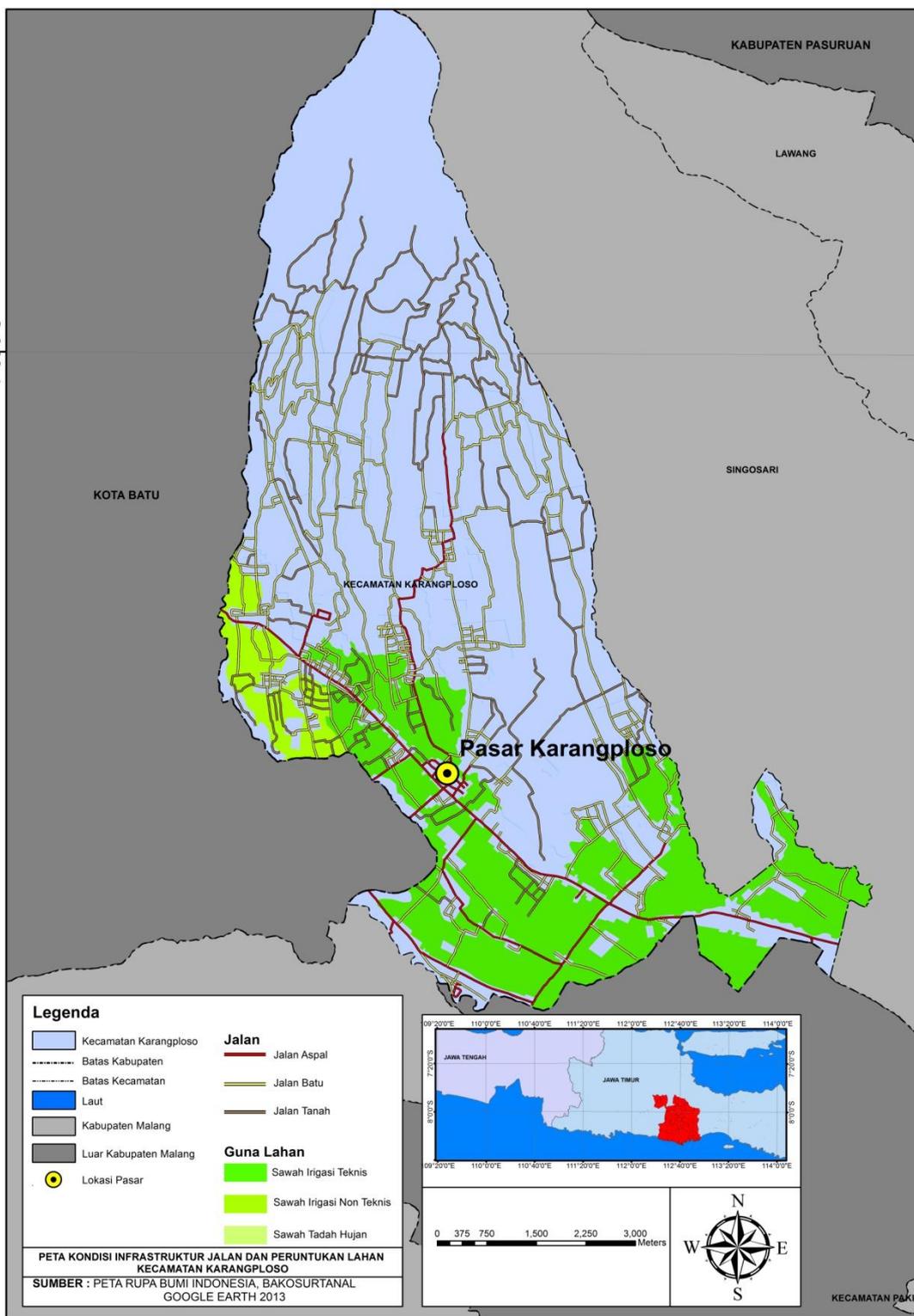


**Gambar 4.9 Kondisi Salah Satu Jalan Tani di Kecamatan Karangploso**

Selain akses jalan ke sawah, kondisi perkerasan jalan secara umum di Kecamatan Karangploso meliputi jalan aspal sebesar 12,37%, jalan batu 56,73, dan jalan tanah 30,90 %. Ketersediaan jalan perkerasan aspal dalam menuju titik pusat lokasi sawah sebesar 78,49%, sedangkan untuk perkerasan makadam sebesar 17,59% dan perkerasan tanah sebesar 3,9%. Besarnya ketersediaan kondisi jalan aspal menuju lokasi sawah berdampak positif pada akses distribusi usaha tani. Dalam proses distribusi gabah antara petani dengan distributor, pihak distributor menuju pusat lokasi sawah dari pusat kecamatan dapat ditempuh dengan rata-rata lama perjalanan 22.35 menit untuk jarak  $\pm 3.58$  Km.

Hal tersebut berpengaruh terhadap jumlah perjalanan distribusi serta aksesibilitas kendaraan, dimana adanya potensi infrastruktur jalan memperkecil biaya transportasi. Besarnya biaya transportasi berpengaruh terhadap besaran harga beli gabah pada petani, serta harga jual gabah maupun beras pada distributor selanjutnya khususnya Pasar Karangploso. Biaya transportasi dalam aktivitas distribusi beras lokal untuk mobil sebesar Rp.23.000/Ton dan motor sebesar Rp.6.000/Kw. Adanya potensi terkait infrastruktur jalan, menyebabkan meningkatnya besaran harga beli gabah pada petani. Harga beli gabah pada petani di Kecamatan Karangploso sebesar Rp4.100-4.300/Kg. Kondisi infrastruktur jalan tersebut juga berpengaruh terhadap harga jual beras di Pasar Karangploso, dimana terdapat selisih yang cukup besar antara harga beli gabah dengan harga jual beras.





**Gambar 4.10 Peta Kondisi Infrastruktur Jalan dan Peruntukan Lahan Kecamatan Karangploso**

Infrastruktur irigasi di Kecamatan Karangploso terdiri dari irigasi teknis, semi-teknis, dan sederhana. Kondisi irigasi teknis di kecamatan tersebut tergolong 80% baik, sedangkan untuk irigasi semi-teknis tergolong 72% rusak sedang, dan sederhana

tergolong 100% rusak ringan. Luas lahan pertanian di Kecamatan Karangploso berdasarkan jenis irigasi sebesar 1142 Ha sawah irigasi teknis, 182 Ha sawah irigasi non teknis (Sumber: Kabupaten Dalam Angka 2013). Sumber air yang digunakan untuk irigasi di Kecamatan Jabung berasal dari Brantas Atas, Sumber Brantas, Kali Mewek dan Kali Bodo. Peran infrastruktur irigasi terhadap pertanian di Kecamatan Karangploso berkaitan dengan luas panen yang dihasilkan.

Petani di Kecamatan Karangploso tidak menemukan kendala terkait sumber air untuk irigasi. Hal ini dikarenakan sumber air di Kecamatan Karangploso mencukupi untuk kegiatan pertanian meskipun saat musim kemarau. Kondisi irigasi semi-teknis dan sederhana dimana masih didominasi dengan kondisi rusak menjadi permasalahan terkait irigasi. Hal tersebut sering menimbulkan permasalahan kebocoran, sehingga berdampak pada pemerataan pasokan air.

Kondisi perilaku petani juga menjadi faktor permasalahan terkait irigasi. Perilaku petani dalam mengairi areal sawah masih tergolong petani lama, dimana dalam mengairi areal masih dilakukan secara berlebihan tanpa adanya pengaturan intensitas pengairan. Hal tersebut juga berdampak pada pemerataan pasokan air. Tidak meratanya pasokan air akan berdampak pada kemampuan sawah dalam memproduksi gabah. Hal tersebut berdampak pada luas panen sawah, dimana mempengaruhi jumlah produksi gabah di kecamatan tersebut.

Jenis infrastruktur irigasi yang didominasi oleh irigasi teknis dengan didominasi kondisi baik, berpengaruh terhadap daya dukung dalam usaha tani. Hal tersebut berdampak pada luas panen dimana dipengaruhi oleh luas areal padi maupun intensitas penanaman padi di Kecamatan Karangploso.

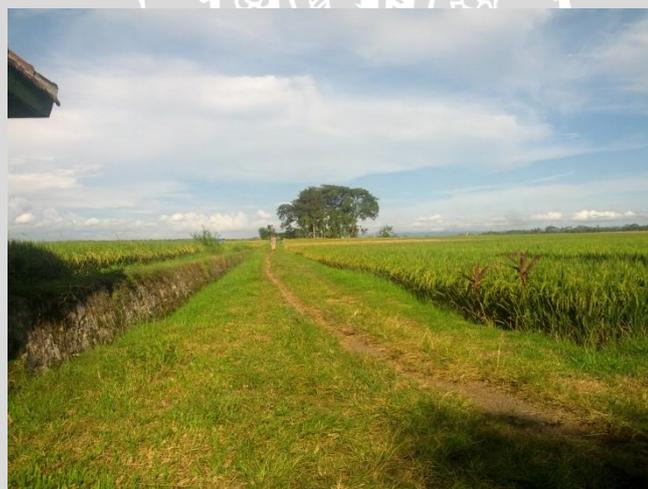
Produktivitas padi di Kecamatan Karangploso sebesar 67,61 Kw/Ha dengan luas panen sebesar 2.887 Ha. Kondisi tersebut berpengaruh terhadap penawaran jumlah gabah maupun harga penjualan antara petani dengan tengkulak. Hal tersebut berdampak terhadap ketersediaan beras di Kecamatan Karangploso khususnya Pasar Karangploso. Ketersediaan dan kualitas beras berdampak pada harga jual di Pasar Karangploso, harga beras lokal Kecamatan Karangploso di pasar tersebut berkisar Rp. 7.200 – Rp. 7.400/Kg.

#### E. Kecamatan Sumberpucung

Proses distribusi beras antara distributor dengan pedagang di Pasar Sumberpucung tidak menemukan kendala. Kondisi tersebut dikarenakan ketersediaan

jalan menuju lokasi pasar didominasi jalan perkerasan aspal. Hal tersebut berdampak pada kelancaran aksesibilitas dalam proses distribusi.

Pada proses produksi beras lokal, sebagian petani mengalami hambatan terkait infrastruktur jalan. Dikarenakan luas sawah yang cukup besar di sebagian lokasi, akses jalan yang kecil dan belum mengalami perkerasan menjadi kendala bagi petani untuk menuju titik-titik di dalam areal sawah khususnya sawah dengan luas areal besar. Hal ini menimbulkan kesulitan bagi petani untuk melakukan pemupukan, pengobatan tanaman, dan pengangkutan hasil panen di semua titik lokasi di sawah. Keterbatasan lahan dalam pengembangan jalan menyebabkan sulitnya untuk kendaraan roda empat. Kesulitan tersebut meliputi jumlah angkut dalam setiap aktivitas distribusi. Hal tersebut menimbulkan biaya tambahan untuk proses tersebut meliputi jumlah perjalanan pengangkutan dan upah buruh angkut sebesar Rp. 3.200/50Kg. Biaya tambahan tersebut berpengaruh terhadap biaya produksi dan biaya distribusi baik petani maupun tengkulak. Hal tersebut berpengaruh terhadap harga jual pada distributor selanjutnya, maupun pendapatan petani sendiri.

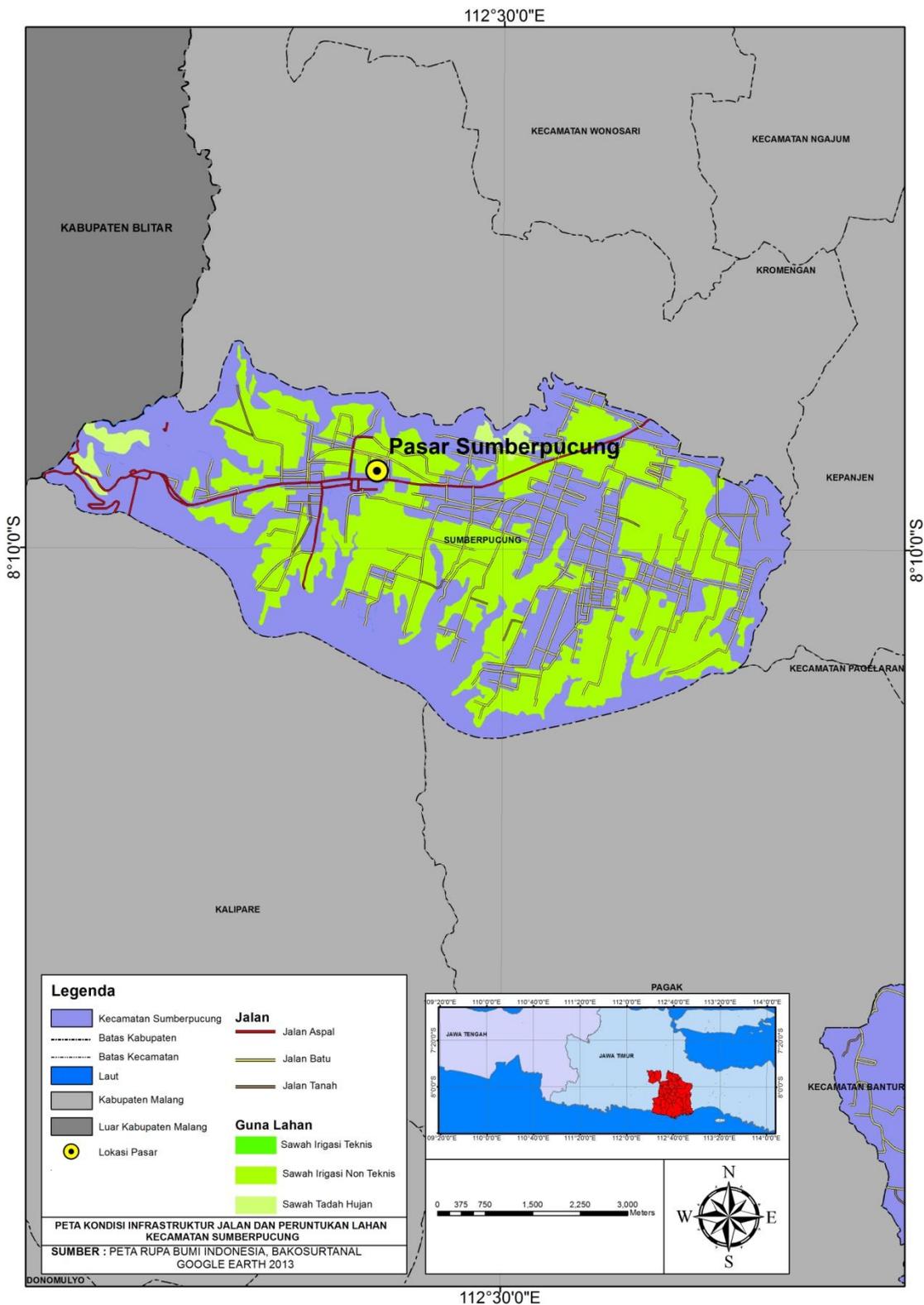


**Gambar 4.11 Kondisi Salah Satu Jalan Tani di Kecamatan Sumberpucung**

Selain akses jalan ke sawah, kondisi perkerasan jalan secara umum di Kecamatan Sumberpucung meliputi jalan aspal sebesar 13,03%, jalan batu sebesar 84,04%, dan jalan tanah sebesar 2,93%. Kondisi perkerasan jalan belum berpengaruh optimal terhadap efisiensi dalam proses distribusi. Hal tersebut dikarenakan ketersediaan jalan menuju lokasi sawah masih didominasi kondisi makadam. Ketersediaan jalan perkerasan aspal dalam menuju titik pusat lokasi sawah sebesar 57,67%, sedangkan untuk pekerasan makadam sebesar 37,44% dan perkerasan tanah sebesar 4,8%. Besarnya ketersediaan jalan makadam menuju lokasi sawah berdampak pada akses distribusi usaha tani di kecamatan tersebut. Dalam menuju lokasi pusat di

areal sawah dari pusat kota, para distributor maupun petani dapat menempuh perjalanan menuju pusat lokasi sawah dari pusat kecamatan dapat ditempuh dengan rata-rata lama perjalanan 31 menit untuk jarak  $\pm 4.41$  Km. Kondisi tersebut mempengaruhi biaya transportasi dalam distribusi hasil panen ke tengkulak. Biaya transportasi dalam aktivitas distribusi beras lokal untuk mobil sebesar Rp.25.000/Ton dan motor sebesar Rp.6.500/Kw. Harga beli gabah pada petani di Kecamatan Sumberpucung sebesar Rp.4.000-4.200/Kg.





**Gambar 4.12 Peta Kondisi Infrastruktur Jalan dan Peruntukan Lahan Kecamatan Sumberpucung**

Infrastruktur irigasi di Kecamatan Sumberpucung secara keseluruhan terdiri dari irigasi teknis. Kondisi irigasi teknis di kecamatan tersebut tergolong 56% rusak sedang. Seluruh lahan sawah pertanian di Kecamatan Sumberpucung menggunakan irigasi teknis. Luas lahan sawah irigasi teknis di kecamatan tersebut sebesar 1.873 Ha

(Sumber: Kabupaten Dalam Angka 2013). Sumber air yang digunakan untuk irigasi di Kecamatan Sumberpucung berasal dari Kali Rowo Klampok dan Irigasi Molek. Peran infrastruktur irigasi terhadap pertanian di Kecamatan Sumberpucung berkaitan dengan produktivitas padi yang dihasilkan.

Kendala terkait infrastruktur irigasi di Kecamatan Sumberpucung adalah kurangnya pasokan air irigasi. Hal tersebut disebabkan kondisi perilaku petani dalam mengairi areal sawah masih tergolong petani lama, dimana dalam mengairi areal masih dilakukan secara berlebihan tanpa adanya pengaturan pengairan. Kondisi tersebut menyebabkan pembagian air kurang merata di wilayah pertanian Kecamatan Sumberpucung khususnya wilayah jauh dari sumber air.

Kondisi infrastruktur irigasi teknis dengan tergolong 56% rusak sedang menyebabkan peningkatan kemungkinan kebocoran pada infrastruktur irigasi. Hal tersebut juga menjadi faktor dalam ketidakmerataan pembagian pasokan air di wilayah Kecamatan Sumberpucung. Jenis infrastruktur irigasi yang didominasi kondisi kerusakan berpengaruh terhadap daya dukung dalam usaha tani. Hal tersebut berdampak pada luas panen yang cukup kecil meskipun ketersediaan luas areal padi yang cukup besar.

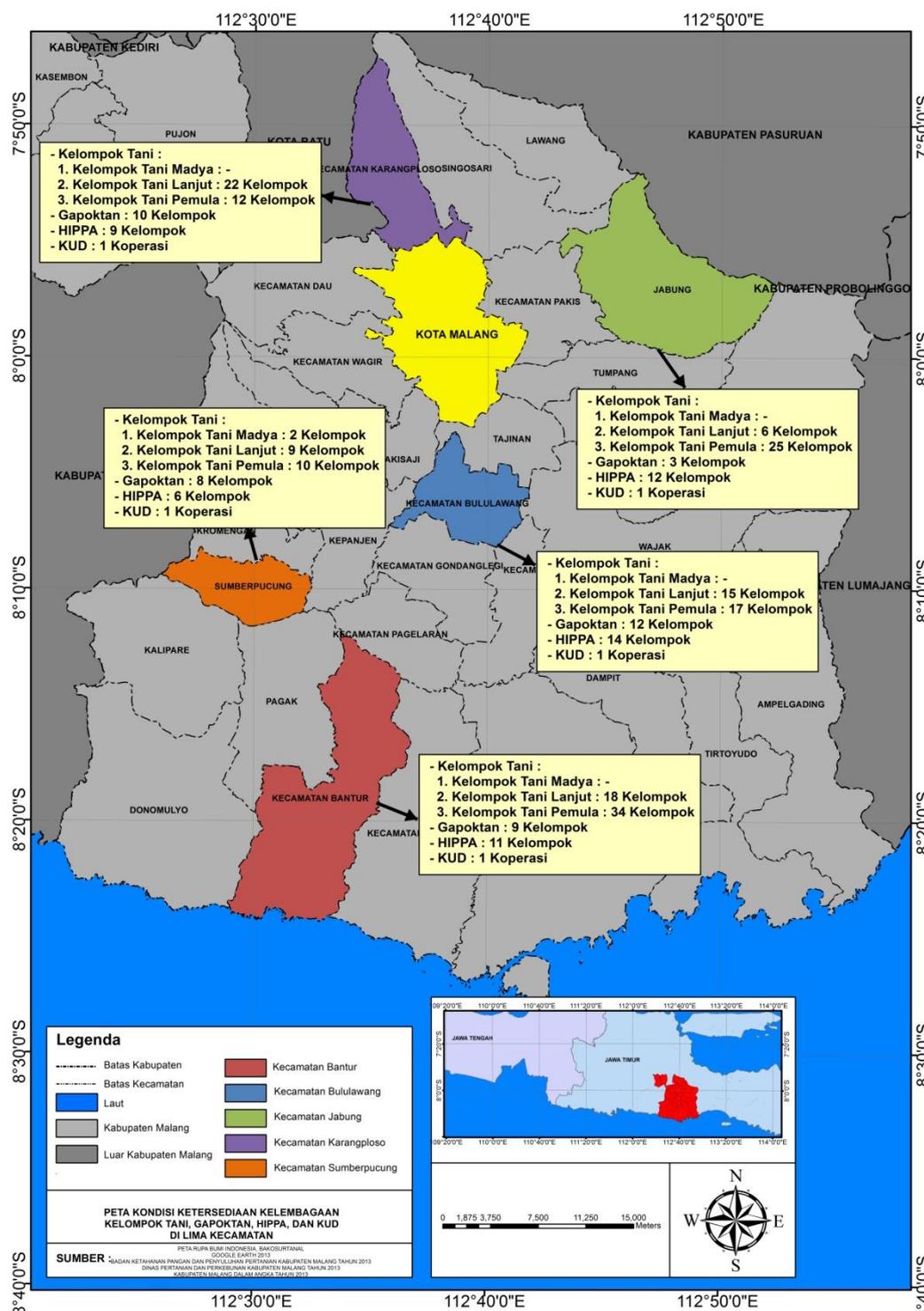
Produktivitas padi di Kecamatan Sumberpucung sebesar 65,48 Kw/Ha dengan luas panen sebesar 2.377 Ha. Kondisi tersebut berpengaruh terhadap penawaran jumlah gabah maupun harga penjualan antara petani dengan tengkulak. Hal tersebut berdampak terhadap ketersediaan beras di Kecamatan Sumberpucung khususnya Pasar Sumberpucung. Ketersediaan beras berdampak pada harga jual di Pasar Sumberpucung, harga beras lokal Kecamatan Sumberpucung di pasar tersebut berkisar Rp. 6.900 – Rp. 7.100/Kg.

#### 4.4.3 Analisis kondisi hubungan kelembagaan

Pada bahasan sebelumnya dijelaskan bahwa input dalam analisis hubungan kelembagaan berasal dari output analisis triangulasi (Lihat: Sub bab 4.3, hal 57). Output pada analisis hubungan kelembagaan akan dijadikan sebagai input dalam analisis selanjutnya yaitu analisis tulang ikan. Analisis hubungan kelembagaan adalah analisis yang bertujuan untuk mengetahui untuk mengetahui dan mengidentifikasi pelaku-pelaku yang berbeda beserta kepentingannya terhadap aktivitas pertanian. Dalam analisis hubungan kelembagaan akan diidentifikasi peran *stakeholders* terkait pelaku-pelaku usaha tani antara lain produsen dan distributor beras di Kecamatan Bantur,

Kecamatan Bululawang, Kecamatan Jabung, Kecamatan Karangploso, Kecamatan Sumberpucung.

Kelembagaan yang terdapat dalam aktivitas pertanian hingga pemasaran hasil produksi tani di lima kecamatan terdiri kelompok tani, KUD, HIPPA, lembaga pemasaran (tengkulak), lembaga penunjang lainnya (*kuwowo*, BPP, *slep*/penggilingan).



Gambar 4.13 Peta Kondisi Ketersediaan Kelembagaan Kelompok Tani, Gapoktan, HIPPA, dan KUD di Lima Kecamatan

#### A. Kelompok Tani

Kelembagaan kelompok tani bertujuan meningkatkan kemampuan budidaya pertanian terkait peningkatan kuantitas dan kualitas hasil pertanian. Hal tersebut ditunjang dengan adanya penyuluhan, bantuan terkait sarana dan prasana, ketersediaan bibit dan pupuk berkualitas yang memiliki harga terjangkau, harga jual serta kualitas hasil pertanian tinggi, dan permintaan pasar untuk hasil pertanian tinggi. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan produktivitas usaha tani, pendapatan, dan kesejahteraan para petani. Pendapatan tersebut bersumber dari penjualan hasil gabah pada distributor/pedagang.

Kelompok tani di lima kecamatan berperan sebagai kelas belajar, dimana para anggota diberikan pengetahuan, keterampilan dan sikap sehingga dapat meningkatkan produktivitas hasil usaha tani. Selain sebagai wahana penyuluhan pertanian, kelompok tani di lima kecamatan juga sebagai wahana kerjasama. Hal tersebut bertujuan dalam menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, gangguan, serta meningkatkan usaha tani. Kondisi tersebut terlihat dimana adanya kerjasama antar anggota maupun antar kelompok tani dalam menghadapi permasalahan khususnya terkait pengairan maupun hama. Peran lain dari kelompok tani di lima kecamatan adalah sebagai unit produksi. Usaha tani yang dilakukan masing-masing anggota dipandang sebagai satu kesatuan usaha yang dikembangkan untuk mencapai skala ekonomis usaha. Dalam proses produksi hasil usaha tani, setiap anggota kelompok saling bekerja sama untuk menjaga kuantitas, kualitas, maupun kontinuitas.

Permasalahan yang dialami kelompok tani di lima kecamatan adalah keterbatasan sarana dan prasarana terkait penerapan hasil penyuluhan. Hal tersebut dikarenakan kurangnya modal dalam pemenuhan sarana dan prasarana. Permasalahan lain dari kelompok tani adalah kurang aktifnya beberapa kelompok tani. Hal tersebut disebabkan oleh kurang adanya hubungan kerja sama antar anggota kelompok dalam meningkatkan usaha tani. Selain itu, permasalahan kelompok tani lainnya adalah tingkat kemampuan kelompok tani tersebut, serta eksistensi anggota kelompok tani dalam mengikuti dan menerapkan penyuluhan. Terkait permasalahan tingkat kemampuan kelompok tani, hal tersebut dikarenakan keterbatasan SDM anggota dalam menerima dan menerapkan penyuluhan. Menurut Rukka dkk (2008), rendahnya tingkat pendidikan merupakan salah satu faktor penghambat pengembangan sektor pertanian di perdesaan. Pendidikan yang rendah akan mempengaruhi kemampnan petani dalam menerapkan inovasi baru sehingga mempengaruhi juga peranan kelompok dalam memenuhi

kebutuhan usaha tani pada sawah. Terkait permasalahan eksistensi anggota kelompok tani, hal tersebut dikarenakan petani lebih memilih sistem tani konvensional. Kondisi tersebut berpengaruh terhadap peranan kelompok tani dalam usaha tani. Peran kelompok tani cenderung kurang aktif dalam menjalankan fungsi-fungsinya. Terlihat dimana sebagian petani masih sulit menerapkan sistem tani hasil dari program-program penyuluhan.

Kelompok tani di Kecamatan Bantur didominasi oleh tingkat kemampuan pemula sebesar 65,38% dari total kelompok tani yang tersedia. Besarnya ketersediaan kelompok tani pemula tidak berpengaruh terhadap produktivitas padi, hal tersebut terlihat produktivitas padi di Kecamatan Bantur tertinggi diantara kecamatan lainnya yaitu 100,12 Kw/Ha. Kondisi tersebut disebabkan para anggota kelompok tani tergolong aktif dalam menerapkan hasil program penyuluhan, meskipun kemampuan kelompok tersebut masih tergolong pemula.

Kelompok tani di Kecamatan Bululawang didominasi oleh tingkat pemula sebesar 53,12% dari total kelompok tani yang tersedia. Ketersediaan kelompok tani tingkat lanjut sebesar 46,87% mendukung dalam melakukan penyuluhan pertanian. Besarnya ketersediaan kelompok tani tingkat lanjut berpengaruh dalam mengajak dan memberikan penyuluhan terkait sistem tani efektif. Kondisi tersebut juga didukung oleh eksistensi para petani dalam menerapkan sistem tani hasil program penyuluhan. Hal tersebut berdampak kemampuan petani dalam meningkatkan produktivitas padi di kecamatan tersebut. Produktivitas padi di Kecamatan Bululawang sebesar 86,69 Kw/Ha.

Kelompok tani di Kecamatan Jabung didominasi oleh tingkat pemula sebesar 80,64% dari total kelompok tani yang tersedia. Besarnya ketersediaan kelompok tani pemula berdampak pada kurang aktifnya kegiatan penyuluhan pertanian di kecamatan tersebut. Kondisi tersebut dikarenakan rendahnya kemampuan kelompok tani dalam mengajak dan memberikan penyuluhan terkait sistem tani efektif. Hal tersebut berdampak pada rendahnya kemampuan petani dalam meningkatkan produktivitas padi. Besar produktivitas padi di Kecamatan Jabung sebesar 56,7 Kw/Ha.

Kelompok tani di Kecamatan Karangploso didominasi oleh tingkat pemula sebesar 64,70% dari total kelompok tani yang tersedia. Kondisi kelompok tani di Kecamatan Karangploso tidak jauh berbeda dengan kondisi di Kecamatan Jabung. Kemampuan petani yang didominasi oleh tingkat pemula, serta eksistensi petani yang rendah dalam menerapkan sistem hasil tani penyuluhan, berdampak pada kemampuan

petani dalam meningkatkan produktivitas padi di kecamatan. Besar produktivitas padi di Kecamatan Karangploso sebesar 67,71 Kw/Ha.

Kelompok tani di Kecamatan Sumberpucung terdiri dari 47,61% tingkat pemula, 42,85% tingkat lanjut, dan 9,54% tingkat madya. Secara umum kondisi kemampuan kelompok tani di kecamatan tersebut didominasi oleh tingkat menengah keatas. Besar ketersediaan kelompok tani kemampuan menengah keatas, tidak berdampak terhadap kemampuan peningkatan produktivitas padi. Kondisi tersebut disebabkan oleh eksistensi para petani dalam mengikuti dan menerapkan penyuluhan pertanian. Kemampuan kelompok tani dimana tergolong baik dalam memberikan penyuluhan, namun pada kondisi eksisting para petani masih menerapkan sistem tani petani lama. Hal tersebut berdampak pada rendahnya kemampuan petani dalam meningkatkan produktivitas padi. Besar produktivitas padi di Kecamatan Sumberpucung sebesar 65,48 Kw/Ha.

#### B. Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani)

Gapoktan berperan sebagai sarana dalam berbagi informasi dan penyuluhan antar petani dalam satu desa maupun luar desa. Selain itu, kepentingan Gapoktan meliputi sarana permodalan, produksi dan distribusi dengan adanya bantuan dari pemerintah.

Gapoktan di lima kecamatan berperan sebagai unit usaha penyedia sarana dan prasarana produksi. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya layanan kepada seluruh anggota dalam memenuhi sarana produksi seperti pupuk dan alat mesin pertanian. Peran gapoktan lainnya di lima kecamatan adalah sebagai unit usaha tani. Gapoktan umumnya bekerja dengan pihak lain khususnya lembaga pemerintah dalam memberikan program-program yang bertujuan meningkatkan usaha tani salah satunya produktivitas padi. Gapoktan di lima kecamatan juga bergerak dalam unit usaha pengolahan. Gapoktan berperan dalam proses pengolahan hasil usaha tani seperti penggilingan, sortasi/grading, dan pengepakan. Namun kurangnya modal serta sarana dan prasarana menjadi sering hambatan bagi gapoktan dalam menjalankan fungsinya tersebut.

Peran gapoktan lainnya di lima kecamatan adalah sebagai usaha pemasaran, dimana memasarkan hasil pertanian anggota ke distributor lainnya. Kendala yang sering dihadapi adalah dimana para petani lebih memilih menjual hasil usaha taninya langsung ke para tengkulak. Hal tersebut dikarenakan para petani membutuhkan modal kembali secara cepat dan mudah. Keterbatasan dana juga mempengaruhi kemampuan gapoktan dalam membeli hasil usaha tani petani. Pihak gapoktan membeli gabah dengan harga

beli gabah yang sama dengan tengkulak. Selain itu, keterbatasan dana mempengaruhi jumlah gabah yang dapat dibeli oleh lembaga tersebut. Terkait permodalan para petani, gapoktan juga mengambil peran dalam memberikan layanan permodalan terhadap petani. Gapoktan mendapatkan bantuan dari pemerintah dalam memberikan layanan permodalan terhadap petani, namun dengan anggaran yang terbatas.

Permasalahan lain yang dihadapi gapoktan di lima kecamatan adalah rendahnya antusias sebagian petani dalam mengsucceskan program-program pertanian dari pemerintah. Hal tersebut disebabkan adanya program-program yang tidak tepat sasaran dan keterbatasan SDM para petani. Kemampuan SDM para petani berpengaruh terhadap keberhasilan program-program pertanian. Hal tersebut tidak lepas dari kemampuan setiap kelompok tani dalam memberikan penyuluhan terhadap para petani. Program dipandang sebagian petani merupakan pemberian secara gratis bukan untuk dikembangkan/dikembalikan (pinjaman). Hal tersebut menyebabkan adanya hambatan pada program. Selain itu, kekhawatiran Gapoktan adalah permasalahan dalam program-program pemerintah dimana konsistensi program yang sering terputus dan kurangnya pengawasan.

### C. KUD

KUD berperan sebagai sarana menunjang aktivitas usaha tani. KUD merupakan lembaga yang berperan sebagai kelembagaan agribisnis hulu. Hal tersebut dilakukan dengan berupa sarana pengadaan pupuk dan bibit bersubsidi. Kendala terkait pengadaan pupuk dan bibit bersubsidi adalah kurangnya ketersediaan sarana produksi tersebut. KUD juga berperan sebagai lembaga koperasi dimana bergerak terkait permodalan. Permasalahan yang dialami oleh KUD adalah kemampuan dalam melakukan peminjaman dana untuk permodalan dan dana dalam penyediaan sarana produksi. Keterbatasan anggaran dana serta adanya rasa kurang percaya terhadap kemampuan para petani terkait pengembalian pinjaman menyebabkan peran KUD sebagai sarana permodalan belum optimal. Kurangnya kemitraan pemasaran hasil usaha padi menyebabkan para petani cenderung mengalami monopoli perdagangan. Hal tersebut menyebabkan kurangnya rasa percaya KUD terhadap petani terkait peminjaman modal. Selain itu, kekhawatiran lain yang dialami oleh KUD adalah keterbatasan dana dan jaringan pemasaran dalam menampung penjualan hasil gabah dari pihak petani. Kondisi tersebut menyebabkan peran KUD sebagai sarana pemasaran belum optimal. Besaran harga beli gabah yang ditawarkan oleh pihak KUD tidak jauh berbeda dengan yang ditawarkan distributor lainnya. Selain besaran harga beli gabah,

proses administrasi yang rumit menjadi salah satu faktor pihak petani lebih memilih melakukan penjualan gabah pada tengkulak atau *slep*/penggilingan.

#### D. HIPPA

HIPPA berperan sebagai sarana lembaga non-formal yang terdiri dari masyarakat khususnya dari pihak petani, dimana mengawasi dan mengatur sistem prasarana pengairan pertanian di desa dengan turun langsung ke lapangan. Peran HIPPA terkait usaha pertanian merupakan lembaga penunjang agribisnis. HIPPA berkoordinasi dengan *kuwowo* dalam melakukan tugasnya. Kekhawatiran yang dialami oleh HIPPA adalah keterbatasan anggaran dalam menyelesaikan permasalahan prasarana pengairan serta sulitnya mengatur penggunaan air dikarenakan sifat petani yang masih mementingkan golongan/pribadi. Selain itu, kekhawatiran HIPPA lainnya adalah keterbatasan SDM dari pihak HIPPA dalam mengawasi dan mengatur sistem prasarana pengairan.

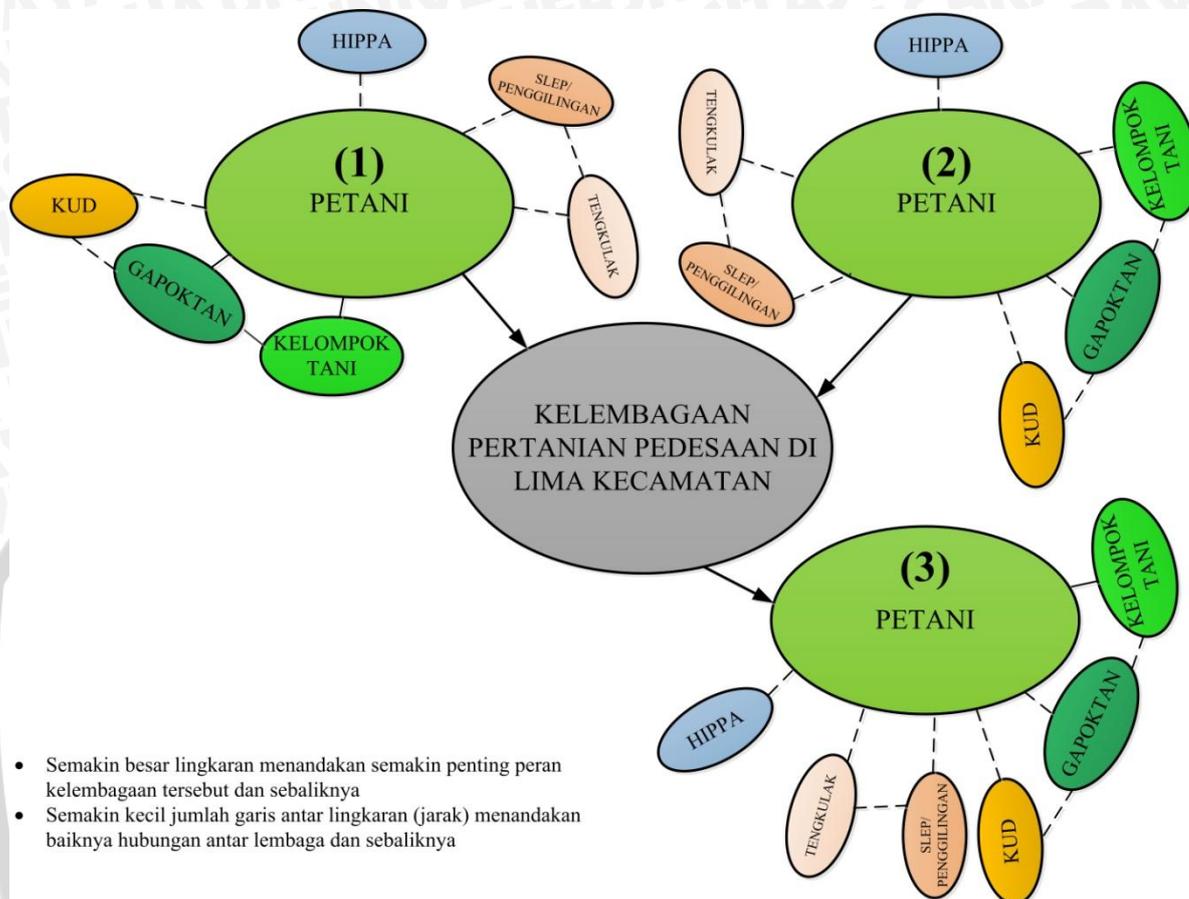
#### E. Tengkulak

Tengkulak merupakan salah satu lembaga pertanian non-formal di lima kecamatan dimana berperan dalam memasarkan hasil gabah ke distributor selanjutnya. Peran tengkulak terkait usaha pertanian merupakan kelembagaan agribisnis hilir. Tengkulak juga berperan sebagai kelembagaan pemasaran agribisnis. Hal tersebut dilakukan dengan peran lembaga tersebut memasarkan hasil gabah petani ke distributor selanjutnya. Tengkulak mendapatkan keuntungan dari selisih harga beli dan harga jual gabah yang diperoleh dari petani. Permasalahan yang dialami oleh tengkulak yaitu kualitas dan kuantitas gabah yang diproduksi dari pihak petani, serta besarnya harga jual gabah yang dapat mempengaruhi keuntungan pihak tengkulak. Keuntungan yang diperoleh oleh tengkulak bergantung pada hasil negoisiasi dengan pihak petani terkait pembelian gabah.

#### F. *Slep*/Penggilingan

*Slep*/penggilingan mempunyai kepentingan terkait memproses gabah menjadi produk akhir yaitu beras. *Slep*/penggilingan merupakan kelembagaan agribisnis hilir terkait usaha pertanian. Hal tersebut dikarenakan *slep*/penggilingan berperan dalam mengolah komoditas primer yang dihasilkan pada subsistem usaha tani. *slep*/penggilingan juga berperan dalam kelembagaan pemasaran agribisnis. Hal tersebut dikarenakan *slep*/penggilingan mempunyai kepentingan terkait pemasaran produk beras ke distributor selanjutnya. Kekhawatiran *slep*/penggilingan yaitu terdapat persaingan dalam penentuan harga jual beras, dimana mempengaruhi besarnya keuntungan yang

didapat. Selain itu, kekhawatiran lainnya adalah musim yang mempengaruhi kualitas kuantitas beras terkait penjemuran gabah dan persaingan antar *slep*/Penggilingan dalam menarik permintaan pasar.



**Gambar 4.14 Diagram Venn Kelembagaan Usaha Tani di Lima Kecamatan**

Terlihat bahwa dalam menunjang aktivitas pertanian, petani sebagai produsen padi melakukan kerjasama dengan beberapa lembaga. Adanya kerjasama beberapa lembaga akan berdampak positif terhadap usaha tani khususnya dalam proses produksi dan pemasaran. Ukuran besar lingkaran pada gambar diatas menunjukkan besarnya kepentingan peran setiap lembaga bagi petani. Pada kondisi eksisting terdapat kondisi hubungan kelembagaan pertanian yang beragam di lima kecamatan. Hal tersebut terdapat pada kondisi hubungan antara kelompok tani dan Gapoktan dengan beberapa lembaga. Hubungan antar lembaga ditunjukkan melalui besarnya jumlah garis antar lingkaran pada gambar diatas. Besarnya jumlah garis antar lingkaran menunjukkan hubungan yang kurang baik dan sebaliknya. Terlihat hubungan antara petani dengan KUD, tengkulak, serta *slep*/penggilingan pada ketiga diagram menunjukkan hubungan yang kurang baik.

Pada diagram venn nomor satu terlihat kecilnya jumlah garis antar lingkaran yang tergolong. Hal tersebut menggambarkan adanya hubungan yang baik antara kelompok tani dan Gapoktan dengan petani. Hal tersebut dikarenakan keaktifan pihak kelompok tani dan gapoktan dalam melaksanakan peran lembaga masing-masing. Keaktifan lembaga kelompok tani dan Gapoktan tersebut mendapat respon positif dengan lembaga lainnya dalam hubungan kerjasama untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas usaha tani. Hal tersebut dilakukan dengan adanya program-program peningkatan usaha tani.

Pada diagram venn nomor dua terdapat hubungan yang kurang baik dibandingkan dengan diagram venn sebelumnya. Terlihat besarnya jumlah garis antara kelompok tani dan Gapoktan dengan petani. Hal tersebut dikarenakan kurangnya keaktifan pihak kelompok tani dan Gapoktan dalam melaksanakan peran lembaga masing-masing. Kondisi tersebut menyebabkan kurangnya hubungan kerjasama dengan lembaga lain dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas usaha tani. Hal tersebut berdampak pada kurangnya kerjasama terkait program-program peningkatan usaha tani.

Pada diagram venn nomor tiga terdapat hubungan yang berbeda dengan diagram venn sebelumnya. Terlihat jumlah garis lebih besar dibandingkan diagram venn sebelumnya antara kelompok tani dengan Gapoktan. Terdapat hubungan yang kurang baik antara kelompok tani dengan gapoktan. Hal tersebut dikarenakan kurangnya keaktifan Gapoktan dalam menjalankan peran lembaga tersebut. Sedangkan untuk hubungan dengan kelompok tani dengan petani terlihat adanya hubungan baik. Kondisi tersebut digambarkan dengan jumlah garis yang kecil antar lembaga. Pihak kelompok tani yang aktif dalam melaksanakan peran lembaga, berdampak pada peningkatan hubungan dengan BPP. Hal tersebut dilakukan dengan adanya program-program peningkatan usaha tani.

Untuk hubungan kerjasama petani dengan tengkulak dan *slep*/penggilingan, diagram venn menunjukkan hubungan yang kurang baik. Terlihat dimana jumlah garis yang besar antara lembaga-lembaga tersebut. Kondisi tersebut dikarenakan petani kurang merasakan manfaat dari kerjasama dengan tengkulak dan *slep*/penggilingan. Hal tersebut disebabkan adanya monopoli harga yang dilakukan pihak tengkulak dan *slep*/penggilingan terhadap pihak kelompok tani. Kondisi monopoli harga disebabkan keterbatasan petani terkait sarana pemasaran. Hal tersebut dikarenakan adanya hubungan yang kurang baik antara KUD dengan petani.

Untuk hubungan antara KUD, Gapoktan, dan petani pada kedua diagram venn, terlihat jumlah garis yang besar antar lembaga. Hal tersebut menggambarkan hubungan yang kurang baik. Pihak KUD sebagian besar belum mampu menampung hasil produk gabah, keterbatasan dalam anggaran biaya sebagai sarana produksi dan pemasaran menjadi hambatan dalam menunjang aktivitas usaha tani.

Sebagai sarana produksi, KUD berperan dalam penyediaan pupuk untuk pertanian. Namun sering terjadi permasalahan dimana pihak Gapoktan maupun petani sering mengalami kekurangan persediaan pupuk, hal tersebut dikarenakan kurangnya ketersediaan pupuk di KUD. Sebagai sarana pemasaran, hubungan kerjasama KUD dengan petani masih terjadi kendala. Hal tersebut dikarenakan harga jual yang tidak berbeda jauh dengan distributor lain dan proses administrasi yang rumit, menyebabkan pada petani lebih cenderung memilih *slep*/penggilingan sebagai distributor beras. Sebagai sarana permodalan, hubungan kerjasama KUD dengan petani juga masih terjadi kendala. Hal tersebut dikarenakan kendala jaminan peminjaman yang dapat diberikan pihak petani terkait usaha pertanian padi. Kendala jaminan peminjaman disebabkan oleh adanya kemungkinan gagal panen dan harga gabah hasil panen dimana menurut petani masih rendah untuk mengembalikan modal.

Untuk hubungan antara HIPPA dengan petani, ketiga diagram venn menunjukkan hubungan yang cukup baik. Kelembagaan HIPPA cukup aktif dalam menjalankan perannya mengawasi dan mengatur sistem prasarana pengairan pertanian di desa. HIPPA berkoordinasi dengan *kuwowo* yaitu perangkat desa dalam melakukan tugasnya. Konflik HIPPA dengan petani adalah sifat petani yang masih mementingkan golongan/pribadi sehingga sulit mengatur penggunaan air.

#### 4.5 Analisis Tulang Ikan

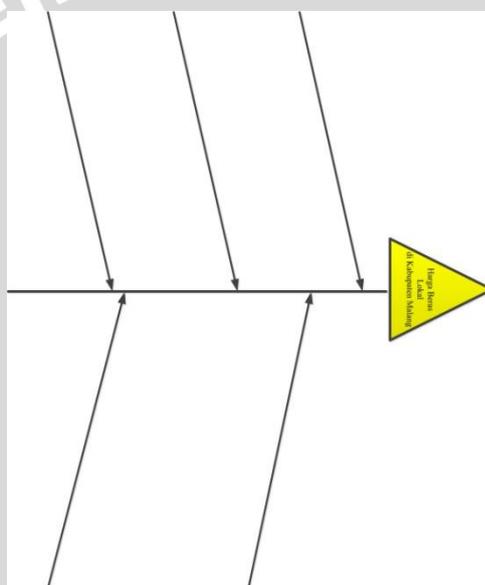
Dalam analisis tulang ikan sebelumnya dilakukan analisis situasi (Lihat: Sub bab 4.4, hal 57-94) dan analisis hubungan kelembagaan (Lihat: Sub bab 4.5, hal 94-102). Hasil dari kedua analisis tersebut dijadikan sebagai input dalam analisis tulang ikan. Berdasarkan analisis tulang ikan diketahui beberapa permasalahan khususnya terkait kondisi infrastruktur terkait pertanian di Kecamatan Bantur, Bululawang, Jabung, Karangploso, dan Sumberpucung. Permasalahan pertanian tersebut berkaitan dengan kondisi harga beras lokal di Kecamatan Bantur. Pada analisis tulang ikan diatas diketahui beberapa faktor terkait permasalahan pertanian, yaitu faktor modal, metode, SDM (Sumber Daya Manusia), alat, dan lingkungan.

#### 4.5.1 Sebab – Akibat Permasalahan Kondisi Harga Beras

Langkah pertama yang dilakukan dalam analisis tulang ikan adalah menentukan permasalahan yang akan dibahas. Tujuan utama penelitian adalah membahas kondisi harga beras di lima kecamatan wilayah penelitian. Permasalahan yang akan dibahas pada analisis ini adalah terkait kondisi harga beras, dimana bertujuan mengetahui sebab-sebab yang mempengaruhi kondisi harga beras di lima kecamatan utama Kabupaten Malang.

#### 4.5.2 Identifikasi akibat dari permasalahan

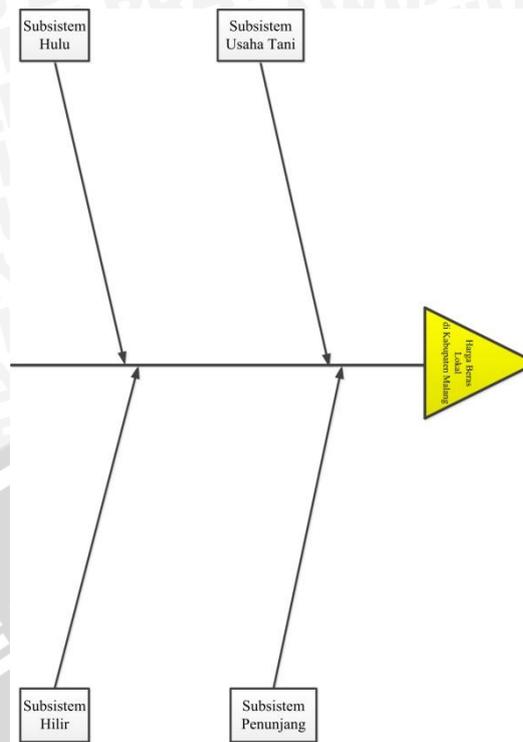
Langkah kedua dalam analisis tulang ikan adalah mengidentifikasi permasalahan utama. Permasalahan utama dicantumkan pada kepala ikan dimana merupakan akibat atau efek. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada **gambar 4.14**



**Gambar 4.15 Permasalahan Utama pada Analisis Tulang Ikan**

#### 4.5.3 Identifikasi berbagai kategori permasalahan

Langkah ketiga dalam analisis tulang ikan mengidentifikasi faktor-faktor yang mungkin menjadi penyebab utama masalah kondisi harga beras di lima kecamatan. Penentuan faktor-faktor penyebab utama pada permasalahan utama didasarkan pada teori sistem agribisnis. Menurut Shinta, A (2011) agribisnis adalah suatu kesatuan kegiatan usaha yang meliputi salah satu atau keseluruhan dari manta rantai pengadaan saprodi, produksi, pengolahan hasil dan pemasaran olahan dari hasil usaha tani. Kegiatan usaha-usaha tersebut tentunya akan mempengaruhi harga jual beras. Faktor-faktor yang mempengaruhi dan menjadi penyebab utama pada masalah kondisi harga beras berasal dari beberapa subsistem agribisnis yaitu subsistem hulu, subsistem usaha tani, subsistem hilir, subsistem jasa penunjang (Saptana dkk, 2013).



**Gambar 4.16 Penyebab Utama pada Analisis Tulang Ikan**

#### 4.5.4 Sebab-sebab potensial permasalahan

Langkah keempat dalam analisis tulang ikan adalah mengidentifikasi penyebab-penyebab yang mempengaruhi penyebab utama. Berdasarkan bahasan sebelumnya diketahui penyebab utama pada permasalahan kondisi harga beras adalah faktor subsistem hulu, subsistem usaha tani, subsistem hilir, subsistem jasa penunjang. Penyebab-penyebab yang akan dibahas berasal dari output analisis sebelumnya yaitu analisis situasi dan analisis hubungan kelembagaan. Berikut dijelaskan penyebab-penyebab atau penyebab sekunder yang mempengaruhi faktor-faktor penyebab utama, antara lain

##### A. Subsistem hulu

Permasalahan terkait subsistem hulu diketahui bahwa para petani mengalami kesulitan dalam memenuhi sarana produksi. Sulitnya pemenuhan sarana produksi berdampak pada subsistem selanjutnya yaitu usaha tani. Para petani mengalami keterlambatan terkait pemenuhan pupuk dan pestisida. Kondisi tersebut menghambat kelancaran proses produksi yang akan dilakukan. Proses produksi yang terhambat mempengaruhi pertumbuhan padi yang tidak optimal. Hal tersebut berdampak hasil gabah yang akan dihasilkan, dimana kualitas dan kuantitas gabah yang dihasilkan tidak maksimal. Kondisi tersebut berpengaruh terhadap harga jual gabah pada distributor selanjutnya yaitu tengkulak.

### B. Subsistem usaha tani

Permasalahan terkait subsistem usaha tani adalah peranan kelembagaan penyuluhan usaha tani yaitu kelompok tani. Permasalahan terkait peranan kelompok tani adalah kurang tersedianya sarana dan prasarana terkait penerapan program penyuluhan. Tidak tersedianya sarana dan prasarana terkait penyuluhan menyebabkan kegiatan penyuluhan menjadi tidak optimal. Hal tersebut berdampak pada penguasaan teknologi anggota kelompok tani terkait sistem tani efektif, sehingga para petani cenderung memilih sistem tani konvensional. Kondisi tersebut berdampak pada kualitas dan kuantitas gabah yang dihasilkan. Faktor kualitas dan kuantitas gabah merupakan faktor yang mempengaruhi harga jual gabah petani pada distributor selanjutnya.

Permasalahan lainnya terkait kelompok tani adalah keterbatasan kemampuan dan pengalaman kelembagaan pertanian. Kondisi tersebut berpengaruh terhadap kemampuan para petani. Kurangnya kemampuan dan pengalaman berdampak pada keberhasilan setiap lembaga dalam pendekatan terkait penyuluhan terhadap para petani. Kondisi tersebut juga disebabkan para petani sudah terbiasa dengan sistem tani petani lama, sehingga sulit menerima inovasi pertanian baru diperlukan kemampuan yang baik terkait pendekatan dan penyuluhan.

Keaktifan kelembagaan pertanian juga berpengaruh terhadap sistem tani para petani. Kelembagaan yang kurang aktif cenderung membiarkan sistem tani masih didominasi sistem tani petani lama. Keaktifan kedua lembaga tersebut juga berpengaruh terhadap pengadaan program-program bantuan pertanian dari pemerintah. Perbedaan keaktifan kelompok tani dalam di lima kecamatan, berdampak pada pemerataan program-program bantuan pemerintah tersebut. Hal tersebut dikarenakan pihak pemerintah mengharapkan keberhasilan program-program yang diberikan, sehingga sasaran dari program-program ditunjukkan pada kelembagaan pertanian yang aktif.

### C. Subsistem hilir

Permasalahan terkait subsistem hilir adalah peran kelembagaan KUD, gapoktan, tengkulak, dan *slep*/penggilingan. Peran kelembagaan-kelembagaan tersebut belum optimal terkait perannya sebagai sarana pemasaran. Kondisi tersebut disebabkan kelembagaan-kelembagaan tersebut belum menjamin pembelian gabah dengan harga yang sesuai bagi pihak petani. Terkait peran KUD, permasalahan yang terjadi dalam pemasaran gabah adalah aktivitas kerjasama antara KUD dengan pihak petani pemasaran gabah tergolong jarang. Selain permasalahan penampungan gabah, pihak petani berpacu dengan waktu dalam menjual hasil panen. Kondisi tersebut dipengaruhi

kepentingan pihak petani dalam mendapatkan modal untuk kebutuhan hidup sehari-hari, serta untuk modal usaha tani selanjutnya. Kondisi tersebut dimanfaatkan oleh pihak distributor dalam membeli hasil panen. Kelemahan pihak petani dalam menjual hasil usaha tani menjadi salah satu faktor terjadinya permainan harga atau monopoli. Petani merupakan pihak yang cenderung dirugikan terkait penjualan gabah dengan distributor.

#### D. Subsistem jasa penunjang

Permasalahan terkait subsistem jasa penunjang di lima kecamatan meliputi kondisi infrastruktur jalan dan irigasi, serta kelembagaan yang belum sepenuhnya mendukung usaha tani. Terkait permasalahan infrastruktur jalan, permasalahan tersebut berdampak pada proses produksi dan distribusi gabah hingga menjadi beras lokal. Kondisi perkerasan jalan makadam dan tanah menyebabkan belum efisiennya peran infrastruktur tersebut terkait proses produksi dan distribusi beras lokal. Belum efisiennya kondisi infrastruktur jalan berpengaruh terhadap jumlah perjalanan distribusi sehingga menambah besar biaya transportasi.

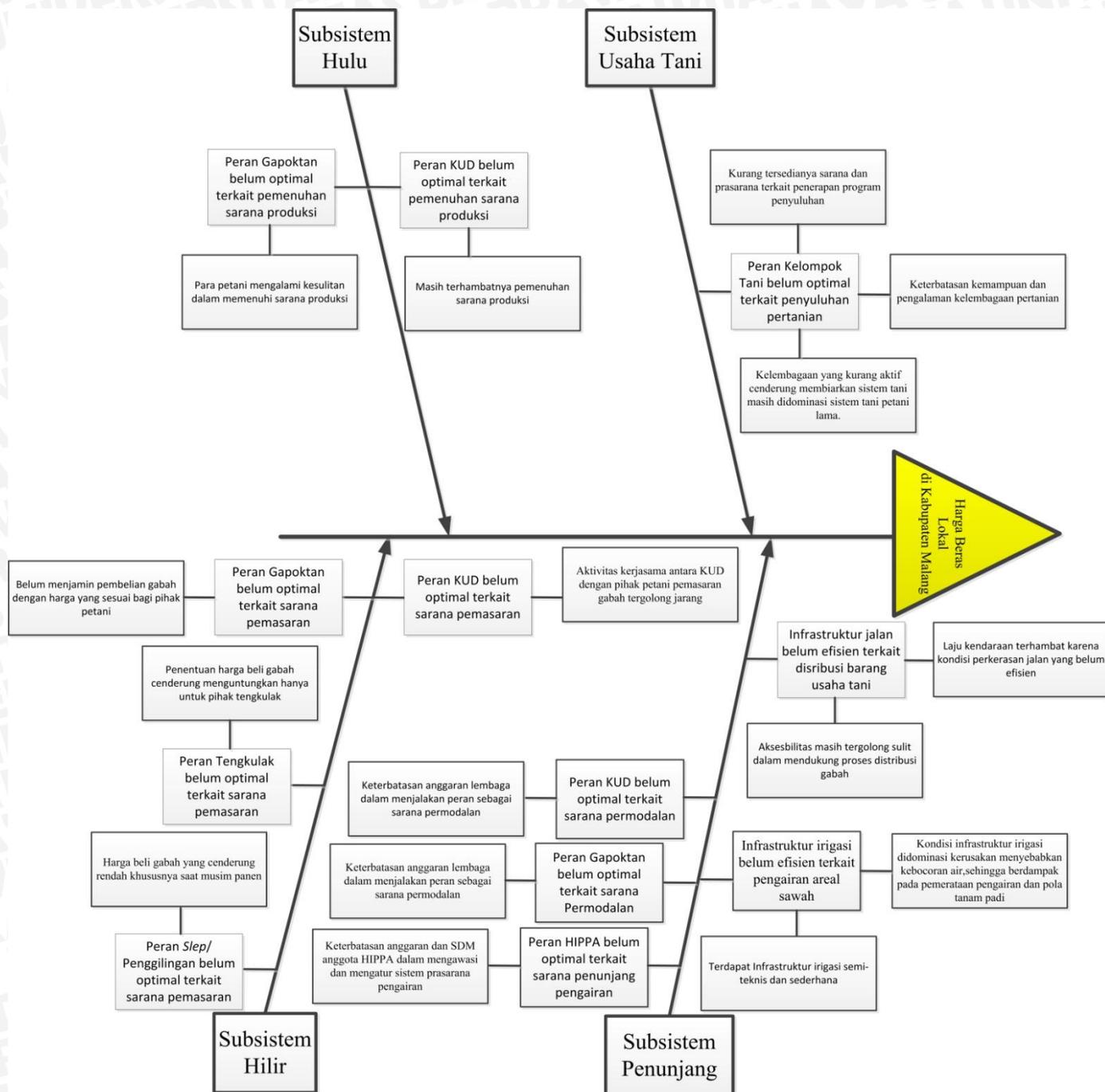
Permasalahan lain terkait infrastruktur jalan selain kondisi infrastruktur jalan desa di lima kecamatan adalah kondisi infrastruktur jalan usaha tani. Luas sawah yang cukup besar di sebagian lokasi, akses jalan yang kecil dan belum mengalami perkerasan menjadi kendala bagi petani untuk menuju titik-titik di lokasi sawah khususnya sawah dengan luas areal besar. Hal ini menimbulkan kesulitan bagi petani untuk melakukan pemupukan, pengobatan tanaman, dan pengangkutan hasil panen di semua titik lokasi di sawah.

Keterbatasan lahan dalam pengembangan jalan usaha tani menyebabkan sulitnya untuk kendaraan roda empat. Kesulitan tersebut meliputi jumlah angkut dalam setiap aktivitas distribusi. Hal tersebut menimbulkan biaya tambahan untuk proses tersebut meliputi jumlah perjalanan pengangkutan dan upah buruh angkut sebesar Rp. 2.500 - 3.500/50kg. Biaya tambahan tersebut berpengaruh terhadap biaya produksi dan biaya distribusi baik petani maupun tengkulak. Hal tersebut berpengaruh terhadap harga jual pada distributor selanjutnya, maupun pendapatan petani sendiri.

Permasalahan lain subsistem jasa penunjang di lima kecamatan adalah infrastruktur irigasi. Permasalahan yang terjadi terkait infrastruktur irigasi adalah kondisi infrastruktur irigasi didominasi kerusakan. Hal tersebut menyebabkan kebocoran air, sehingga terjadi distribusi air yang tidak merata. Selain kondisi infrastruktur irigasi, ketersediaan jaringan irigasi semi-teknis dan sederhana juga berpengaruh terhadap efisiensi pengairan. Kondisi jaringan irigasi semi-teknis dan

sederhana cenderung mengalami kebocoran air. Permasalahan lain terkait distribusi air adalah perilaku petani dalam pengairan. Perilaku petani dalam mengairi areal sawah masih tergolong petani lama, dimana dalam mengairi areal masih dilakukan secara berlebihan tanpa adanya pengaturan intensitas pengairan. Daerah hulu tergolong boros dalam menggunakan air, sehingga daerah hilir sulit mendapat pasokan air. Menurut Hanjra dkk (2009) diperlukan peningkatan kemampuan para petani dalam memanfaatkan infrastruktur irigasi. Saat musim kemarau kualitas dan kuantitas produksi padi yang dihasilkan menurun, hal tersebut berpengaruh terhadap jumlah produksi panen.

Permasalahan terkait kelembagaan dalam subsistem jasa penunjang adalah peranan kelembagaan KUD, gapoktan, dan HIPPA. Terkait subsistem jasa penunjang, KUD dan gapoktan berperan sebagai lembaga permodalan. Permasalahan yang terjadi adalah belum optimalnya peran kedua lembaga terkait lembaga permodalan. Hal tersebut disebabkan oleh keterbatasan anggaran kedua lembaga dalam menjalankan peran sebagai sarana permodalan. Selain itu, terdapat rasa kurang percaya antar KUD dengan petani terkait peminjaman modal. Hal tersebut dikarenakan kondisi kemitraan pemasaran hasil usaha tani padi yang cenderung mengalami monopoli perdagangan. Para petani cenderung dirugikan terkait kondisi tersebut. Terkait peranan HIPPA, permasalahan yang terjadi adalah keterbatasan anggaran dan keterbatasan SDM anggota HIPPA dalam mengawasi dan mengatur sistem prasarana pengairan. Terbatasnya anggaran menyebabkan kurang optimalnya terkait pemeliharaan dan perawatan prasarana pengairan, yaitu infrastruktur irigasi. Faktor keterbatasan SDM mempengaruhi kemampuan para anggota dalam mengawasi dan mengatur sistem pengairan. Sifat petani yang cenderung berlebihan dalam pengairan dan mementingkan golongan pribadi menjadi permasalahan bagi HIPPA dalam menjalankan perannya.



Gambar 4.17 Penyebab Sekunder pada Analisis Tulang Ikan

4.5.5 Kajian setiap kategori sebab utama

Langkah kelima dalam analisis tulang ikan adalah mengkaji kembali setiap kategori penyebab sekunder. Hal tersebut dilakukan dengan melakukan analisis kembali terhadap kemungkinan adanya penyebab-penyebab lain. Pada penelitian dilakukan analisis penyebab tersier yang kemungkinan mempengaruhi penyebab sekunder. Input yang akan dikaji pada bahasan ini juga berasal dari analisis sebelumnya yaitu analisis situasi dan analisis hubungan kelembagaan.

#### A. Subsistem hulu

Pada penyebab subsistem hilir, ditemukan penyebab tersier yaitu belum optimalnya peran KUD dan Gapoktan terkait penyediaan sarana produksi. Permasalahan terkait penyediaan sarana produksi disebabkan adanya keterlambatan distribusi sarana produksi dari distributor sebelumnya. Tidak seimbanginya ketersediaan sarana produksi dengan besarnya kepentingan pemenuhan sarana produksi menyebabkan tidak optimalnya proses usaha tani padi. Terbatasnya ketersediaan sarana produksi memaksa petani mengeluarkan modal lebih untuk mendapatkan sarana produksi. Hal tersebut berdampak pada biaya input usaha tani. Meskipun terjadi peningkatan biaya input usaha tani, namun biaya output harga gabah yang diterima pihak petani tidak mengalami peningkatan. Kondisi tersebut menyebabkan penurunan antusias petani dalam meningkatkan produksi padi di setiap kecamatan. Seperti dijelaskan pada bahasan sebelumnya, jumlah produksi padi berdampak pada harga gabah di setiap kecamatan. Menurunnya jumlah produksi padi berdampak pada peningkatan harga beras di pasar-pasar setiap kecamatan.

#### B. Subsistem usaha tani

Pada penyebab sekunder faktor hilir, ditemukan penyebab hilir yaitu keterbatasan modal dalam memenuhi sarana dan prasarana terkait penerapan penyuluhan pertanian. Hal tersebut berdampak pada kurang intensnya penerapan kegiatan-kegiatan hasil penyuluhan hingga tuntas. Inovasi pertanian yang cenderung selalu berkembang, membuat petani sulit menerapkan inovasi petani dengan terbatasnya sarana dan prasarana. Hal tersebut berakibat pada kemauan petani dalam menerapkan sistem tani modern, dimana timbulnya pandangan petani terhadap sistem tani modern yang cenderung rumit.

Penyebab tersier lainnya yaitu tingkat pendidikan dan kondisi tenaga kerja petani didominasi usia lanjut yang mempengaruhi kemampuan kelembagaan pertanian penyuluhan pertanian. Terkait kondisi tenaga kerja petani dimana didominasi usia lanjut, kondisi tersebut merupakan salah satu faktor dimana sulitnya menerapkan sistem tani hasil penyuluhan. Hal tersebut disebabkan para petani usia lanjut lebih memilih menggunakan sistem tani petani lama. Kondisi tersebut terjadi karena pola tanam petani lama sudah dilakukan secara turun menurun, sehingga para petani sulit untuk menerima inovasi-inovasi baru sistem pertanian. Kondisi tersebut juga berpengaruh terhadap kemampuan petani dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil panen.

### C. Substistem hilir

Peran KUD belum optimal dalam menjadi sarana pemasaran gabah. Hal tersebut terlihat dimana tidak adanya kerjasama antara KUD dengan pihak petani pemasaran. Kerjasama antara KUD dengan pihak petani hanya sebatas distributor pupuk. Terkait sarana pemasaran gabah, pihak KUD kesulitan memasarkan kembali gabah yang didapat dari petani. Hal tersebut beresiko kerugian antara pihak KUD dan petani, sehingga kerjasama pemasaran gabah jarang dilakukan. Selain permasalahan tersebut, pihak petani lebih memilih berkerja sama dengan tengkulak. Kondisi tersebut dikarenakan harga jual gabah yang ditawarkan oleh pihak KUD tidak jauh berbeda dengan pihak tengkulak. Hal tersebut dikarenakan terbatasnya permodalan pihak KUD sebagai sarana pemasaran. Kendala lain yang dirasakan pihak petani adalah sulitnya administrasi dalam melakukan kerjasama pemasaran gabah dengan pihak KUD.

Terkait peranan tengkulak dan *slep*/penggilingan dalam pemasaran, kedua lembaga tersebut merupakan lembaga individual. Hal tersebut berdampak pada adanya usaha untuk memperoleh keuntungan dalam memasarkan hasil usaha tani. Kedua lembaga tersebut bersaing terkait penentuan harga beli maupun harga jual hasil usaha tani. Kualitas dan kuantitas hasil usaha tani merupakan salah satu faktor dalam penentuan harga beli maupun harga jual hasil usaha tani tersebut. Pihak petani merupakan pihak yang dirugikan pada kondisi tersebut. Tengkulak dan *slep*/penggilingan merupakan lembaga yang cenderung paling aktif dalam memasarkan hasil usaha tani. Kepentingan untuk memperoleh keuntungan oleh kedua lembaga tersebut membuat para petani harus menanggung kerugian pada penentuan harga. Hal tersebut membuat peran kedua lembaga tersebut belum optimal seperti yang diharapkan petani terkait lembaga pemasaran.

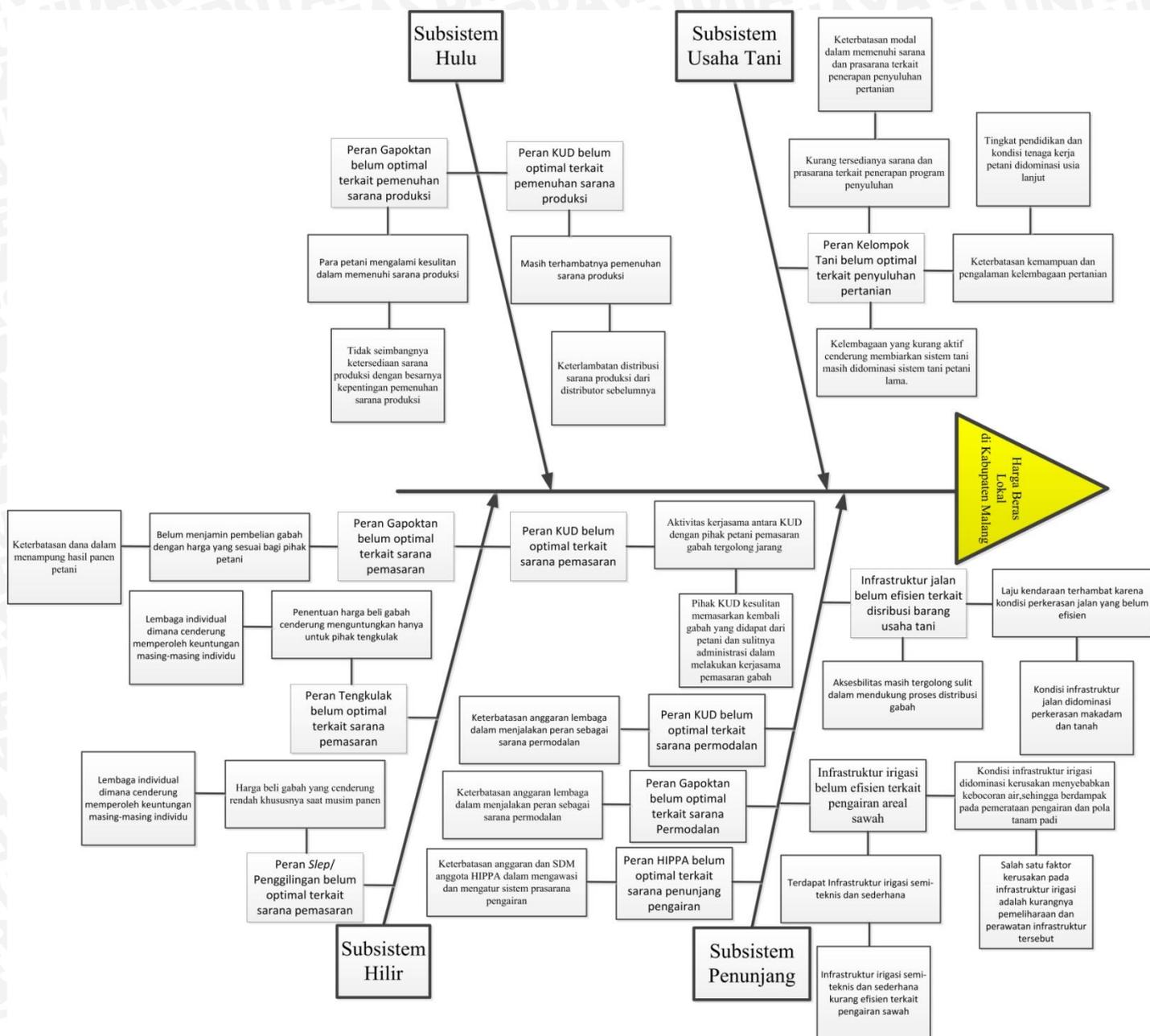
Permasalahan terkait peran gapoktan dalam pemasaran adalah keterbatasan dana dari masing-masing lembaga. Kondisi tersebut berdampak pada optimalnya peran yang diberikan dari masing-masing lembaga terkait pemasaran gabah. Pihak gapoktan berperan dalam menampung hasil panen para petani. Keterbatasan dana yang dimiliki oleh lembaga tersebut, menyebabkan harga beli gabah pada petani tidak terlalu berbeda dengan tengkulak. Selain permasalahan harga, keterbatasan dana tersebut juga mempengaruhi jumlah gabah yang dapat dibeli oleh lembaga tersebut. Peran gapoktan dalam pemasaran gabah adalah membantu para petani terhindar dari penipuan terkait penjualan gabah. Lembaga tersebut mengutamakan rasa kepercayaan antara pembeli dengan penjual yaitu petani.

Kondisi harga jual pada tingkat pemasaran berdampak tingkat keuntungan yang diperoleh petani. Hal tersebut mempengaruhi modal yang dimiliki petani untuk peningkatan proses produksi selanjutnya. Proses produksi berpengaruh terhadap kualitas dan kuantitas hasil usaha tani yang dihasilkan, dimana berpengaruh terhadap harga jual hasil usaha tani tersebut.

#### D. Subsistem penunjang

Pada penyebab sekunder faktor subsistem penunjang, ditemukan penyebab tersier yaitu kondisi infrastruktur jalan dan irigasi yang belum efisien. Kondisi infrastruktur jalan masih didominasi perkerasan makadam, khususnya jalan menuju areal persawahan. Kondisi tersebut berdampak pada sulitnya pergerakan moda transportasi dalam melakukan perjalanan. Perkerasan jalan makadam dan tanah umumnya didominasi kerusakan. Hal tersebut menghambat laju kendaraan dalam menempuh jarak perjalanan distribusi. Hambatan tersebut semakin meningkat pada saat musim hujan, dimana kondisi perkerasan tanah dan basa menghambat laju kendaraan. Kondisi tersebut berpengaruh terhadap aksesibilitas moda transportasi, terutama kendaraan roda empat.

Terkait kondisi infrastruktur irigasi, kondisi infrastruktur tersebut masih didominasi kerusakan. Ketersediaan infrastruktur irigasi teknis, semi-teknis serta sederhana belum dapat menunjang pengairan yang efisien. Kondisi tersebut disebabkan oleh kondisi kerusakan irigasi baik kerusakan ringan, sedang, maupun kerusakan berat. Kondisi kerusakan tersebut disebabkan oleh kurangnya perawatan dan pemeliharaan jaringan irigasi. Kerusakan pada irigasi tersebut menyebabkan kemungkinan terjadinya kebocoran air. Hal tersebut berdampak pada pemerataan air di setiap kecamatan, serta sistem pengairan yang kurang efektif. Permasalahan lain terkait infrastruktur irigasi adalah ketersediaan irigasi semi-teknis dan sederhana. Menurut Direktorat Jenderal Pengairan (1986) jaringan irigasi semi teknis maupun sederhana secara umum belum efisien dalam menunjang pengairan. Hal tersebut dikarenakan masih kurangnya kemampuan jaringan irigasi tersebut dalam menjaga keseimbangan pengairan maupun kebocoran air. Permasalahan terkait infrastruktur irigasi berdampak pada pemerataan air di setiap kecamatan. Hal tersebut mempengaruhi pola tanam padi di setiap kecamatan berpengaruh terhadap jumlah produksi padi.



Gambar 4.18 Penyebab Tersier pada Analisis Tulang Ikan

4.5.6 Sebab-sebab yang paling mungkin dari permasalahan

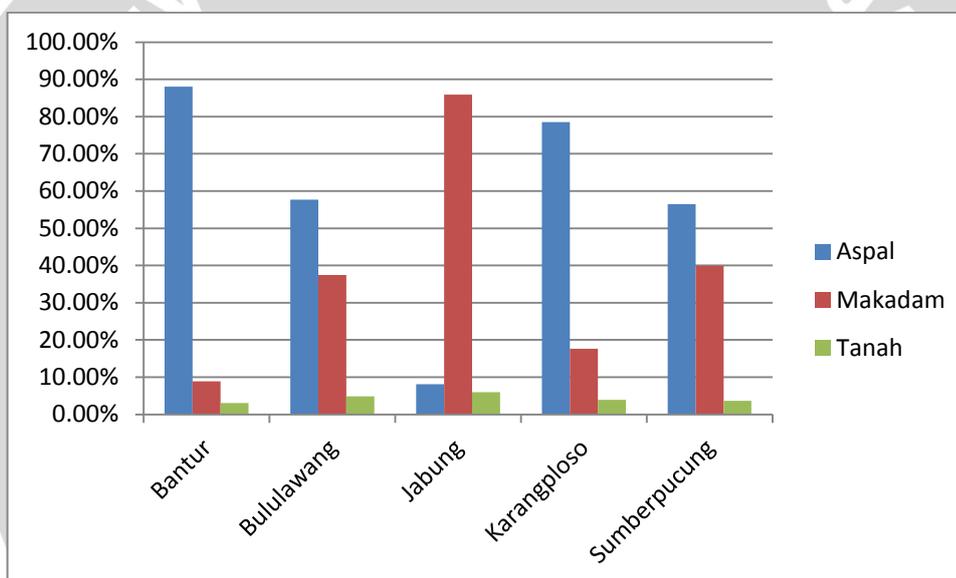
Langkah keenam dalam analisis tulang ikan adalah menentukan faktor-faktor yang paling mungkin mempunyai pengaruh nyata terhadap permasalahan utama. Faktor-faktor yang paling mungkin adalah permasalahan modal, pemasaran, penyuluhan pertanian, serta permasalahan terkait infrastruktur jalan dan irigasi.

4.6 Pengaruh Infrastruktur Jalan Terhadap Harga Beras

Berdasarkan hasil sebelumnya (Lihat: Sub bab 4.6, hal 102-133), diketahui infrastruktur jalan berperan penting dalam menunjang usaha tani. Menurut Farid, M



dan Subekti, A, N. (2012), salah satu yang mempengaruhi disparitas harga komoditas pangan adalah infrastruktur jalan. Infrastruktur jalan berpengaruh terhadap usaha produksi maupun distribusi terkait usaha tani. Terkait usaha produksi, infrastruktur jalan berperan dalam hal kemudahan penyuluhan pertanian, maupun akses transportasi untuk kendaraan berat seperti traktor. Terkait usaha distribusi, infrastruktur jalan berperan dalam hal distribusi barang produksi maupun hasil panen usaha tani. Hal tersebut berpengaruh terhadap jarak tempuh distribusi, serta banyaknya jumlah perjalanan dalam pengangkutan barang. Kondisi tersebut berdampak pada biaya transportasi, dimana berdampak pada harga input maupun harga output gabah maupun beras. Besarnya biaya transportasi berpengaruh terhadap harga beli gabah terhadap petani dan harga jual pada distributor selanjutnya. Biaya transportasi merupakan salah satu input biaya dalam penentuan harga jual beras di pasar.



**Gambar 4.19 Grafik Kondisi Infrastruktur Jalan menuju Pusat Lokasi Sawah**

Berdasarkan tabel diatas terlihat ketersediaan infrastruktur jalan di setiap kecamatan dalam mendukung akses menuju pusat lokasi sawah dari pusat kecamatan. Ketersediaan jalan perkerasan aspal terendah dalam menuju lokasi sawah terdapat di Kecamatan Jabung. Kondisi tersebut menyebabkan semakin besarnya waktu yang diperlukan untuk menuju pusat-pusat lokasi sawah. Besar waktu dan jarak yang diperlukan untuk menuju pusat-pusat lokasi sawah rata-rata sebesar  $\pm 33,83$  menit dengan jarak  $\pm 3,7$  Km. Hal tersebut dikarenakan adanya peningkatan waktu karena sulitnya aksesibilitas melalui jalan dengan perkerasan makadam. Kesulitan proses distribusi berdampak pada penentuan besaran harga beli gabah dan harga jual beras. Hal tersebut disebabkan adanya penambahan biaya transportasi oleh pihak distributor.

Harga beli gabah di Kecamatan Jabung sebesar Rp.3.900. Ketersediaan jalan perkerasan aspal tertinggi terdapat di Kecamatan Bantur. Besar waktu dan jarak yang diperlukan untuk menuju pusat-pusat lokasi sawah di kecamatan tersebut rata-rata sebesar  $\pm 28,4$  menit dengan jarak  $\pm 4,94$  Km. Ketersediaan jalan perkerasan aspal mendukung aktivitas distribusi pertanian di kecamatan tersebut. Harga beli gabah di Kecamatan Bantur sebesar Rp.4.300 dimana lebih besar diantara empat kecamatan lainnya.

Ketersediaan jalan tanah yang kurang mendukung berpengaruh terhadap peningkatan biaya transportasi. Pada lima kecamatan ketersediaan jalan tanah secara umum belum mendukung untuk kendaraan roda dua atau roda empat. Para pelaku usaha tani memerlukan jasa buruh angkut untuk distribusi barang produk pertanian, khususnya gabah. Ketersediaan jalan tanah tertinggi dalam menuju pusat lokasi sawah terdapat di Kecamatan Jabung. Besarnya ketersediaan jalan tanah yang dalam menuju pusat lokasi sawah berdampak pada penentuan harga beli gabah. Hal tersebut dikarenakan adanya biaya jasa buruh angkut. Biaya buruh angkut di Kecamatan Jabung sebesar Rp.3.300/50Kg. Hal tersebut menyebabkan rendahnya harga beli gabah di Kecamatan Jabung karena adanya potongan biaya jasa buruh angkut. Harga beli gabah di Kecamatan Jabung terendah diantara empat kecamatan lainnya yaitu sebesar Rp.3.900/Kg.

Ketersediaan jalan perkerasan makadam terendah di lima kecamatan terdapat di Kecamatan Bantur. Kondisi perkerasan makadam menghambat proses distribusi barang pertanian. Hal tersebut dikarenakan sulitnya aksesibilitas melalui jalan perkerasan makadam. Besarnya ketersediaan perkerasan aspal dibandingkan perkerasan makadam berdampak pada kemudahan aksesibilitas distribusi. Kondisi tersebut mempengaruhi penentuan besaran harga beli gabah. Hal tersebut berdampak pada besarnya harga beli gabah di Kecamatan Bantur dibandingkan kecamatan lainnya.

#### **4.7 Pengaruh Infrastruktur Irigasi Terhadap Harga Beras**

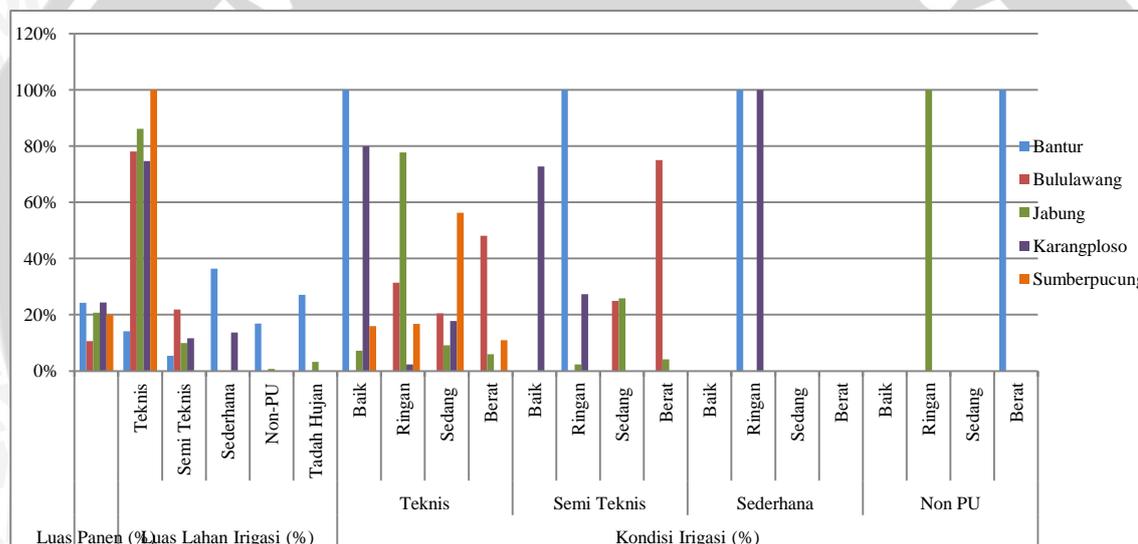
Berdasarkan analisis sebelumnya (Lihat: Sub bab 4.6, hal 102-133), diketahui infrastruktur irigasi berperan penting dalam peningkatan usaha tani. Infrastruktur irigasi berperan terkait peningkatan produktivitas luas areal sawah. Hal tersebut dikarenakan infrastruktur irigasi berperan terkait pengairan sawah, dimana pengairan merupakan salah satu faktor penting dalam produktivitas sawah. Ketersediaan pengairan yang optimum juga berpengaruh terhadap pola tanam padi di lima kecamatan wilayah penelitian. Hal tersebut berdampak pada luas panen padi masing-masing wilayah.

Besaran luas panen berdampak pada ketersediaan pasokan gabah di lima kecamatan wilayah penelitian. Hal tersebut berdampak pada ketersediaan beras mulai dari distributor hingga para pedagang, khususnya di pasar-pasar utama lima kecamatan wilayah penelitian. Ketersediaan beras merupakan salah faktor dalam penentuan harga-harga beras di pasar. Faktor lain dari penentuan harga-harga beras adalah kualitas gabah yang dihasilkan.

**Tabel 4.26 Pengaruh Luas Panen dan Produktivitas terhadap Produksi Gabah**

Kecamatan	Luas Sawah (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produktivitas (Ha)	Produksi (Ton)
Bantur	1.253	2.872	100,12	28.754
Bululawang	1.960	1.267	86,69	10.984
Jabung	1.404	2.461	56,7	13.953
Karangploso	1.324	2.887	67,71	19.549
Sumberpucung	1.873	2.377	65,48	15.564
Jumlah	7.814	11.864	377	88.804

Sumber : Survey Sekunder 2013



**Gambar 4.20 Grafik Pengaruh Infrastruktur Irigasi terhadap Luas Panen**

Berdasarkan grafik diatas terlihat bahwa luas panen terbesar diantara lima kecamatan wilayah penelitian adalah Kecamatan Karangploso. Luas panen kecamatan tersebut sebesar 24,33% dari total luas panen lima kecamatan. Hal tersebut dipengaruhi oleh kondisi infrastruktur irigasi dimana didominasi kerusakan ringan. Ketersediaan luas lahan irigasi teknis Kecamatan Karangploso tergolong kecil diantara wilayah lainnya yaitu sebesar 75% dari total luas lahan irigasi di kecamatan tersebut.

Pada kondisi irigasi teknis dan semi teknis terlihat kondisi irigasi dan semi teknis tergolong baik, sedangkan pada irigasi sederhana terlihat kondisi irigasi tersebut didominasi kerusakan ringan. Kondisi tersebut berpengaruh terhadap kinerja masing-masing irigasi. Kinerja infrastruktur irigasi yang optimal berpengaruh besar terhadap peningkatan luas panen padi di Kecamatan Karangploso. Hal tersebut terlihat dari

besaran selisih antara luas panen dengan luas sawah dibandingkan Kecamatan Bululawang, Jabung, dan Sumberpucung.

Luas panen terbesar kedua diantara lima kecamatan wilayah penelitian adalah Kecamatan Bantur. Luas panen kecamatan tersebut sebesar 24,20% dari total luas panen lima kecamatan. Ketersediaan luas lahan irigasi teknis Kecamatan Bantur terkecil diantara empat wilayah lainnya yaitu sebesar 14% dari total luas lahan irigasi di kecamatan tersebut. Luas lahan irigasi di kecamatan tersebut didominasi oleh lahan irigasi sederhana. Kondisi irigasi teknis di kecamatan tersebut 100% tergolong baik dari total infrastruktur irigasi teknis yang tersedia di kecamatan tersebut, sedangkan kondisi infrastruktur irigasi sederhana tergolong 100% kerusakan ringan.

Kondisi infrastruktur irigasi yang didominasi kondisi baik maupun kerusakan ringan, berpengaruh terhadap kinerja masing-masing irigasi. Kinerja infrastruktur irigasi yang optimal berpengaruh besar terhadap peningkatan luas panen padi di Kecamatan Bantur. Hal tersebut terlihat dari besaran selisih antara luas panen dengan luas sawah dibandingkan empat kecamatan lainnya.

Luas lahan irigasi teknis terbesar dari lima kecamatan adalah Kecamatan Sumberpucung. Ketersediaan luas lahan irigasi teknis kecamatan tersebut sebesar 100% dari total luas lahan irigasi teknis di kecamatan. Kondisi infrastruktur irigasi dimana keseluruhan irigasi teknis, berperan besar terhadap luas panen di kecamatan tersebut. Kondisi infrastruktur irigasi teknis di kecamatan tersebut didominasi kerusakan sedangsebesar 56% dari total infrastruktur irigasi teknis yang tersedia. Hal tersebut menyebabkan kurangnya optimal peran infrastruktur irigasi. Kondisi tersebut merupakan salah satu faktor dimana seringkali terjadi permasalahan pemerataan pengairan. Terdapat kebocoran air pada saluran irigasi, merupakan permasalahan pengairan di sebagian wilayah Kecamatan Sumberpucung.

Tidak meratanya pengairan berpengaruh terhadap pola tanam padi pada sebaran sawah-sawah di kecamatan tersebut, sehingga berpengaruh pada luas panen di kecamatan tersebut. Hal tersebut terlihat dimana selisih antara luas panen dengan luas sawah tidak terlalu besar dibandingkan Kecamatan Bantur, Karangploso, dan Jabung.

Luas panen terkecil diantara lima kecamatan wilayah penelitian adalah Kecamatan Bululawang. Luas panen kecamatan tersebut sebesar 10,67% dari total luas panen lima kecamatan. Kondisi infrastruktur irigasi di Kecamatan Bululawang terdiri dari irigasi teknis dan semi teknis. Luas lahan irigasi teknis Kecamatan Bululawang sebesar 78% dari total luas lahan irigasi di kecamatan tersebut. Hal tersebut merupakan

potensi bagi kecamatan tersebut dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas usaha tani. Kondisi infrastruktur irigasi dimana didominasi kerusakan ringan hingga berat, menyebabkan peran infrastruktur irigasi tidak dapat optimal.

Permasalahan kebocoran air menyebabkan besarnya kemungkinan terjadi permasalahan pemerataan air. Hal tersebut berdampak terhadap pola tanam padi pada sebaran sawah-sawah di kecamatan tersebut, dimana permasalahan kekeringan merupakan dampak yang terjadi. Kondisi tersebut berdampak pada besaran luas panen di Kecamatan Bululawang. Hal tersebut terlihat dimana besaran selisih antara luas panen dengan luas sawah terkecil dibandingkan empat kecamatan lainnya.

#### **4.8 Pengaruh Infrastruktur Kelembagaan Terhadap Harga Beras**

Berdasarkan analisis sebelumnya (Lihat: Sub bab 4.6, hal 102-133), diketahui infrastruktur sosial yaitu kelembagaan berperan terkait peningkatan usaha tani. Infrastruktur kelembagaan berperan terkait sarana permodalan dan pemasaran, serta sarana penunjang berupa pengadaan program-program penyuluhan dan peningkatan infrastruktur pendukung usaha tani.

Terkait sarana produksi di lima kecamatan, peran kelembagaan KUD dan Gapoktan masih belum optimal. Hal tersebut disebabkan adanya keterlambatan distribusi sarana produksi dari distributor sebelumnya. Tidak seimbanginya ketersediaan sarana produksi dengan besarnya kepentingan pemenuhan sarana produksi menyebabkan tidak optimalnya proses usaha tani padi. Terbatasnya ketersediaan sarana produksi memaksa petani mengeluarkan modal lebih untuk mendapatkan sarana produksi. Hal tersebut berdampak pada biaya input usaha tani. Meskipun terjadi peningkatan biaya input usaha tani, namun biaya output harga gabah yang diterima pihak petani tidak mengalami peningkatan.

Terkait sarana permodalan di lima kecamatan, peran infrastruktur kelembagaan khususnya KUD masih belum maksimal. Hal tersebut terlihat dimana para petani mengalami permasalahan terkait permodalan. Pihak petani mengalami kendala terkait jaminan pengembalian peminjaman modal. Permasalahan terkait permodalan berdampak terhadap harga jual gabah petani ke pihak distributor. Para petani tidak dapat berbuat banyak dalam penentuan harga jual gabah, hal tersebut dilakukan agar mendapat modal kembali dari hasil usaha tani. Monopoli harga cenderung terjadi terhadap petani dimana mengalami permasalahan modal.

Terkait sarana pemasaran, peran infrastruktur kelembagaan di lima kecamatan juga belum maksimal. Hal tersebut terlihat dimana peran KUD belum dapat memasarkan hasil usaha tani. Kondisi tersebut dikarenakan kurangnya modal KUD dalam memasarkan hasil tani, serta terbatasnya jaringan pemasaran gabah. Kelembagaan gapoktan turun serta terkait pemasaran gabah. Kelembagaan tersebut masih terbatas dalam menampung hasil panen, hal tersebut dikarenakan keterbatasan dana dan tempat penampungan. Keterbatasan anggaran dana pihak sarana pemasaran berdampak pada penentuan harga beli gabah pada pihak petani. Kecilnya besaran harga beli berdampak pada pendapatan pihak petani khususnya saat musim panen.

Kelembagaan terkait pemasaran lainnya adalah tengkulak. Lembaga tersebut dikelola individu ataupun kelompok, adanya usaha memperoleh keuntungan perdagangan antar tengkulak dengan petani, menyebabkan adanya monopoli harga antar petani dan tengkulak. Tengkulak mendistribusikan hasil pembelian gabah ke *slep*/penggilingan dimana merupakan distributor selanjutnya. *Slep*/penggilingan merupakan lembaga penunjang dimana dikelola individu ataupun kelompok. Sama halnya dengan tengkulak, terdapat usaha memperoleh keuntungan perdagangan antara *slep*/penggilingan dengan distributor lainnya. Kondisi lembaga pemasaran ataupun penunjang dimana masih dikelola dalam bentuk usaha individu ataupun kelompok, berdampak pada penentuan harga gabah maupun beras.

Belum optimalnya sarana produksi, permodalan, maupun pemasaran berdampak pada antusias pihak petani dalam melakukan usaha tani padi. Kondisi tersebut berdampak pada kemampuan para petani terkait peningkatan jumlah produksi pada di setiap kecamatan. Seperti dijelaskan pada bahasan sebelumnya, jumlah produksi padi berdampak pada harga gabah di setiap kecamatan. Menurunnya jumlah produksi padi berdampak pada peningkatan harga beras di pasar-pasar setiap kecamatan.

Terkait sarana penunjang lainnya yaitu HIPPA, lembaga tersebut merupakan gabungan para petani pengguna air. Lembaga tersebut tidak berpengaruh langsung terkait harga beras. Tujuan lembaga tersebut adalah pemerataan dan meningkatkan kualitas dan kuantitas pengairan usaha tani.

Kelembagaan lain yang mendukung usaha agribisnis padi adalah kelembagaan kelompok tani. Lembaga kelompok tani merupakan lembaga yang mempunyai hubungan terdekat dengan petani, dimana berperan pada subsistem usaha tani. Lembaga kelompok tani merupakan lembaga penghubung antara petani dengan lembaga-lembaga lainnya baik formal maupun non-formal. Peran lembaga kelompok

tani berpengaruh terhadap peningkatan produktivitas padi. Kemampuan kelompok tani berpengaruh terhadap keaktifan kelompok dalam meningkatkan usaha tani, khususnya penyuluhan terhadap para petani. Tingkat kemampuan kelompok tani belum menjamin peningkatan produktivitas padi. Perlu adanya dukungan dari petani dalam menerapkan sistem tani hasil program penyuluhan.

**Tabel 4.27 Pengaruh Peran Infrastruktur Kelembagaan terhadap Produktivitas Padi**

Kecamatan	Luas Sawah (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produktivitas (Ha)	Produksi (Ton)	Kelompok Tani Pemula	Kelompok Tani Lanjut
Bantur	1.253	2.872	100,12	28.754	65,38%	34,61%
Bululawang	1.960	1.267	86,69	10.984	53,12%	46,87%
Jabung	1.404	2.461	56,7	13.953	80,64%	19,35%
Karangploso	1.324	2.887	67,71	19.549	64,70%	35,29%
Sumberpucung	1.873	2.377	65,48	15.564	47,61%	42,85%
Jumlah	7.814	11.864	377	88.804		

Sumber : Survey Sekunder 2013

Berdasarkan tabel di atas diketahui Kecamatan Bululawang mempunyai produktivitas padi tertinggi. Ketersediaan kelompok tani tingkat lanjut sebesar 46,87%, mendukung kemampuan para petani terkait sistem tani efektif. Produktivitas terendah terdapat di Kecamatan Jabung sebesar 56,7 Kw/Ha. Ketersediaan kelompok tani tingkat pemula sebesar 80,64%, berpengaruh terhadap rendahnya kemampuan kelompok tani dalam meningkatkan kemampuan para petani terkait sistem tani. Kurang mampunya para kelompok tani dalam memberikan penyuluhan, berdampak pada sistem tani petani yang kurang efektif. Hal tersebut juga terjadi di Kecamatan Karangploso. Ketersediaan kelompok tani tingkat pemula sebesar 64,70%, berdampak pada kemampuan para petani dalam meningkatkan usaha tani. Kondisi tersebut berdampak pada produktivitas padi sebesar 67,71% di Kecamatan Karangploso.

Kondisi di atas berbeda dengan Kecamatan Bantur dan Kecamatan Sumberpucung. Dijelaskan sebelumnya, tingkat kemampuan kelompok tani belum menjamin peningkatan produktivitas padi. Kondisi tersebut juga dipengaruhi oleh dukungan dari para petani, khususnya dalam menerapkan sistem tani hasil program penyuluhan. Kecamatan Bantur mempunyai kelompok tani tingkat pemula sebesar 65,38%, dengan produktivitas padi sebesar 100,12 Ha/Kw. Besarnya ketersediaan kelompok tani tingkat pemula tidak berpengaruh terhadap tingginya produktivitas padi. Hal tersebut dikarenakan besarnya eksistensi para petani dalam menerapkan hasil penyuluhan pertanian.

Kondisi tersebut berbeda dengan Kecamatan Sumberpucung. Ketersediaan kelompok petani di kecamatan tersebut didominasi tingkat menengah keatas, namun hal

tersebut tidak berdampak pada produktivitas padi. Terlihat besar produktivitas padi di kecamatan tersebut sebesar 65,48 Kw/Ha, dimana lebih kecil dibandingkan Kecamatan Bantur. Kondisi tersebut disebabkan oleh rendahnya eksistensi para petani dalam menerapkan hasil penyuluhan pertanian, meskipun terdapat dukungan kelompok tani tingkat kemampuan menengah keatas.

Produktivitas padi berpengaruh terhadap produksi padi di setiap kecamatan. Hal tersebut berdampak pada ketersediaan gabah di kecamatan. Ketersediaan gabah berdampak ketersediaan beras di pasar, dimana mempengaruhi harga jual beras di pasar-pasar kecamatan. Peran kelembagaan berpengaruh dalam meningkatkan usaha tani, khususnya peningkatan produktivitas padi. Oleh karena itu, infrastruktur kelembagaan berpengaruh secara tidak langsung terhadap besaran harga jual beras di pasar.

